



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN
MINAPOLITAN DI KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

OLEH :

ALIYA SAVITRI

1106000754

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

DEPOK

2015



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN
MINAPOLITAN DI KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

OLEH :

ALIYA SAVITRI

1106000754

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
2015**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aliya Savitri

NPM : 1106000754

Tanda Tangan:



Tanggal : 26 Juni 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aliya Savitri

NPM : 1106000754

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Perencanaan Pengembangan Kawasan
Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Afati Indri Wardani, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang: Nidaan Khafian, S.Sos., M.A. (.....)

Pembimbing: Drs. Moh. Riduansyah Anza, M.Si (.....)

Penguji Ahli: Zuliansyah Putra, Z, S.Sos, M.Si (.....)

Di tetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada ALLAH S.W.T , karena atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga dicurahkan kepada Rasulullah S.A.W, keluarga dan para sahabatnya. Penelitian yang berjudul **”Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi”** ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang tiada hentinya dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, peneliti diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M. Sc. selaku Dekan FISIP UI
2. Dr. Roy Valiant Solomo, M.Soc.Sc selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
3. Dr. Lina Miftahul Jannah, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
4. Teguh Kurniawan, S.Soc.,M.Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
5. Drs. Mohammad Riduansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Dosen-dosen FISIP UI, khususnya dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan ikhlas kepada penulis dan teman-teman mahasiswa lain.
7. Bapak Dwi Sujatmo dan Ibu Suhartini selaku orangtua dari peneliti yang tiada lelah memberikan dukungan dan dengan ikhlas memberikan doa kepada penulis.
8. Mba Titik Nurhandayani selaku staff dari Kelembagaan Usaha Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Bapak Chefy Yana selaku Kepala Seksi Bidang Pengembangan Ekonomi Primer Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi

10. Tedi Koswara selaku Kepala Seksi Pengembangan Kepelabuhan dan Pendaratan Ikan/Penata tk. I. III/d, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi
11. Ayom Prabowo selaku Kepala Bidang P2HP, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi
12. Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr selaku Dekan Fakultas Pertanian IPB
13. Bapak Iwan Sefriana selaku staff bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat
14. Bapak Said selaku Ketua KUB di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
15. Bapak Didi selaku masyarakat nelayan yang bersedia untuk di wawancarai
16. Sahabat-sahabat tersayang. Indah K, Neng T, Yuli A, Aulia R, F. Ninchy, Sovia N, Fitri E, Noviani R, Diba A, Dwi R, Tri J, Intan S, Tri Asih
17. Teman-teman terbaik. Aditya M M, Siti M, Gita T, Ira Yunita, Agtesya N, Achilles Y, Cahyo W, Annisa N.K.
18. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Reguler dan Paralel 2011.
19. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Disadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, berharap adanya masukan dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat.

Depok,

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliya Savitri
NPM : 1106000754
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non - exclusive Royalty - Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*); merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 26 Juni 2015

Yang Menyatakan


(Aliya Savitri)

Abstrak

Nama : Aliya Savitri

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

Skripsi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan minapolitan masih belum optimal karena masyarakat nelayan yang masih banyak miskin. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan secara menyeluruh dibuat dalam dokumen perencanaan *masterplan* yang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan masyarakat dan menunjukkan adanya koordinasi vertikal dan horizontal dalam perencanaannya. Terdapat permasalahan dalam perencanaan tersebut yaitu partisipasi masyarakat nelayan khususnya nelayan buruh yang masih kurang dan terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Jakarta – Bogor – Ciawi dan Palabuhanratu. Pengembangan yang dilakukan mengarah pada industrialisasi dengan pembangunan melalui zona inti dan zona pendukung. Namun pembangunan masih belum maksimal karena masih terdapat kendala seperti infrastruktur yang belum maksimal, akses peminjaman modal yang masih sulit dan budaya masyarakat nelayan yang tidak disiplin.

Kata kunci : Minapolitan, Pengembangan dan Perencanaan

Abstract

Name : Aliya Savitri

Study Programe : Ilmu Administrasi Negara

Title : *Development Planning of Minapolitan Area in Sukabumi*

This paper discusses about the development planning of Minapolitan area in Sukabumi, which Minapolitan still not optimal because many fishermen are still poor. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results showed that the plans are made in the master plan which involves the central government, provincial government, local government, private, and society. it shows that there are vertical and horizontal coordination in planning. There are problems in the planning that is about participation of fishermen is still less, especially fishermen who work to other fishermen and there is a mismatch between the master plan and the RTRW of provincial and district related to the plan construction of toll roads Jakarta - Bogor - Ciawi and Palabuhanratu. Development conducted with a focus on industrialization, with the construction of the core zone and the supporting zone. But development is still not maximal because there is some constraints like infrastructure is still not maximal, access to capital lending is still difficult and fishermen's culture undisciplined.

Keywords: Minapolitan; Development; Planning

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademisi	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
 BAB 1 Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Signifikansi Penelitian.....	9
1.5 Sistematikan Penelitian	9
 BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori	 11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Kerangka Teori.....	21
2.2.1 Otonomi Daerah	21
2.2.2 Pembangunan Daerah.....	22
2.2.3 <i>Regional Planning</i>	25
2.2.4 Minapolitan	31
 BAB 3 Metode Penelitian	 35
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Jenis penelitian	35
3.3.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian	35
3.3.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian	35
3.3.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu	36
3.3.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3.1 Wawancara Mendalam	36
3.3.1 Studi Kepustakaan.....	39
3.4 Teknik Pemilihan Informan	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	39

3.6	Batasan Penelitian	39
3.7	Proses Penelitian	40
3.7	Keterbatasan Penelitian	40
BAB 4	Gambaran Umum	42
4.1	Profil Kabupaten Sukabumi	42
4.2	Perikanan Kabupaten Sukabumi	45
BAB 5	Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi	55
5.1	Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi.....	55
5.1.1	Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi	55
5.1.2	Bentuk dan Tata Laksana Perencanaan	73
5.2	Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi	79
5.2.1	Pihak yang Terlibat Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi	79
5.2.2	Kendala yang Dihadapi	92
5.2.2.1	Pemerintah.....	92
5.2.2.2	Masyarakat.....	98
BAB 6	Penutup	102
6.1	Simpulan.....	102
6.2	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Sukabumi Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2013 (Jutaan Rupiah).....	6
Tabel 2.1 Matriks Pengkajian Penelitian	15
Tabel 3.1 Informan.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Kapal Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2013	47
Tabel 4.2 Jumlah Kapal Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2014	47
Tabel 4.3 Jumlah Nelayan Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2014.....	48
Tabel 4.4 Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Sukabumi.....	49
Tabel 4.5 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Sukabumi.....	50
Tabel 5.1 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2014.....	64
Tabel 5.2 Daftar Penerima Bantuan Kapal Tahun 2014	66
Tabel 5.3 Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2014	68
Tabel 5.4 Pendapatan Nelayan Kabupaten Sukabumi Tahun 2014	71
Tabel 5.5 Bantuan Pinjaman Modal Oleh Perbankan	80
Tabel 5.6 Pengembangan Kawasan Wisata Dalam Kegiatan Minapolitan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi	82
Tabel 5.7 Pengembangan Pendidikan Masyarakat dalam Kegiatan Minapolitan ..	86
Tabel 5.8 Kegiatan Peduli Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi	88
Tabel 5.9 Kegiatan Rehab Rumah Nelayan Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap	4
Gambar 1.2 PDRB Kabupaten Sukabumi	5
Gambar 1.3 Jumlah Volume Produksi dan Nilai Produksi Sebelum Minapolitan dan Setelah Minapolitan di Kabupaten Sukabumi (Jutaan Rupiah)	6
Gambar 1.4 Jumlah Volume Produksi dan Nilai Produksi Sebelum Minapolitan dan Setelah Minapolitan di Kabupaten Bitung (Jutaan Rupiah)	7
Gambar 2.1 Proses Perencanaan Regional Melalui Koordinasi Horizontal dan Vertikal di Inggris	30
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukabumi	42
Gambar 4.2 Peta Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sukabumi	43
Gambar 4.3 Grafik Statistik Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Hingga Tahun 2013	44
Gambar 5.1 Zona Inti Minapolitan Kabupaten Sukabumi	59
Gambar 5.2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Zona Pendukung Minapolitan	60
Gambar 5.3 Grafik Volume Produksi Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2014	64
Gambar 5.4 Grafik Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2014	65
Gambar 5.5 Pengolahan Ikan Menjadi Ikan Pindang, Bakso Ikan dan Abon Ikan	67
Gambar 5.6 Pasar Ikan Ciwaru di Kawasan TPI Ciwaru	70
Gambar 5.7 Rumah Nelayan di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi	71
Gambar 5.8 Pemanfaatan Bantuan Motor Dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Serah Terima Bantuan Motor Kepada Kelompok Usaha dan Usaha Souvenir	81
Gambar 5.9 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukabumi	85
Gambar 5.10 Kegiatan Pendidikan Bagi Anak-Anak dan Anak-anak yang Sedang Bekerja	87
Gambar 5.11 Rehab Rumah Masyarakat Nelayan Kabupaten Sukabumi	91
Gambar 5.12 Pemasangan Sambungan Listrik Desa Nelayan	91
Gambar 5.13 Kondisi Jalanan Rusak, Partisipasi Masyarakat Dalam Memperbaiki Jalan Rusak dan Kondisi Jalan Rusak yang Telah Diperbaiki	96

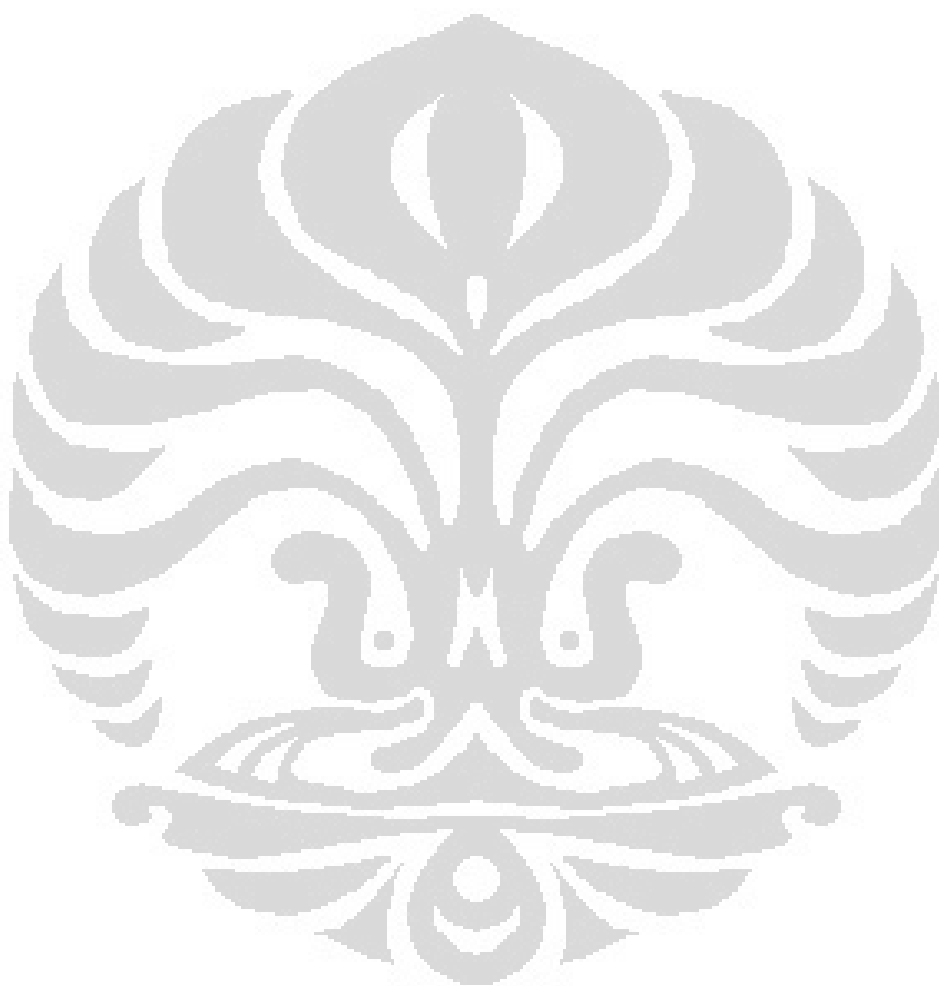
DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 2: Pedoman Wawancara

LAMPIRAN 3: Data bantuan kapal kepada kelompok nelayan dari tahun 2011-2014

LAMPIRAN 4: Realisasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah 2013-2014



BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, pertanyaan dari penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa. Sebagai negara kepulauan, pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam mengakomodir kebutuhan rakyat di seluruh wilayahnya, keterbatasan inilah yang menjadi salah satu alasan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah agar kebutuhan rakyat dapat dengan mudah terakomodir dan cepat terpenuhi sehingga tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kesejahteraan rakyat dapat cepat tercapai.

Penyelenggaraan otonomi daerah terkait dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, dimana salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas desentralisasi. Menurut Koesoemahatmadja (dalam Djaenuri, 2012:3) asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri, desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Desentralisasi memberikan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dimana wilayah Negara pada dasarnya memiliki kondisi yang berbeda-beda, dari segi geografis misalnya, sehingga daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di daerah (Kaho, 2003: 10).

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan mengurus rumah tangganya memerlukan pendanaan. Pendanaan ini berdasarkan pasal 285 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah. Fenomena mencolok dari hubungan antara pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Kuncoro, 2004:18), salah satunya dapat terlihat dalam kenaikan anggaran transfer daerah setiap tahunnya dalam APBN, misalnya dari tahun 2013 sebesar Rp. 529,4 Triliun menjadi Rp. 592,6 Triliun pada tahun 2014 (Kementerian Keuangan, 2014). Untuk itu penting bagi pemerintah daerah menyokong sumber dari pendapatan aslinya dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung membantu pemerintah pusat karena beban anggaran di pusat dapat berkurang. Hal tersebut merupakan cerminan dari kemandirian dan kesiapan daerah sebagai daerah otonom. Atas hal tersebutlah kini pemerintahan daerah giat untuk melakukan pembangunan.

Terkait dengan pembangunan ekonomi, terlebih dewasa ini kondisi persaingan yang semakin ketat menuntut setiap aktor untuk dapat mempersiapkan diri menghadapinya, tidak terkecuali kesiapan dari pemerintah daerah. Terdapat beban yang harus dipikul oleh daerah, yaitu menyiapkan daerah sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri-industri luar negeri yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas negara (Kuncoro, 2004:282).

Pembangunan yang daerah lakukan menyesuaikan kemampuan diri dari daerah tersebut dan tentu saja dorongan dari kebijakan pemerintah pusat. Namun, kemampuan daerah yang berbeda tersebut juga dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Pendekatan pembangunan yang lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar, dimana investasi dan sumberdaya cenderung terserap dan hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan saja, sementara wilayah perdesaan (*hinterland*) mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan atas pembangunan yang terjadi di daerah perkotaan tersebut (<http://disnakan.bogorkab.go.id>, 2014). Oleh karena itu, dewasa ini pembangunan daerah berdasarkan potensi kini semakin gencar dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah baik dari perairannya maupun daratan. Namun, dalam memanfaatkan potensi alam tersebut terkadang dilakukan oleh daerah terlalu berlebihan yang pada akhirnya dapat merusak potensi alam tersebut. Terdapat sifat dan macam sumber daya yang digolongkan atas tiga hal, yaitu (Irawan dan Suparmoko, 1988:122)

1. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, mencakup udara, energi matahari, dan air hujan
2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mencakup air yang berada di danau, sungai dan sebagainya, kualitas tanah, hutan dan margasatwa
3. Sumber daya alam yang tidak diperbaharui, seperti sumber mineral yang mencakup logam, minyak bumi dan batu bara

Melakukan pembangunan berkelanjutan merupakan pilihan yang tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah. Dengan kata lain, tidak hanya melakukan pembangunan ekonominya saja tetapi juga ikut membantu menjaga dan melestarikan potensi alam yang dimilikinya tersebut.

Sebagai negara yang dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah perairan, kini telah mencanangkan kebijakan revolusi biru. Langkah revolusi biru merupakan upaya untuk mengoptimisasikan kekayaan perairan Indonesia secara berkelanjutan. Revolusi biru memberikan peluang untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melakukan inovasi dan terobosan melalui percepatan peningkatan produksi dan optimalisasi penangkapan ikan dan budidaya (Sunoto, tanpatahun:3). Dalam revolusi biru terdapat konsep minapolitan, dimana yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsep manajemen ekonomi kawasan berbasis kelautan dan perikanan (<http://ittc.co.id>, tanpa tahun). Minapolitan berasal dari kata mina dan kata politan, dimana kata mina berarti perikanan dan politan yang mempunyai arti kota, maka minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).

Program minapolitan mendukung pemanfaatan berkelanjutan atas sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan kawasan minapolitan bila diperhatikan dan dilakukan dengan serius tentu akan membantu daerah setempat untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikananannya. Berdasarkan

perkembangan kawasan minapolitan, kini terdapat 145 kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dan sebanyak 57 kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap, hal ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013. Dalam implementasinya, pengembangan kawasan minapolitan memiliki karakteristik pada sentra-sentra produksi dan pemasaran yang berbasis pada perikanan, dan mempunyai *multiplier effect* tinggi terhadap kegiatan ekonomi, produksi, perdagangan, jasa, pelayanan, kesehatan dan sosial dimana satu sama lain akan saling terkait dan mempunyai sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi layaknya sebuah kota (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).

Kawasan minapolitan pertama di Indonesia adalah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan KepMen tersebut dikembangkan berbasis pada sektor perikanan tangkap, hal tersebut karena Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Samudera Hindia. Minapolitan berbasis perikanan tangkap secara sederhana dapat digambarkan seperti berikut ini:



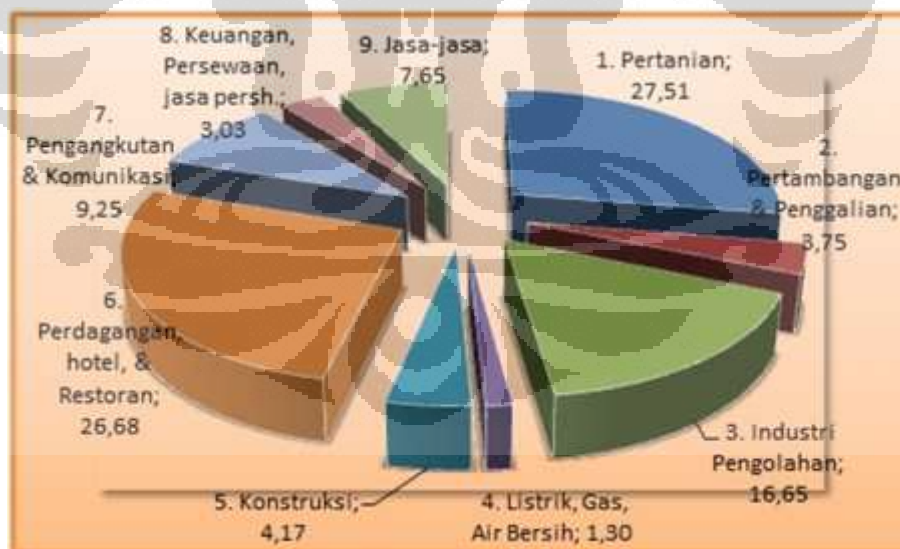
Gambar 1.1 Peta Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013

Kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap yang ideal mencakup beberapa lokasi dimana terdapat zona inti dan zona pendukung, selain itu berdekatan dengan zona inti terdapat pasar ikan dan Industri serta tidak jauh dari lokasi Zona

Inti tersebut terdapat lokasi perumahan nelayan, zona pariwisata dan juga lokasi Budidaya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013). Program pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu (<http://www.antaranews.com>, 2010).

Adanya kawasan minapolitan ini akan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, karena dipastikan akan banyak investor yang datang ke Palabuhanratu khususnya untuk menanamkan modalnya (<http://antarabogor.com>, 2012). Kabupaten Sukabumi pada mulanya merupakan salah satu daerah tertinggal di Jawa Barat, namun pada tahun 2014 lalu Kabupaten Sukabumi berhasil melepaskan predikat sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Keberhasilan ini berkat pembangunan yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Apabila melihat data dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 kontribusi PDRB terbesar yaitu pada sektor pertanian dengan persentase sebesar 27,51 persen dan disusul dari sektor perdagangan dengan prosentase sebesar 26,68 persen, kemudian sektor industri pengolahan dengan 16,65 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 PDRB Kabupaten Sukabumi

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2014

Sektor pertanian terdiri dari lima lapangan usaha, yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Walaupun telah mencanangkan pengembangan kawasan minapolitan

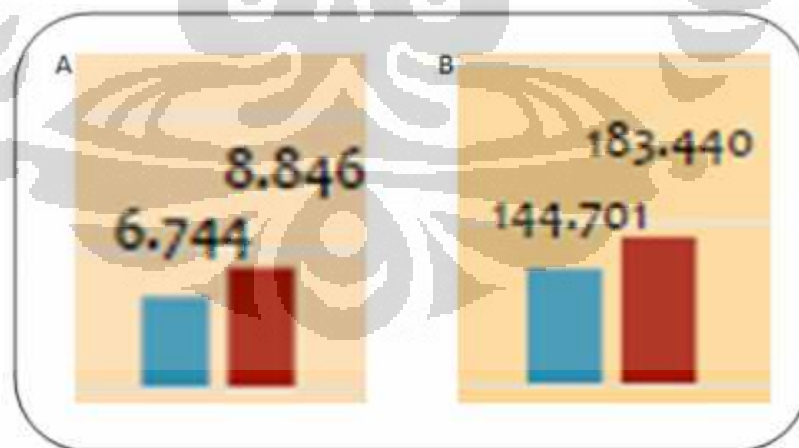
terhitung mulai tahun 2011 setelah penetapan pada tahun sebelumnya, lapangan usaha perikanan masih belum menjadi andalan bagi pemerintahan setempat. Hal tersebut dapat terlihat dalam capaian PDRB berdasarkan lapangan usaha berikut ini:

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Sukabumi Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2013 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. PERTANIAN	5.754.663,78	5.994.665,49	6.020.951,17	6.589.561,12
a. Tanaman Bahan Makanan	3.014.556,49	3.209.180,20	3.209.829,77	3.592.795,07
b. Tanaman Perkebunan	1.050.384,84	1.062.736,96	1.064.669,02	1.097.107,95
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.315.449,39	1.330.358,46	1.342.128,64	1.469.043,92
d. Kehutanan	117.926,12	119.221,22	119.488,21	122.795,59
e. Perikanan	256.946,45	273.130,65	284.835,53	307.818,59

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2014

Walaupun memiliki nilai yang kecil, tetapi terlihat adanya tren peningkatan nilai capaian pada lapangan usaha perikanan dari tahun 2010-2013. Berdasarkan volume produksi dan nilai produksinya, lapangan usaha perikanan sebelum minapolitan dan setelah minapolitan adalah sebagai berikut:

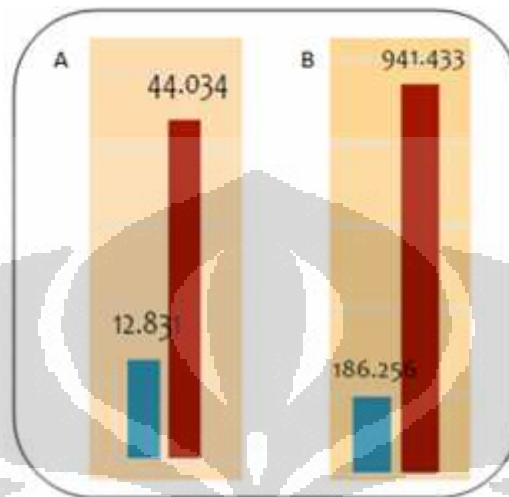


Gambar 1.3 Jumlah volume produksi dan nilai produksi sebelum minapolitan dan setelah minapolitan di Kabupaten Sukabumi (Jutaan Rupiah)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013

Meskipun mengalami peningkatan volume dan nilai produksi, namun jika dibandingkan dengan daerah percontohan lainnya, peningkatan yang terjadi di

Kabupaten Sukabumi belum signifikan, padahal Kabupaten Sukabumi merupakan pengembang kawasan minapolitan pertama di Indonesia. Misalnya jika dibandingkan dengan Kabupaten Bitung yang mengalami peningkatan sangat signifikan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.4 Jumlah volume produksi dan nilai produksi sebelum minapolitan dan setelah minapolitan di Kabupaten Bitung (Jutaan Rupiah)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013

Jika dibandingkan sebelum dan setelah pengembangan kawasan minapolitan, Kabupaten Bitung mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Perbandingan ini berbeda jauh dengan yang dialami oleh Kabupaten Sukabumi.

Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari masalah, misalnya terkait dengan sengketa lahan yang terjadi antara warga dan PT Pertamina sebagai pemilik lahan telah menjadi pemicu terhambatnya program tersebut (<http://antarabogor.com>, 2012). Pembebasan lahan 8,8 hektare yang berada di Kampung/Desa Cemara diniatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) sebagai salah satu kriteria pengembangan kawasan minapolitan (<http://antarabogor.com>, 2012).

Pengembangan kawasan minapolitan memiliki tujuan utama yaitu menyejahterakan nelayan. Namun, nelayan di Kabupaten Sukabumi ternyata masih banyak yang miskin. Dari data Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Sukabumi, sebanyak 50 persen nelayan tidak memiliki rumah pribadi. Walaupun memiliki rumah, tetapi rumahnya berada di atas tanah milik pemerintah, seperti pada 50 kepala keluarga yang tinggal di bekas lapangan

terbang di Kampung Cemara, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu selain itu mayoritas nelayan yang ada di Sukabumi lulusan SD dan SMP dan banyak di antara para nelayan yang mengenyam pendidikan SD pun ada juga yang tidak lulus, walaupun sudah ada yang lulus SMA bahkan sampai sarjana jumlahnya pun masih dapat dihitung jari (<http://www.republika.co.id>, tanpa tahun). Pada saat BBM naik, ribuan nelayan Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat juga terpaksa menganggur karena tidak mampu lagi membeli BBM (<http://www.indosiar.com>, 2014). Pengembangan kawasan minapolitan seharusnya dapat mengakomodir permasalahan tersebut, sehingga para nelayan tidak perlu merasakan kemiskinan dan dapat lebih sejahtera.

1.2 Pokok Permasalahan

Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah mampu mandiri dan tidak hanya berpangku tangan pada pemerintah pusat saja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD di daerah tersebut. Sebagai negara yang dikarunia sumber daya alam melimpah, salah satunya dari sektor kelautan dan perikanan, pemerintah pusat mencanangkan kebijakan pengembangan kawasan melalui program minapolitan. Kabupaten yang pertama kali ditetapkan untuk melakukan pengembangan kawasan minapolitan adalah Kabupaten Sukabumi. Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi berbasis perikanan tangkap, dimana memiliki zona inti di Pelabuhanratu. Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi mengalami kendala seperti pada saat ingin melakukan pembebasan lahan untuk membangun pelabuhan perikanan samudra (PPS). Selain itu, terkait dengan kesejahteraan nelayan kabupaten Sukabumi masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahal tujuan utama dari pengembangan kawasan minapolitan adalah kesejahteraan nelayan. Melalui pengembangan kawasan minapolitan, seharusnya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Namun kenyataannya, masalah-masalah tersebut masih ada di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan masalah tersebut, pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini terdiri dari:

- **Signifikansi Akademis**
Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi dan memahami peran serta dari setiap stakeholder dalam mendukung pengembangan tersebut di tingkat pusat hingga daerah.
- **Signifikansi Praktis**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, serta masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya masyarakat nelayan.

1.5 Sistematika Penelitian

Agar dalam penelitian penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, maka sistematika penelitian disajikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai garis besar dari keseluruhan penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, misalnya kerangka konsep mengenai

otonomi daerah, pembangunan daerah, regional planning dan minapolitan. Kemudian, bab ini juga menguraikan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, dan teknik analisis data.

Bab 4 Gambaran Umum

Bab ini berisi gambaran umum secara geografis, demografis, sarana dan prasarana, teknologi, dan organisasi sosial masyarakat.

Bab 5 Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi dan peran stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan.

Bab 6 Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan kerangka teori yang terkait dengan terkait dengan otonomi daerah, pembangunan daerah, *regional planning* dan minapolitan.

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan sebuah rencana penelitian, tinjauan pustaka mempunyai peranan penting sebagai rujukan dalam meneliti implementasi program dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan kesamaan literatur mengenai teori implementasi program dan minapolitan. Masing-masing penelitian tersebut memiliki cara pembahasan dan metode analisis yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses penelitiannya. Pada bab ini, dirujuk beberapa penelitian mengenai “Pengembangan Kawasan Minapolitan”.

Tinjauan pustaka pertama diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Kartika Yulinda yang dilakukan pada tahun 2012 dengan judul skripsi “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Akselerasi Kawasan Minapolitan Berbasis Budidaya Ikan Lele Di Kabupaten Bogor”. Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor terkait dengan *spending policy* untuk mendukung terciptanya akselerasi kawasan minapolitan berbasis ikan lele di Kabupaten Bogor. Penelitian ini juga menjelaskan tentang upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pembudidaya ikan lele di Desa Putat Nutug dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama berjalannya program ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *spending policy* sebagai salah satu kebijakan yang diimplementasikan Pemda Kabupaten Bogor melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Dinaskan) untuk mendukung terciptanya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor, memetakan kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan lele di Desa Putat Nutug, dan Pemda Kabupaten Bogor selama berjalannya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor dan untuk mengkaji kebijakan

yang diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena ditujukan untuk mengkaji suatu kebijakan yang telah dijalankan sejak awal tahun fiskal 2010, yaitu suatu *grand strategy* yang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Teknis analisis pada penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif, yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan APBD Kabupaten Bogor yang memperlambat terciptanya akselerasi kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor karena kurangnya anggaran dan terjadinya penurunan anggaran dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dina Novianti pada tahun 2011, dengan judul penelitian “Kebijakan Pungutan Negara Untuk Mendukung Pembangunan Minapolitan Indonesia”. Penelitian ini menganalisis kebijakan pungutan Negara yang dilakukan untuk mendukung pembangunan Minapolitan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memetakan kebijakan pungutan negara yang terkait dalam program-program pembangunan minapolitan, mendeskripsikan kebijakan pungutan negara yang dapat bersifat insentif terhadap pembangunan kawasan minapolitan, mendeskripsikan kebijakan pungutan negara yang dapat bersifat disinsentif terhadap pembangunan kawasan minapolitan, mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminimalisir pungutan Negara yang bersifat disinsentif dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminimalisir beban Pungutan Negara yang bersifat disinsentif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena menjelaskan peran kebijakan prungutan Negara untuk mengakselerasi pembangunan Minapolitan baik yang bersifat insentif maupun disinsentif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah cukup mendukung untuk melakukan pengembangan

Minapolitan dengan beberapa fasilitas insentif perpajakan antara lain dengan fasilitas PPh dan PPN, namun terdapat pula kebijakan pungutan Negara yang bersifat disinsentif seperti retribusi dan pungutan Negara yang memberatkan nelayan kecil yang pada akhirnya membuat biaya ekonomi tinggi.

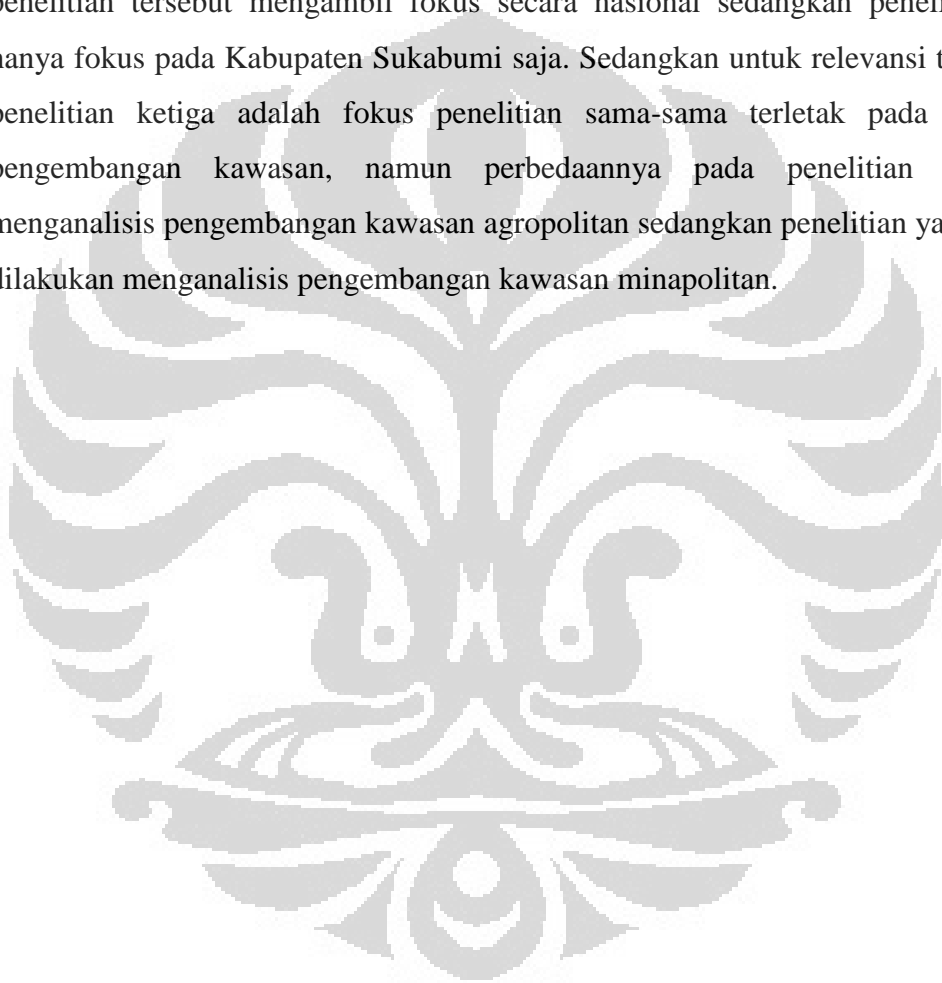
Tinjauan pustaka ketiga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Imas Cempaka Mulia pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Banjar Jawa Barat Melalui Program Agribisnis”. Penelitian ini membahas tentang pengembangan kawasan agropolitan di Kota Banjar Jawa Barat melalui program agribisnis dalam rangka pencapaian visi sebagai daerah dengan basis pertanian yang maju. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengembangan kawasan agropolitan yang terdapat di Kota Banjar Jawa Barat, yang dilakukan melalui program agribisnis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung dan studi kepustakaan. Data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan melalui program agribisnis di Kota Banjar dibagi menjadi dua sub sistem, yaitu sub sistem agribisnis hulu dan sub sistem agribisnis hilir. Masalah pada sub sistem agribisnis hulu terdapat pada lemahnya dukungan di luar dukungan Pemerintah Kota Banjar sedangkan pada sub sistem agribisnis hilir adalah industri pengolahan hasil produksi pertanian yang masih terfokus pada komoditi-komoditi tertentu dan belum ada bentuk kelembagaan yang dapat mengkoordinir industri pengolahan.

Ketiga penelitian di atas menjadi sumber rujukan dalam melakukan penelitian. Hal ini karena ketiga penelitian diatas memberikan informasi terkait dengan kebijakan, implementasi program, dan minapolitan. Dalam tinjauan pustaka pada penelitian pertama, relevansi terhadap penelitian adalah fokus bahasan sama-sama terkait dengan konsep pembangunan kawasan minapolitan, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus analisis penelitian. Dimana pada penelitian tersebut fokusnya terletak pada akselerasi pembangunan kawasan minapolitan berbasis potensi ikan lele melalui *spending policy* di

Kabupaten Bogor, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada analisis pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi. Relevansi terhadap penelitian kedua adalah penelitian sama-sama terkait dengan pembangunan kawasan minapolitan, namun pada penelitian tersebut fokus penelitian terletak pada kebijakan pungutan negara untuk mendukung terselenggaranya pembangunan minapolitan di Indonesia. Selain memiliki perbedaan pada fokus analisis kebijakan, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut mengambil fokus secara nasional sedangkan penelitian ini hanya fokus pada Kabupaten Sukabumi saja. Sedangkan untuk relevansi terhadap penelitian ketiga adalah fokus penelitian sama-sama terletak pada analisis pengembangan kawasan, namun perbedaannya pada penelitian tersebut menganalisis pengembangan kawasan agropolitan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis pengembangan kawasan minapolitan.



Tabel 2.1 Matriks Pengkajian Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Judul Penelitian	“Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Akselerasi Kawasan Minapolitan Berbasis Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bogor”	“ Kebijakan Pungutan Negara Untuk Mendukung Pembangunan Minapolitan Indonesia ”	“ Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Banjar Jawa Barat Melalui Program Agribisnis ”	Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi
Nama Peneliti	Kartika Yulinda	Dina Novianti	Imas Cempaka Mulia	Aliya Savitri
Tahun Penelitian	2012	2011	2012	2015
Tujuan	1. Menganalisis spending policy sebagai salah satu kebijakan yang diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Peternakan dan	1. Memetakan kebijakan pungutan negara yang terkait dalam program-program pembangunan minapolitan. 2. Mendeskripsikan kebijakan pungutan negara yang dapat bersifat insentif terhadap	1. Menjelaskan pengembangan kawasan agropolitan yang terdapat di Kota Banjar Jawa Barat, yang dilakukan melalui program agribisnis.	Menjelaskan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi dan pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi

	<p>Perikanan untuk mendukung terciptanya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor.</p> <p>2. Memetakan kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan lele di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama berjalannya akselerasi</p>	<p>pembangunan kawasan minapolita.</p> <p>3. Mendeskripsikan kebijakan pungutan negara yang dapat bersifat disinsentif terhadap pembangunan kawasan minapolitan.</p> <p>4. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminimalisir pungutan Negara yang bersifat disinsentif.</p> <p>5. Menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini</p>		
--	--	--	--	--

	<p>kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor</p> <p>3. Mengkaji kebijakan yang diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan lele di Desa Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminimalisir beban Pungutan Negara yang bersifat disinsentif.</p>		
--	--	--	--	--

	Kabupaten Bogor selama berjalannya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor.			
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara mendalam dan studi literatur. Wawancara kepada BAPPEDA Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, Sekretarian Kelompok Unit Pembenih Rakyat, Pembudidaya Ikan Lele, dan Akademisi	Studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Prasarana	Wawancara mendalam, Observasi Langsung dan Studi Literatur.	Wawancara Mendalam dan Studi kepustakaan

		Hasil Perikanan, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak dan Akademisi		
Teori	Fungsi Pemerintah, Kebijakan Publik, Spending Policy, dan Minapolitan	Fungsi Pemerintah, Kebijakan Publik, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Pajak, Fungsi Pajak, Insentif, Desentralisasi, Pembentukan Peraturan Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan	Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Konsep Pengembangan Kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah	Otonomi daerah, Pembangunan Daerah, Regional Planning, Minapolitan
Hasil Penelitian	Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan APBD Kabupaten Bogor yang memperlambat tersiptanya akselerasi kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor karena kurangnya anggaran dan penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012.	Pemerintah cukup mendukung untuk melakukan pengembangan Minapolitan dengan beberapa fasilitas insentif perpajakan antara lain dengan fasilitas PPh dan PPN, namun terdapat pula kebijakan pungutan Negara yang bersifat disinsentif seperti retribusi dan pungutan Negara yang	pengembangan kawasan agropolitan melalui program agobisnis di Kota Banjar dibagi menjadi dua sub sistem, yaitu sub sistem agribisnis hulu dan sub sistem agribisnis hilir	Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan melakukan koordinasi secara horizontal dan vertikal. Horizontal dengan OPD, masyarakat dan swasta misalnya dalam membuat <i>masterplan</i> , sedangkan untuk koordinasi vertikal dengan pemerintah

		memberatkan nelayan kecil yang pada akhirnya membuat biaya ekonomi tinggi.		provinsi dan pusat misalnya dengan mesinkronisasikan antara RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi mengarah pada industrialisasi dengan model pengembangan seperti yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu adanya zona inti dan zona pendukung.
Persamaan	Fokus bahasan terkait dengan konsep pembangunan kawasan minapolitan	Fokus bahasan terkait dengan pembangunan kawasan minapolitan di Indonesia	Fokus penelitian sama-sama terletak pada analisis pengembangan kawasan di daerah.	
Perbedaan	Fokus analisis terkait dengan percepatan akselerasi pembangunan kawasan minapolitan basis kan lele melalui <i>spending policy</i> di Kabupaten Bogor.	Fokus analisis penelitian terletak pada kebijakan pungutan negara untuk mendukung terselenggaranya pembangunan minapolitan di Indonesia	Fokus analisis adalah pengembangan kawasan agropolitan di Kota Banjar Jawa Barat melalui program agribisnis.	Fokus analisis terkait dengan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan pemberian wewenang kepada masyarakat yang berada dalam daerah tertentu, dimana penyerahan wewenang ini ditentukan atas dasar karakteristik daerah tersebut. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi tersebut dengan demikian mengandung arti pula adanya pemberian otonomi kepada daerah. Desentralisasi merupakan proses pemberian otonom kepada masyarakat di wilayah tertentu (Hoessein, 2011:24). Lebih lanjut menurut Hoessein (2011:25) yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

Wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan padanan pemerintah daerah, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk masyarakat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan setempat yang secara formal terpisah dari pemerintah pusat.

Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya (Hoessein, 2011:20). Daerah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan tersebut. Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus tugas-tugas atau urusan tertentu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerahnya sendiri (Kaho, 2003:16). Penyelenggaraan pemerintahan di daerah memerlukan kemandirian akan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan segala urusan yang telah diberikan kepada Pemerintah Pusat dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas dan urusan tersebut.

2.2.2 Pembangunan Daerah

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari Negara, melalui penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah wajib untuk menyejahterakan masyarakatnya tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan daerah. Pembangunan wilayah bukan semata-mata fenomena dalam dimensi lokal dan regional namun juga bagian tak terpisahkan dari kepentingan pembangunan makro (skala nasional) bahkan global (Rustiadi dkk, 2011:18). Hal tersebut berarti saat melakukan pembangunan daerah sama juga sedang melakukan pembangunan nasional, karena kedua hal tersebut memiliki keterkaitan. *An important driver of the changes in the context of local and regional development has been the process of globalisation* (Pike,dkk 2006:4). Melalui peningkatan kinerja, tenaga, modal, barang dan jasa sebagai upaya untuk menghadapi globalisasi. *Globalisation is exposing even the most remote spaces to competition and forcing firms, localities and regions to react and adjust to the new economic conditions* (Pike,dkk 2006:4). Kondisi ini memberikan peluang dan tantangan baru, para perusahaan misalnya mulai memanfaatkan kondisi ini dengan sedemikian rupa untuk memajukan perusahaannya. Sama halnya dengan perusahaan, sektor publik daerah juga ikut memanfaatkan kondisi ini untuk pembangunan. Namun kendala yang sektor publik hadapi adalah terkait dengan teknologi yang rendah dan manajemen yang kurang untuk menghadapi persaingan dalam globalisasi. Hal tersebut sering menyebabkan terjadinya pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya.

Pembangunan memang kerap kali dikaitkan dengan perekonomian. Namun menurut Capello dan Nijkamp (2009:1) *regional development is not only an efficiency issue in economic policy, it is also an equity issue due to the fact that economic development normally exhibits a significant degree of spatial variability*. Sektor ekonomi dapat memberi dampak pada sektor lain pula, seperti sosial, lingkungan yang pada akhirnya membawa kepada tujuan kesejahteraan. Kini daerah menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan ekonomi karena kondisi daerah, seperti tingkat pendidikan dan pelayanan yang masih rendah, pendapatan yang masih dibawah rata-rata, dan lain sebagainya. Menurut Beer, Maude dan Pritchard (2003:39), *the region has been rediscovered as an important*

source of competitive advantage in a globalizing political economy. Pentingnya keunggulan kompetitif dalam pembangunan, juga disampaikan oleh Edgar M. Hoover dan Frank Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri, 2004:20) dalam tiga pilar penting proses pembangunan wilayah. Keunggulan kompetitif yang dimiliki daerah dapat menjadi keunggulan kompetitif negara di dunia, selain itu keunggulan kompetitif tersebut dapat menjadi modal pembangunan ekonomi di daerah dengan pendekatan clustering. Pembangunan ekonomi melalui pendekatan kluster yang dikembangkan oleh Porter (1990:8), beliau menyebutkan bahwa *clusters are a prominent feature of the landscape of every advanced economy, cluster formation is an essential ingredient of economic development and clusters offer a new way to think about economies and economic development.* Adanya kerjasama diantara para pelaku usaha seperti pemasok, penyedia layanan, perusahaan-perusahaan di industri terkait, lembaga terkait di wilayah yang sama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Melalui pendekatan ini biasanya akan menimbulkan dampak bagi sektor lain, misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Bahkan tokoh lain menyebutkan bahwa *over the past decade the cluster concept has become the standard term in the field, moreover, Porter has promoted the idea of clusters not only as an analytical concept but also as a key policy tool* (Asheim, Cooke and Martin, 2006:2). Pendekatan ini dapat menjadi pilihan untuk melakukan pembangunan daerah, sehingga perekonomian dapat berkembang pula.

Pemerintah daerah berkepentingan dengan perkembangan ekonomi daerahnya, karena Pemda berkepentingan pada PAD yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi daerah, dimana PAD merupakan fungsi dari pendapatan daerah secara keseluruhan (Suhardjo, 2006:47). Sedangkan menurut Theodore WSchultz (dalam Jhingan, 2012:43) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berarti, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, seperti:

1. Meningkatkan kuantitas barang yang dapat direproduksi
2. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia sebagai agen produksi dan
3. Meningkatkan kadar seni atau kualitas dari barang produksi

Sebagai langkah untuk meningkatkan PAD, sebenarnya terdapat beberapa inisiatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif tersebut adalah melalui reformasi pelayanan investasi dengan melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan, melalui sistem informasi potensi daerah yang dapat dilakukan melalui pameran produk, promosi melalui media elektronik dan cetak, dan melalui peningkatan dan provisi infrastruktur fisik untuk mendukung kegiatan usaha (KPPOD dalam Kuncoro, 2004:290-291). Terkait dengan pengembangan sektor perikanan Indonesia dapat mengadopsi pengalaman dari Jepang, yaitu (Arif Satria dalam Kuncoro, 2004:313-314):

1. Kondisi makro-struktural di Jepang kondusif untuk sektor perikanan dapat berkembang, dimana kondisi struktural dapat terlihat dengan lengkapnya perundang-undangan terkait dengan sektor perikanan dan kebijakan makro yang berpihak kepada nelayan kecil.
2. Terdapat koperasi yang sudah sangat mapan dan memiliki ikatan keanggotaan yang kuat, hal tersebut merupakan peran nyata koperasi dalam mengendalikan dan mengatur *fishery right*.
3. *Fishery right* di Jepang sudah mengakar kuat karena diangkat dari hak-hak ulayat yang dulu pernah berkembang dan sekarang menjadi hukum formal yang berlaku disana.

Peran pemerintah Jepang tersebut merupakan wujud dukungan untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Potensi kelautan dan perikanan Jepang menjadi salah satu modal dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam melakukan pembangunan ekonomi wilayah, terlebih setelah adanya otonomi daerah. Menurut Balkely (1989, 78-81), peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi mencakup pertama wirausaha, menjalankan usaha bisnis dengan memanfaatkan tanah dan bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan konservasi, perencanaan lingkungan, dan tujuan lain yang bersifat untuk meningkatkan ekonomi. Kedua sebagai koordinator, untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi dalam rangka pembangunan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan sektor privat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi ekonomi. Ketiga

sebagai fasilitator, yaitu meliputi peran dalam melakukan pengefisienan proses pembangunan, perbaikan, prosedur perencanaan dan penetapan peraturan dan keempat adalah stimulator, yaitu pemda menstimulasi pengembangan usaha melalui tindakan khusus untuk mempengaruhi perusahaan melakukan investasi di daerah.

2.2.3 Regional Planning

Perencanaan diartikan sebagai penyusunan serangkaian strategi, program dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang masa depan yang telah diprediksikan. Kegiatan dalam menyusun perencanaan adalah (1) kajian kondisi masa lalu sampai saat ini, (2) memprediksi kondisi yang akan terjadi di masa depan, (3) penetapan tujuan dan sasaran di masa depan, dan (4) merumuskan strategi, program, dan seangkaian tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi di masa depan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Djunaedi, 2012:2). Sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya harus membuat perencanaan, karena seperti yang dikatakan oleh Djunaedi perencanaan merupakan proses menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan di lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian.

Proses perencanaan daerah yang pernah ada di Indonesia menurut Djunaedi (2012:8) setidaknya ada empat, yaitu: (1) penyusunan rencana induk (master planning), (2) penyusunan rencana umum (rational comprehensive planning), (3) perencanaan strategis (Strategic planning) dan (4) perencanaan partisipatori. Lanjut menurut beliau untuk saat ini proses perencanaan yang masih digunakan di Indonesia adalah penyusunan rencana umum dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perencanaan strategis dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan perencanaan partisipatori. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam membuat perencanaan dominasi dari pihak-pihak yang terlibat jika dilihat berdasarkan pendekatan tersebut berbeda-beda. Berikut ini merupakan penjelasan peran dominan berdasarkan pendekatan proses perencanaan (Djunaedi, 2012:10-11):

1. *Master Planning*: yang mendominasi adalah pemerintah/penguasa yang dibantu oleh ahli perencanaan. Hal tersebut karena pendekatan ini

berorientasi pada perencanaan fisik yang dipraktekkan oleh arsitek, arsitek lansekap, dan ahli teknik.

2. *Rational comprehensive planning*: yang mendominasi adalah ahli perencanaan yang mendapat tugas dari penguasa/pemerintah. Hal tersebut karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perencanaan fisik saja namun juga mencakup dengan semua hal terkait wilayah, sehingga biasanya perencanaan dengan pendekatan ini biasanya dilakukan secara tim yang beranggotakan dari berbagai disiplin ilmu.
3. *Strategic Planning*: yang mendominasi adalah masyarakat atau para pemangku kepentingan yang melakukan kesepakatan dalam merumuskan rencananya, sedangkan para perencana menjadi fasilitator dalam proses perencanaanya.
4. *Participatory Planning*: yang mendominasi adalah masyarakat atau para pemangku kepentingan yang melakukan kesepakatan dalam merumuskan rencananya, dimana seringkali tanpa campur tangan dari para perencana.

Pendapat Djunaedi di atas memperlihatkan bahwa dominasi dari peran setiap stakeholder dalam membuat perencanaan pada dasarnya disesuaikan dengan rencana yang dibuat. Terkait dengan pendekatan proses perencanaan, menurut Young, perencanaan daerah termasuk kedalam perencanaan strategis.

Urban and regional planning devoted to controlling the use and development of land and property, and strategic planning designed to promote the orderly achievement of spatial or non-spatial objectives may be more closely engaged and the source of productive synergies (Young, 2008:35).

Perencanaan strategis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dimana pedoman ini dianggap langkah yang paling mampu membuat organisasi bertahan dari lingkungan kompetisi yang ketat dalam mencapai tujuan. Hal tersebut karena dalam prosesnya, perencanaan strategis melakukan identifikasi tujuan bahkan hingga membuat scenario planning untuk menghasilkan perencanaan yang benar-benar strategis. Bryson (2004:6) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai

disciplined effort to produce fundamental decisions and actions that shape and guide what an organization (or other entity) is, what it does, and why it does it. At its best, strategic planning requires broad-scale yet effective information gathering, clarification of the mission to be pursued and issues to be addressed along the way, development and exploration of strategic alternatives, and an emphasis on the future implications of present decisions.

Dalam rangka melakukan pembangunan, daerah juga perlu membuat perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan yang daerah lakukan dan juga tujuan umum dari pembangunan nasional. Menurut Friedmann (1964:60) *regional planning would provide the most suitable frame of reference for a balanced integration of development projects of national significance and those based on local initiative.* Pembangunan yang daerah lakukan pada dasarnya juga merupakan sarana pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan nasional dengan inisiatif dan prakarsa dari pemerintah daerah.

Perencanaan daerah merupakan perencanaan yang sangat kompleks, hal tersebut mencerminkan luasnya bidang pengambilan keputusan, ukuran dan keragaman dari keputusan yang akan dibuat oleh daerah. Menurut Dimitrou dan Thompson (2007:72) *the regional institutional context is also complex, so that decision making itself is a very complicated and often unpredictable process.* Kondisi tersebut merupakan tantangan strategis bagi para perencana untuk mengambil keputusan yang efektif, dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan harus ditangani dengan sistematis dan inklusif. Kompleksitas dari perencanaan daerah pada dasarnya tetap diawali dengan penetapan tujuan atas rencana yang akan dibuat. Hall dan Jones (2011:253) berpendapat, *the first step in the planning process, then, is to identify these purposes which the planner seeks to achieve, to order them in terms of their importance and to consider how far they are reconcilable each with the order.*

Dimitrou dan Thompson (2007:5) mengatakan bahwa *regional planning concerned with social space and intended to influence the future distribution of activities in space through the adoption of a planning process.* Dimitrou dan

Thompson juga menyebutkan bahwa perencanaan daerah dibuat untuk mengatasi tantangan utama, yaitu kesenjangan antar daerah, meningkatkan efektivitas ekonomi dan mengarahkan pada perencanaan daerah yang efektif. Dalam melakukan pembangunan daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan sosial dapat terjadi. Hal tersebut dapat diatasi dengan membuat perencanaan daerah terlebih dahulu, walaupun terkadang dalam kenyataannya kesenjangan sosial tetap sulit untuk dihindari. Selanjutnya menurut Dimitrou dan Thompson (2007:5) *distinguishes between regional planning that is economic in nature, which tends to be at the national–regional interface, and regional planning that is spatial and more physical in nature, which typically operates more at the regional–local interface*. Dari pendapat tersebut intinya adalah perencanaan regional dibuat dengan melihat perencanaan untuk mencapai pembangunan dari banyak sudut pandang.

Seperti halnya tujuan dari perencanaan, perencanaan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk pembangunan. Menjadi kewenangan penuh bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan, tentunya atas partisipasi masyarakat atau pemegang kepentingan dan ahli perencanaan.

The primary purpose is deciding on the general distribution of new activities and Developments, this is necessarily indicated on some map base, but the scale of regional planning and other considerations will dictate the level of detail given in showing, for example, new settlements, areas of commercial and economic development, placing of linear or other major infrastructure (Glasson dan Marshall, 2007:12).

Terkait dengan skala waktu dalam implementasi perencanaan yang daerah buat, relatif tidak ada batasan pencapaian. Namun, minimal rencana ini dibuat untuk 10 tahun kedepan.

Selain untuk mencapai tujuan utama dari perencanaan daerah, perencanaan ini juga dilengkapi dengan sejumlah tujuan lain. Di Inggris misalnya, menurut Glasson dan Marshall (2007:12) saat ini di samping untuk memajukan keberhasilan ekonomi, yang sering didefinisikan untuk meningkatkan daya saing, rencana juga biasanya ditujukan untuk mencapai tujuan sosial tertentu (seperti

menyediakan perumahan untuk semua jenjang sosial), dan dengan tujuan lingkungan (baik dalam untuk mencapai 'pembangunan berkelanjutan', atau dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah pada sektor industri dan perusahaan dan kegiatan pelestarian lainnya). Tujuan perencanaan daerah dapat ditetapkan dengan berbagai cara, tergantung pada pengaturan kelembagaan yang dibuat di masing-masing negara (Glasson dan Marshall, 2007:13). Perencanaan daerah pada dasarnya akan memiliki pengaruh kuat dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat misalnya mengintervensi melalui peraturan induk, namun pemerintah daerah tetap memiliki wewenang penuh dalam merinci detail semua hal yang terkait dalam perencanaan daerah tersebut.

Terkait dengan perencanaan daerah, Glasson dan Marshall memberikan langkah atau proses untuk membuat perencanaan dengan menekankan partisipasi dan koordinasi pihak yang terlibat yaitu dengan mengembangkan dua dimensi penting, koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. *Vertical co-ordination between the different planning authorities or agencies is critical* (Glasson dan Marshall, 2007:49). Koordinasi vertikal adalah merupakan koordinasi yang dilakukan oleh perencana di daerah dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini diperlukan mengingat agar tidak bertolak-belakang rencana yang dibuat oleh daerah dengan rencana pemerintah pusat. Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat dapat melalui kementerian terkait sebagai perwakilan pemerintah pusat. Sedangkan untuk koordinasi horizontal adalah koordinasi yang terdiri dari beberapa lapisan.

On the top level was the trio of key regional partners: the assembly, the regional development agency and the regional office of the government, all institutions who could have some degree of veto over any regional plan then on the second level was the close working between the inner circle made up of assembly members and steering group members from local authorities. All these bodies employed professional planners, and kept a continuous eye on the development of regional strategies (Glasson dan Marshall, 2007:49).

Pada koordinasi horizontal ini, semua pihak di daerah tersebut yang memiliki keterkaitan dengan konten dari rencana yang disusun dapat berperan

dalam prosesnya. Lebih lanjut jika di Inggris koordinasi yang terjalin di pemerintahan daerahnya adalah sebagai berikut:

A. Vertical			
Central	Central government departments and agencies – all with different powers, agendas and interests	Government Offices for the Regions and Regional Development Agencies – both part central, part regional bodies	Pressure groups for business, environment etc. In England mainly nationally organised, but have local particularities and life in some cases (e.g. CBI, CPRE, Chambers of Commerce, TCPA, House Builders Federation)
Regional	Regional assemblies and Greater London Authority/Mayor of London		
Local	Local authorities		

B. Horizontal			
Regional	Core tripartite in regions	Inner circle of interests (policy community)	Outer circle of interests
	Government Offices for the Regions, Regional Development Agencies, regional assemblies and GLA	Business and environmental interest groups in assemblies and acting independently	Smaller associations, businesses and individuals acting occasionally on particular issues of small areas of the regions

Gambar 2.1 Proses Perencanaan Regional Melalui Koordinasi Vertikal dan Horizontal di Inggris

Sumber: Glasson dan Marshall, *Regional Planning* 2007. hlm 49

Proses perencanaan regional melalui koordinasi vertikal dan horizontal, memberikan poin penting yaitu terkait dengan keikutsetaran pihak diluar pemerintahan. Partisipasi pihak diluar pemerintahan dianggap penting dalam memberikan masukan atas rencana daerah yang dibuat. Pentingnya peran dari berbagai pihak (selain pemerintah) juga didukung oleh pendapat Jones dan Allmendinger (dalam Glasson dan Marshall, 2007:30) yaitu *government requires the coordination and integration of a range of public and private bodies, and planning (at the regional and local level) has been given a primary role as the spatial expression of this co-regulatory environment.*

Pengertian dari perencanaan daerah yang telah disebutkan di atas memiliki beberapa poin penting seperti sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional, melibatkan aktor selain pemerintah, terdapat dominasi peran aktor yang berbeda disetiap rencana yang dibuat dan melalui melalui proses koordinasi horizontal dan vertikal. Pendapat dari beberapa ahli tersebut terkait dengan

perencanaan daerah secara sederhana dapat disimpulkan yaitu penyusunan rangkaian strategi, program dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan tujuan yang hendak di capai daerah tersebut dengan tetap mensinergiskannya dengan tujuan nasional dimana dalam proses pembuatannya melibatkan aktor lain selain pemerintah serta melalui proses koordinasi horizontal dan vertikal dan memiliki dominasi peran aktor yang berbeda di setiap rencana yang dibuat.

2.2.4 Minapolitan

Masalah eksploitasi ikan atau biasa disebut dengan overfishing, sudah lama terjadi. Dua hal utama yang menjadi permasalahan dalam penangkapan ikan adalah sumber daya di dunia yang terbatas dan akses terbuka terhadap sumber daya perikanan. Menurut Wilson, dkk (2006:4) *the open access of natural resources are caused by the lack of legally defined property rights to the resource, which leads Hardin to suggest that the commons has to be either controlled by government or transferred into private property*. Reformasi perikanan dan pengembangan budidaya menciptakan lingkungan yang menawarkan insentif yang baik terhadap lingkungan. Selain menyediakan makanan, pekerjaan, pendapatan, dan perdagangan, reformasi di sektor ini juga dapat membantu melestarikan nilai-nilai budaya dalam jangka panjang, mengurangi krisis kemanusiaan, dan membantu negara muncul dari konflik dan kemiskinan (USAID, 2013:3). Manajemen yang baik dapat membantu menghindari runtuhnya ekosistem perairan dan kelautan dunia dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Hampir semua negara memiliki hukum dan kebijakan yang mengandung tujuan luas terhadap sektor perikanan yang negara tersebut miliki. Pendekatan yang diambil untuk mengelola perikanan sebagian besar akan didorong oleh kebijakan dan hukum yang berlaku, dan juga akan dipengaruhi oleh konvensi internasional, dan tujuan global seperti MDG's, dan internasional dan regional perjanjian. Secara konvensional, pengelolaan perikanan biasanya hanya berusaha untuk memaksimalkan produksi dalam jangka panjang. Andrew dan Evans (dalam Pomeroy dan Andrew, 2011:18) menyebutkan:

“Most often this refers to fish catch, but it is sometimes phrased in terms of employment or other societal benefits, that is the fact that these objectives are

increasingly being adjusted to accomodate principles of democracy, human rights, decentralization, integration, empowerment, accountabillity and adaptability, among many others, is using authorities to rething their goals.”

Andrew dan Evans (dalam Pomeroy dan Andrew, 2011:18) memberikan pendekatan dalam mengelola perikanan yang sesuai untuk negara berkembang, pendekatan tersebut meliputi:

1. Pendekatan Ekosistem Untuk Pengelolaan Perikanan Dan Tata Pemerintahan
2. Pendekatan Berbasis Hak
3. Manajemen Untuk Ketahanan

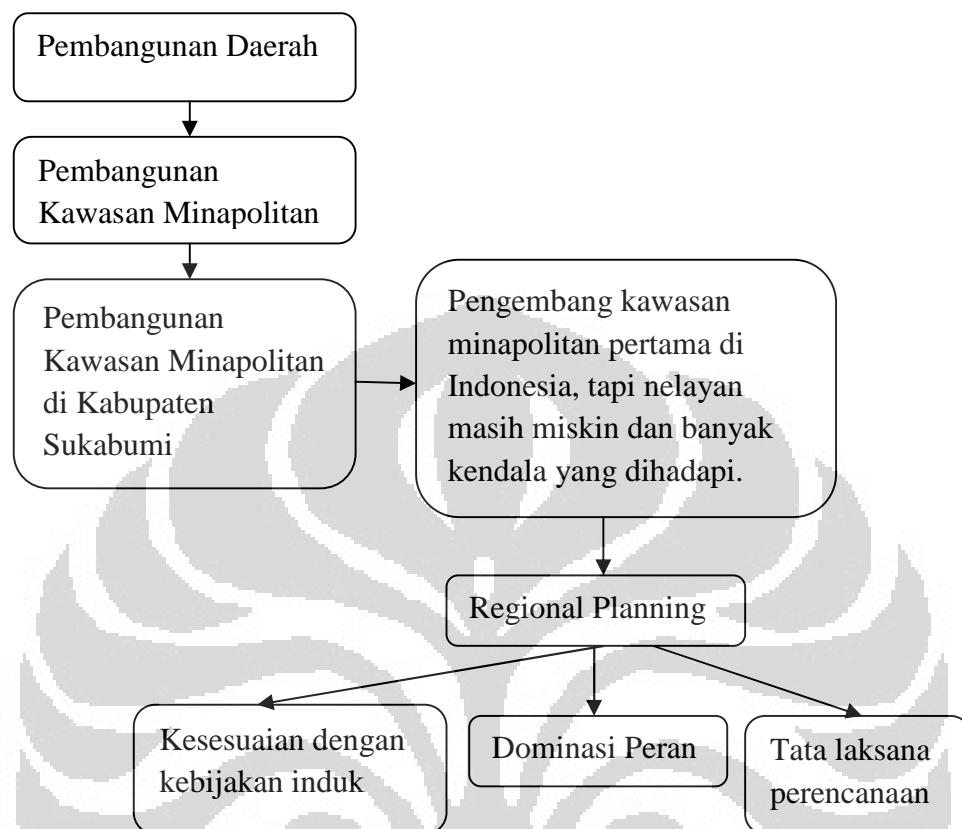
Manajemen perikanan yang dilakukan Indonesia adalah melalui program minapolitan. Program minapolitan merupakan salah satu program yang terdapat dalam kebijakan revolusi biru. Minapolitan diadaptasi dari konsep agropolitan, yang merupakan upaya meningkatkan dan mempercepat pembangunan di desa, melalui pelaksanaan pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan (Purnomo., et.al, 2011:7). Desa sebagai pemilik sumber daya alam, memanfaatkan asetnya tersebut untuk pembangunan. Konsep minapolitan merupakan salah satu konsep yang termasuk ke dalam pembangunan berkelanjutan, dimana di dalam konsep ini turut pula mengedepankan keberlangsungan ekosistem yang ada. Sebagai konsep pembangunan, minapolitan diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan di sektor kelautan dan perikanan. Konsep ini diimplementasikan pada berbagai tipologi kelautan dan perikanan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan perairan umum darat, maupun produk kelautan (Zulham dan Purnomo, 2010:4)

Secara konseptual, pengembangan kawasan minapolitan merupakan pendekatan pengembangan suatu kawasan perikanan di perdesaan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti sarana produksi, jasa distribusi dan pelayanan sosial ekonomi lain (Purnomo,dkk :2011:9). Kawasan minapolitan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang melalui komoditas unggulan daerah tersebut dan usaha agribisnis yang memiliki daya saing tinggi, sehingga ekonomi masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya alam dapat meningkat. Dengan optimalisasi potensi yang dimiliki daerah melalui pembangunan kawasan

minapolitan, pada akhirnya diharapkan adanya peningkatan daya saing baik dengan daerah lain di dalam negeri maupun dengan daerah lain di luar negeri. Salah satu target penting dalam penyelenggaraan minapolitan oleh pemerintah pusat adalah adanya pemerintahan di daerah yang mandiri dan otonom (Purnomo, dkk 2011:22). Lanjut Purnomo, dkk (2011:20) juga mengatakan bahwa elemen penting dalam minapolitan adalah keharusan untuk membangun keterkaitan antar wilayah dalam bentuk pergerakan barang, modal dan manusia. Adanya kerjasama antara desa-kota dalam membangun perekonomian masing-masing dalam bidang perikanan.

Implementasi minapolitan dapat dilihat dalam beberapa aspek. Menurut Purnomo, dkk (2011:46-71) minapolitan memiliki aspek generik. Pertama kelembagaan, hal ini terkait dengan kelembagaan finansial, pelaku usaha, input produksi, pemasaran, dan penyuluh perikanan. Kedua sumberdaya dan tata ruang, yang terdiri dari potensial sumberdaya lahan, sumberdaya air, komoditas unggulan, tata ruang dan *masterplan*. Ketiga kemasyarakatan dan bisnis, yang meliputi penguasaan teknologi, informasi pasar, pengetahuan pembudidaya dan diversifikasi produk. Aspek keempat adalah kebijakan dan governance mencakup, penentuan lokasi, *masterplan*, program kerja, kordinasi pusat daerah dan koordinasi antar institusi di daerah. Aspek terakhir adalah infrastruktur, yaitu fasilitas perikanan, saluran irigasi, jalan, listrik, sarana transportasi dan pasar. Keberadaan aspek ini penting dalam implementasinya untuk mencapai tujuan dari program minapolitan tersebut.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2015

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dengan objektif dalam penelitian. Pada bab tiga ini secara khusus dibahas terkait dengan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan-analisis data kualitatif, teknik analisis data, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berbicara mengenai bagaimana cara peneliti melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial, yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar ilmu sosial (Prasetyo, Jannah 2005:42). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena hanya ingin mengetahui gambaran dari pengembangan kawasan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini tidak bersifat mengukur, melainkan mengungkapkan realita sosial yang terjadi di lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dibagi berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan berdasarkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.1. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif, karena penelitian ini berusaha menggambarkan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi di dunia sosial. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk melihat obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010:9), sedangkan menurut Neuman (2007:16) penelitian deskriptif adalah penelitian yang secara detail menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang sedang terjadi.

3.2.2. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat

Penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, dimana penelitian ini tidak digunakan untuk mencoba menyelesaikan masalah seperti pada penelitian terapan,

dan hanya didasarkan oleh kepentingan peneliti saja. Penelitian ini dilakukan karena keinginan peneliti untuk mengetahui perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian murni terkadang digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan intelektual peneliti saja, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kepuasan pribadi peneliti, bukan untuk menyelesaikan proyek yang didanai oleh pihak sponsor dan sejenisnya.

3.2.3. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu penelitian ini tergolong dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu titik waktu tertentu dan hanya mengambil pendekatan satu kali dari fenomena sosial dalam satu periode waktu tersebut (Neuman, 2007:17). Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2015 sampai Juni 2015 dan berlokasi di sekitar Kabupaten Sukabumi. Penelitian tidak akan dilakukan lagi di waktu berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga tidak membandingkan hasil penelitian antar waktu.

3.2.4. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010:224), baik itu data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak yang terlibat dan mengetahui pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi.

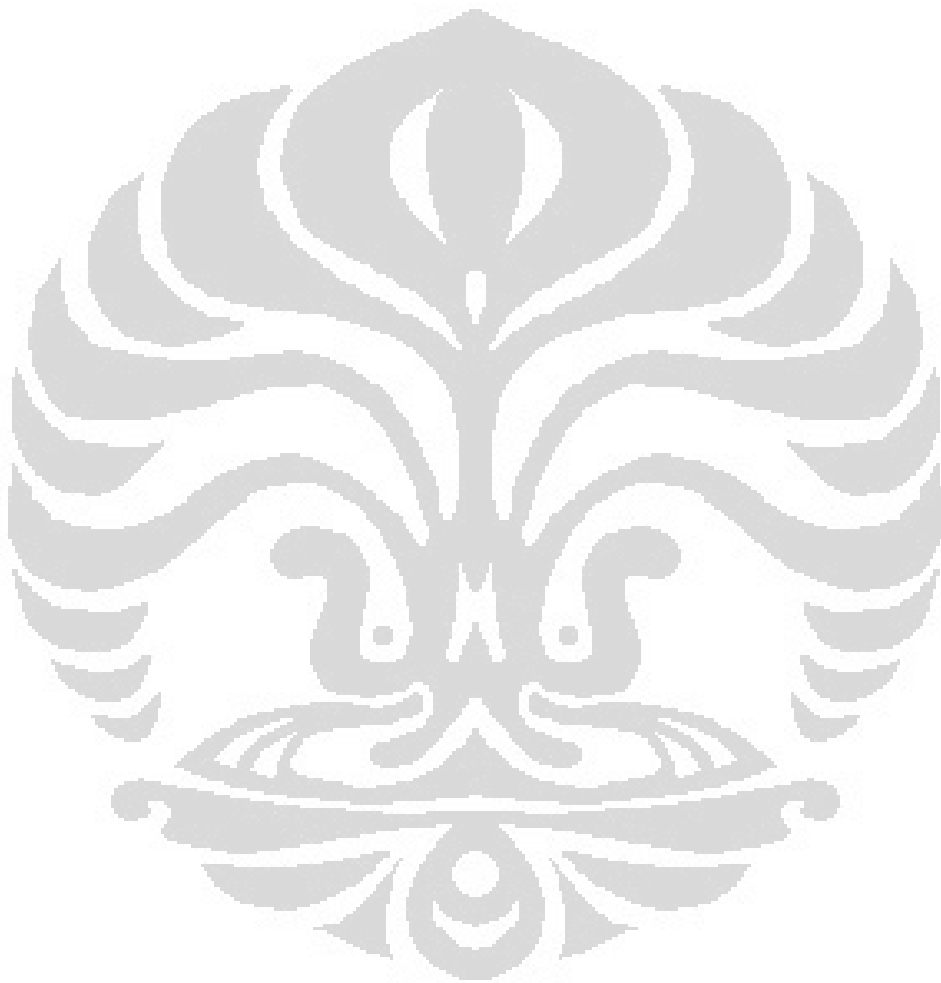
3.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui dua cara yakni:

3.3.1. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer yang digunakan sebagai sumber analisis penelitian. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada *key informant* dengan mempertimbangkan, lokasi, aktor, kejadian dan prosesnya. Dalam hal ini, informan yang akan diwawancarai terdiri dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Masyarakat nelayan Kabupaten Sukabumi dan Akademisi.



Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Keterangan
1	Titik Nurhandayani Staff Kelembagaan Usaha Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Untuk mengetahui pengembangan kawasan minapolitan basis perikanan tangkap
2	Chefy Yana Kepala Seksi pengembangan Ekonomi Primer Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi	Untuk mengetahui perencanaan dan koordinasi yang terjalin dengan Pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan minapolitan
3	Tedi Koswara Kepala Seksi Pengembangan Kepelabuhanan dan Pendaratan Ikan/Penata tk. I. III/d Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi	Untuk mengetahui pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi dan kendala-kendala yang dihadapi, serta mengetahui kerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah yang terjalin selama ini
4	Ayom Prabowo Kepala Bidang P2HP Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi	Untuk Mengetahui pengembangan kawasan minapolitan dan pengelolaan serta pemasaran yang ada di kawasan minapolitan
5	Said Ketua KUB di Kecamatan Surade	Untuk mengetahui kondisi dan kehidupan nelayan selama pengembangan kawasan minapolitan.
6	Masyarakat Nelayan 1	Untuk mengetahui kondisi dan kehidupan nelayan selama pengembangan kawasan minapolitan.
8	Ernan Rustiadi Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)	Untuk mengetahui perencanaan dalam pengembangan wilayah, khususnya wilayah yang mengandalkan potensi sumber daya alamnya untuk pembangunan
9	Iwan Sefriana Staf Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat	Untuk mengetahui peran dari pemerintah provinsi dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan dan untuk mengetahui pendapat terkait kewenangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Sumber: Olahan Peneliti, 2015

3.3.2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini didapatkan melalui studi dokumentasi seperti melalui laporan dan dokumen pemerintah terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi, buku, jurnal, karya ilmiah atas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Studi dokumentasi dapat memperkuat informasi yang didapatkan melalui studi lapangan.

3.4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam memilih informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dipilih karena peneliti ingin memperoleh informasi yang mendalam dari informan yang diyakini mengetahui secara baik pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dilihat dari tujuan analisis, maka dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif adalah menganalisis berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial itu (Bungin, 2007:153). Peneliti memilih untuk menggunakan metode analisis data kualitatif naratif. Menurut Neuman (2007:578) analisis naratif banyak digunakan dalam ilmu antropologi, arkeologi, sejarah, linguistik, kritik sastra, ilmu politik, psikologi dan sosiologi, dalam menganalisis, peneliti mengurutkan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi mulai dari perencanaan pengembangan kawasan hingga kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi melihat masih banyak nelayan yang miskin.

3.6. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan penelitian yaitu hanya menggambarkan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi.

3.7 Proses Penelitian

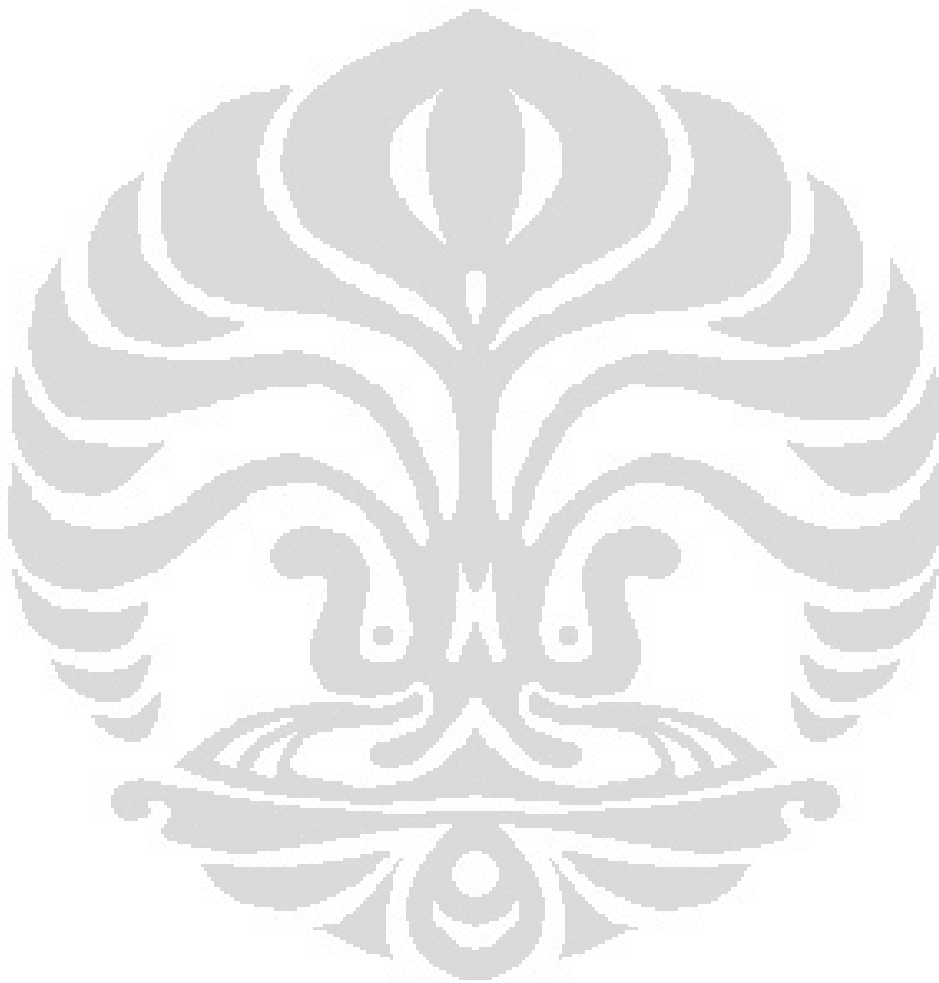
Terdapat tujuh tahap yang harus dilakukan dalam proses penelitian (Neuman, 2003:16) yaitu penentuan topik, penentuan fokus permasalahan/pertanyaan penelitian, menentukan bagaimana penelitian dilakukan, pengumpulan data lapangan, analisis data, interpretasi data, menuliskan hasil analisis dalam laporan penelitian. Pada penelitian ini proses yang dilakukan peneliti pertama adalah menentukan topik penelitian yaitu minapolitan ikan hias di Kabupaten Bogor, selanjutnya ditentukan permasalahan penelitian yaitu implementasi program minapolitan ikan hias di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan daya saing ekspor. Pada tahap ketiga ditentukan rencana penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ketiga tahap tersebut merupakan rancangan penelitian yang selanjutnya diuji pada sidang proposal penelitian, setelah proposal penelitian tersebut disetujui dengan beberapa revisi didalamnya diputuskan untuk mengganti fokus permasalahan dan site penelitian. Fokus permasalahan diubah menjadi perencanaan daerah dengan site penelitian di Kabupaten Sukabumi, maka judul penelitian secara keseluruhan menjadi perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi. pada tahap berikutnya, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam fokus penelitian dan studi kepustakaan. Setelah data-data yang diperlukan tersebut diperoleh di lapangan, maka tahap berikutnya yakni melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut sekaligus melakukan interpretasi terhadap data untuk selanjutnya diltuliskan dalam laporan penelitian.

3.7. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Tidak dapat melakukan wawancara dan meminta data kepada pihak swasta (investor dan perbankan) dan LSM, untuk mengatasi hal tersebut peneliti meminta data sekunder terkait dengan bantuan pinjaman modal yang dilakukan perbankan dan melakukan wawancara kepada masyarakat.

2. Banyak data yang diberikan tidak *update*. Melakukan wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan data update, walaupun tidak dapat didukung dengan data sekunder.



BAB 4

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup profil daerah, kondisi perikanan dan kelautan dan juga kondisi penduduk setempat.

4.1 Profil Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi merupakan daerah kabupaten yang berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, dengan ibukota di Palabuhanratu. Secara geografis Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6° 57' - 7° 25' Lintang Selatan dan 106° 49' - 107° 00' Bujur Timur. Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah sekitar 4.128 km² atau sekitar 3,01% dari luas wilayah Pulau Jawa. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kabupaten Sukabumi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

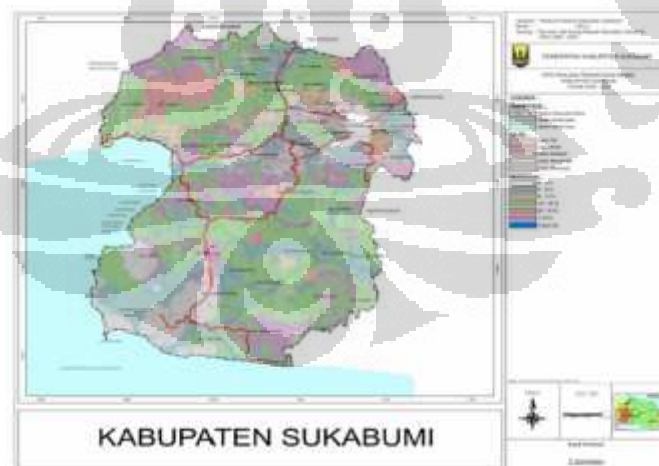


Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukabumi

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, 2014

Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (enclave) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunungguruh di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebonpedes di sebelah Timur.

Bentuk topografi dari wilayah Kabupaten Sukabumi umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah selatan dan bergunung di daerah utara. Daerah pesisir pantai dengan ketinggian 0-25 m seluas 10.455,45 ha meliputi 10 kecamatan di Sukabumi Selatan. Kecamatan tersebut adalah Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, Tegalbuled, Cidolog, Palabuhanratu, Simpenan, Cisolok dan Cikakak. Dan sebagai zona inti dari pengembangan kawasan minapolitan, kondisi geologi Palabuhanratu secara fisiografi wilayah pesisir Palabuhanratu merupakan dataran pantai yang berada pada muara sungai Cimandiri, Cimaja, Cisolok, Citiis dan lain-lain serta di kelilingi oleh Gunung Butak, Cabe, Gado Habibi dan Handeuleum. Lahan di daerah lorong perbukitan ditutupi oleh hutan-hutan perkebunan dan lahan pertanian



Gambar 4.2 Peta Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sukabumi

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, 2014

Kabupaten Sukabumi pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.408.417 jiwa, dimana penduduk terbanyak adalah laki-laki. Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal di

Indonesia. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Sukabumi berangsur membaik, walaupun kini masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi kemiskinan masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar 4.3 Grafik Statistik Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Hingga Tahun 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2014

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi memiliki potensi pada sektor pertanian baik itu di wilayah utara (wilayah pegunungan) maupun di wilayah selatan (wilayah pantai). Terdapat sembilan kecamatan yang terletak di wilayah persisir yang dapat dijadikan pariwisata dan dapat dikembangkan menjadi kawasan aktivitas nelayan dan kemaritiman. Perekonomian kabupaten Sukabumi fokus kepada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya terkait dengan agropolitannya. Lanjut berdasarkan kebijakan pengembangan sektoral RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2007-2017 untuk sektor ekonomi dikembangkan sebagai berikut ini:

- Mengembangkan kegiatan ekonomi (agrobisnis, pariwisata, kelautan, pertambangan, industri manufaktur dan jasa) yang berbasis SDM Lokal dengan sistem ekonomi kerakyatan serta menghindari terjadinya struktur pasar yang bersifat monopoli
- Memperkuat keterkaitan usaha untuk memantapkan struktur ekonomi

- Meningkatkan keseimbangan Sumber Daya Ekonomi (SDM, teknologi, dan sarana prasarana)
- Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka memperluas cakupan dan kualitas pelayanan umum.
- Meningkatkan iklim investasi yang kondusif antara pengusaha masyarakat dan pemerintah dalam menjunjung kegiatan perdagangan dan jasa
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja
- Meningkatkan pendapatan kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan

4.2 Perikanan Kabupaten Sukabumi

Sektor perikanan Kabupaten Sukabumi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Sukabumi karena terdapat sembilan kecamatan yang menjadi kecamatan wilayah pesisir. Kabupaten Sukabumi juga memiliki pelabuhan yang terletak di ibukota dan merupakan pelabuhan perikanan nusantara yang telah ditetapkan menjadi pelabuhan perikanan samudera. Karakteristik potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Sukabumi yang diharapkan dapat mendukung program minapolitan antara lain:

- a. Panjang garis pantai sekitar 117 Km, umumnya berupa kawasan pesisir yang terjal dengan garis pantai yang curam dan kondisi alamnya relatif lestari
- b. Dari sembilan (9) kecamatan pesisir, enam (6) kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan perairan teluk yang ditinjau dari aspek ekologis memiliki nilai lebih untuk usaha perikanan
- c. Berhubungan langsung dengan ZEE Indonesia yang masih under exploited sehingga usaha perikanan tangkap terbuka untuk

dikembangkan, juga potensi perairan laut dalamnya, belum dimanfaatkan secara optimal.

- d. Sumber Daya Ikan (SDI) relatif melimpah, dengan komoditas unggulannya berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, seperti tuna, cakalang, jangilus, tongkol, layur, kerapu, kakap dan lobster.
- e. SDM nelayan Palabuhanratu memiliki keterampilan lebih dalam hal menangkap ikan tuna (kualitas ekspor), walaupun usaha perikanannya tergolong tradisional
- f. Sejak dulu Palabuhanratu dikenal sebagai penghasil pindang ikan sehingga menjadi komoditas unggulan, juga abon ikan Cisolok, sudah dikenal di banyak daerah di luar Kabupaten Sukabumi.
- g. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu sebagai kawasan inti minapolitan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, apalagi jika menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera, maka perannya sangat menentukan. Adapun keberadaan PPI/TPI (8 unit), sesuai fungsinya dapat menjadi pendukung kawasan minapolitan Palabuhanratu
- h. Pantai Pangumbahan Kecamatan Ciracap ditetapkan sebagai kawasan konservasi penyu yang sedang dikembangkan menjadi kawasan ekowisata berbasis konservasi

Perikanan tangkap hanya berada di kecamatan-kecamatan yang berada di sepanjang pesisir Kabupaten Sukabumi. Hal ini terlihat dari rumah tangga perikanan tangkap di kecamatan-kecamatan tersebut. Jumlah terbesar terdapat di kecamatan palabuhanratu, karena kecamatan ini berbatasan langsung dengan Laut Selatan Jawa dan memiliki sarana pelabuhan tangkap ikan nusantara (yang kini menjadi pelabuhan samudera). Berikut merupakan jumlah kapal di setiap kecamatan pesisir Kabupaten Sukabumi

Tabel 4.1 Jumlah Kapal Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2013

No	PPI	Dengan Motor Tempel	Kapal Motor							Jumlah RTP per PPI
			<5	5-10	10-20	20-30	30-50	50-100	100-200	
1	Pelabuhanratu	478	438	188	13	134	25	68	19	1363
2	Cibangbang	75	99	4	-	-	-	-	-	178
3	Cisolok	256	4	-	-	-	-	-	-	260
4	Minajaya	40	-	-	-	-	-	-	-	40
5	Ciwaru	24	116	-	-	-	-	-	-	140
6	Ujunggenteng	45	452	12	-	-	-	-	-	509
Jumlah Total PPI		918	1.109	204	13	134	25	68	19	2490

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2014

Tabel 4.2 Jumlah Kapal Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

No	PPI	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel <5	Kapal Motor						Jumlah RTP per PPI
				5-10	10-20	20-30	30-50	50-100	100-200	
1	Pelabuhanratu	243	697	27	13	44	2	-	-	1.026
2	Cibangbang	26	113	-	-	-	-	-	-	139
3	Cisolok	-	250	-	-	-	-	-	-	250
4	Minajaya	10	168	-	-	-	-	-	-	178
5	Ciwaru	-	66	-	-	-	-	-	-	66
6	Ujunggenteng	15	302	14	-	-	-	-	-	331
Jumlah Total PPI										1990

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2015

Kapal terbanyak terdapat di Kecamatan Palabuhanratu karena merupakan pusat dari kegiatan perikanan dan kelautan di Kabupaten Sukabumi. Palabuhanratu juga merupakan zona inti dari pengembangan kawasan minapolitan.

Sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor andalan bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi. tidak hanya sebagai sektor andalan pariwisata tetapi juga sebagai ladang matapenahanan para nelayan. Banyak masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai nelayan. Berikut merupakan jumlah nelayan yang berada di Kabupaten Sukabumi:

Tabel 4.3 Jumlah Nelayan Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

No	Pangkalan Pendaratan Ikan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan Utama	Nelayan Sambilan Tambahan	Jumlah
1	Pelabuhanratu	5.512	751	131	6.394
2	Cibangbang	300	20	8	328
3	Cisolok	460	123	60	643
4	Minajaya	277	30	20	327
5	Ciwaru	611	125	64	800
6	Ujunggenteng	877	273	200	1.350
Jumlah Total PPI		8.037	1.322	483	9.842

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, 2015

Secara administrasi wilayah kawasan pendukung minapolitan merupakan kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Sukabumi, yaitu Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Pelabuhanratu, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Ciemas, Kecamatan Ciracap, Kecamatan Surade, Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Tegalbuleud. Wilayah minapolitan berada di wilayah pembangunan Palabuhanratu yang diarahkan sebagai pusat koleksi dan distribusi sektor perkembangan (perikanan tangkap, industri perikanan, pemasaran produksi perikanan dengan adanya TPI, pariwisata, PPS dan pemerintahan). Selain itu, di kawasan pendukung minapolitan terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategi provinsi dan kawasan strategi kabupaten.

a. Kawasan Strategi Provinsi (KSP)

KSP yang dberada di kawasan pendukung minapolitan di Kabupaten Sukabumi memiliki kepentingan ekonomi, yaitu berada di bagian selatan Kabupaten Sukabumi.

Tabel 4.4 Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Sukabumi

No	Penangan an	Kawasa n Strategis Provinsi	Kriteria	Isu Penanganan
1	Ekonomi	KSP Sukabumi bagian selatan	Kawasan yang diprioritaskan pengembangannya untuk mengurangi ketimpangan perekonomian Jawa Barat	Mengembangkan kawasan agromarine bisnis dan wisata minat khusus Menjaga kelestarian lingkungan pantai Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

KSK yang ditetapkan di kawasan pendukung minapolitan terdiri dari KSK yang berkepentingan dalam sektor ekonomi dan KSK yang berkaitan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan.

KSK yang fokus pada kepentingan ekonomi

- KSK perkotaan Palabuhanratu
- KSK ekowisata Pesisir Cisolok-Ciomas

KSK yang fokus pada kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

- KSK ekowisata Ujunggenteng
- KSK rehabilitasi Lingkungan Pesisir Surade-Tegalbuleud

Tabel 4.5 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Sukabumi

No	Penangan	Kawasan Strategis Kabupaten	Kriteria	Isu Penanganan
1	Ekonomi	KSK perkotaan Palabuhanratu	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten dan sekaligus sebagai PKNp dan PKW - Kawasan yang diprioritaskan dapat mendorong perekonomian Jawa Barat bagian selatan, khususnya di bidang perikanan melalui Pengembangan Kawasan Minapolitan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan citra kawasan sebagai pusat pemerintahan, PKNp dan PKW - Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan - Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan
2	Ekonomi	KSK Ekowisata Pesisir Cislok-Ciemas	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan yang diprioritaskan dapat mendorong perekonomian wilayah Kab. Sukabumi Selatan - Kawasan yang potensial 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kawasan berbasis ekowisata (wisata ramah lingkungan) - Mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat khusus - Memanfaatkan dan

			menimbulkan masalah bersifat fisik lingkungan dan kebencanaan	<p>mengolah hasil pertanian sebagai bahan baku industri dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi kawasan - Penataan lingkungan sekitar
3	Lingkungan Hidup	KSK Ekowisata Ujunggenteng	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan citra kawasan sebagai kawasan suaka penyu dan wisata pantai - mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat khusus - revitalisasi kawasan - penataan lingkungan sekitar - peningkatan aksesibilitas menuju kawasan minapolitan
4	Lingkungan Hidup	KSK Rehabilitasi lingkungan pesisir Surade – Tegalbuleud	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan perekonomian andalan Sukabumi Selatan, tetapi potensial menimbulkan masalah fisik lingkungan dan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Rahabilitasi/ revitalisasi kawasan hutan mangrove - Pengembangan/ peningkatan kegiatan ekonomi pesisir

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011

Kondisi kecamatan yang merupakan kecamatan pendukung terhadap pengembangan kawasan minapolitan adalah sebagai berikut

1. Kecamatan Cisolok

Luas kecamatan cisolok adalah sekitar 16.058 ha yang terdiri dari 11 desa. Secara geografis kecamatan ini berada dibagian barat laut Kabupaten Sukabumi dengan morfologi sebagianbesar merupakan lautan/pesisir, daratan dan perbukitan sampai dengan pegunungan. Desa-desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Cisolok adalah Desa Cisolok, Desa Cikahuripan, Desa Karangpapak, Desa Cikelat, Desa Gunung Keramat, Desa Gunung Tanjung, Desa Cicadas, Desa Sirnaresmi, Desa Caringin dan Desa Sukarame.

Kecamatan ini merupakan sub wilayah pengembangan kawasan minapolitan Palabuhanratu. Wilayah ini dikembangkan kearah pertumbuhan daerah wisata, produsen tanaman pangan, kopra serta cengkeh dan juga menjadi pusat pembenihan udang seta perdagangan dari hasil tangkapan laut.

2. Kecamatan Cikakak

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 13.154 ha dengan jumlah penduduk sekitar 37.400 jiwa. Secara geografis kecamatan ini terletak di wilayah barat laut Kabupaten Sukabumi yang memiliki kondisi morfologi sebagian besar merupakan lautan/pesisir, daratan dan perbukitan sampai pada pegunungan. Desa yang termasuk kedalam kecamatan ini adalah Desa Cikakak, Desa Cimaja, Desa Sukamaju, Desa Cileungsing, Desa Ridogalih, Desa Margalaksana, Desa Sirnarasa dan Desa Gandasoli.

3. Kecamatan Palabuhanratu

Kecamatan ini merupakan ibukota dari Kabupaten Sukabumi yang memiliki luas wilayah sekitar 10.459 ha dengan jumlah penduduknya sekitar 96.675 jiwa. Kecamatan ini terdiri dari delapan desa, yaitu desa Citarik, Desa Palabuhanratu, Desa Citepus, Desa Cibodas, Desa Buniwangi, Desa Ciakdu, Desa Pasirsuren dan Desa Tonjong.

4. Kecamatan Simpenan

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 17.360 ha dan dengan jumlah penduduk sekitar 48.281 jiwa. Secara geografis, kecamatan ini berada di

bagian barat Kabupaten Sukabumi, dengan kondisi morfologi sebagian besar merupakan lautan/pesisir dan daratan. Desa yang termasuk kedalam kecamatan ini adalah Desa Cihaur, Desa Kertajaya, Desa Loji, Desa Cidadap, Desa Cibuntu dan Desa Mekarasih.

5. Kecamatan Ciemas

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 26.966 ha dan memiliki jumlah penduduk sekitar 48.081 jiwa. Secara geografis, kecamatan ini berada di bagian barat daya Kabupaten Sukabumi dengan kondisi morfologi sebagian besar merupakan lautan /pesisir dan daratan. Desa pesisir yang termasuk kedalam kecamatan ini adalah Desa Ciwaru, Desa Mandrajaya, Desa Girimukti, dan Desa Cibenda.

6. Kecamatan Ciracap

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 16,056,1 ha dan memiliki jumlah penduduk sekitar 47.495 jiwa. Desa pesisir yang termasuk kedalam desa ini adalah Desa Gunung Batu, Desa Purwasedar, dan Desa Cikakung dengan panjang pantai Kecamatan Ciracap sekitar 18 km. Potensi perairan pantai Kecamatan ini adalah banyak mengandung sumberdaya-sumberdaya kelautan dengan sebaran terumbu karang yang menghampa di wilayah perairan Ciracap dari berbagai macam jenis dan karakteristik wilayah perairan.

7. Kecamatan Surade

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 14.064 ha dengan jumlah penduduk sekitar 72.013 jiwa. Kecamatan ini terdiri dari Desa Pasiripis, Desa Cipeundeuy, Desa Gunungsuging, Desa Citangelar, Desa Jagamukti, Desa Surade, Desa Kadaleman, Desa Wanasari, Desa Sirnasari dan Desa Sukatani.

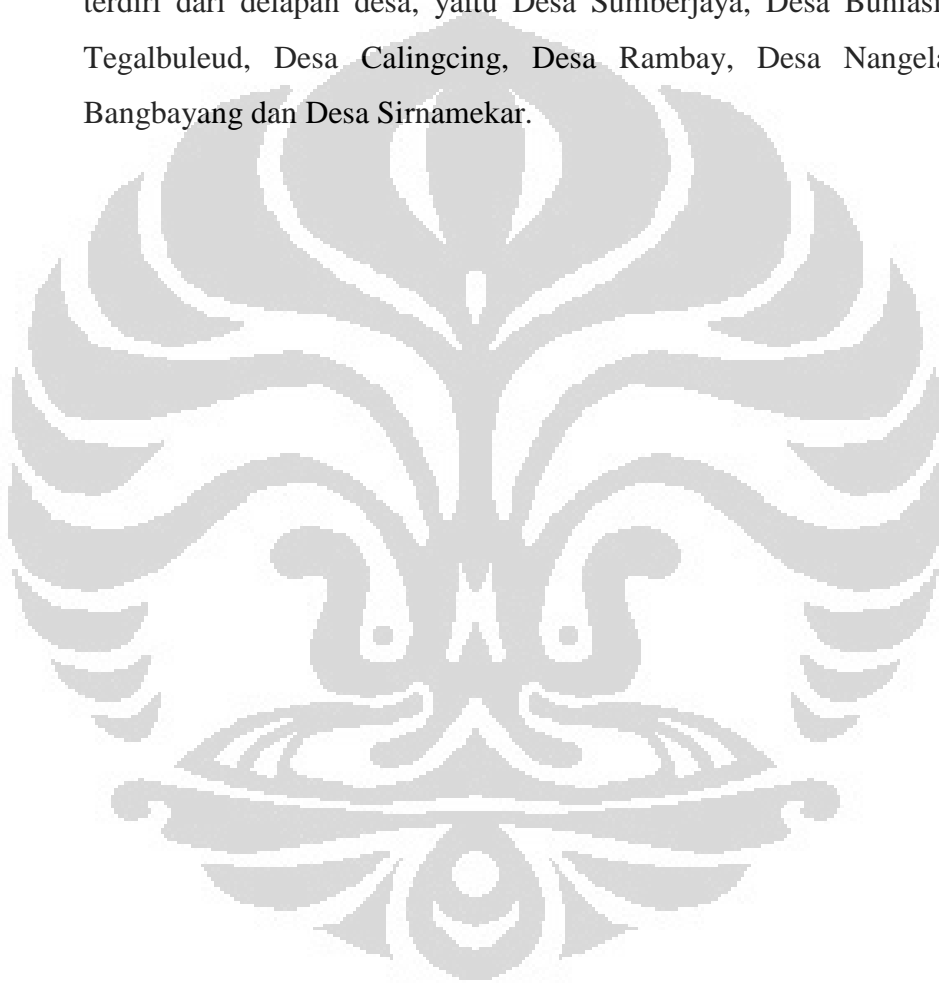
8. Kecamatan Cibitung

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 7.585 ha dan memiliki jumlah penduduk sekitar 25.088 jiwa. Secara geografis, kecamatan ini terletak dibagian selatan Kabupaten Sukabumi dengan kondisi morfologi sebagian besar lautan/pesisir dan daratan. Desa yang termasuk kedalam

kecamatan ini adalah Desa Cidahu, Desa Cibitung, Desa Banyuwangi, Desa Cibodas, Desa Banyumurni, dan Desa Telagamurni.

9. Kecamatan Tegalbuleud

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 13.544 ha dan memiliki jumlah penduduk sekitar 35.031 jiwa. Secara geografis kecamatan ini terletak di bagian selatan Kabupaten Sukabumi. Dan memiliki kondisi morfologi sebagian besar adalah lautan/pesisir dan daratan. Kecamatan ini terdiri dari delapan desa, yaitu Desa Sumberjaya, Desa Buniasih, Desa Tegalbuleud, Desa Calingcing, Desa Rambay, Desa Nangela, Desa Bangbayang dan Desa Sirnamekar.



BAB 5

ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Pada bab analisis ini akan dibahas mengenai perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi. Fokus pembahasan pada perencanaan pengembangan kawasan minapolitan dengan melihat dokumen-dokumen perencanaan terkait dan bentuk tata laksana perencanaan dengan melihat koordinasi vertikal dan horizontal yang terjalin dalam proses perencanaan. Pada bab ini juga dibahas mengenai pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan dan kendala yang dihadapi.

5.1 Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

5.1.1 Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi ditetapkan pada tahun 2010 dan baru dilaksanakan pengembangannya pada tahun 2011. Pada awal penetapannya, karena tidak memiliki dokumen perencanaan, sebagai salah satu syarat maka pemerintah kabupaten sukabumi harus membuat dokumen perencanaan yang tertuang dalam *masterplan*. *Masterplan* tersebut baru selesai pada tahun 2012, dimana pada tahun setelah penetapan Pemerintah Kabupaten Sukabumi membuat roadmap sebagai dokumen perencanaan sementara karena *masterplan* yang belum selesai dibuat. Hal ini seperti pendapat Bapak Ayom, yaitu:

“iya jadi kabupaten sukabumi itukan ditetapkan pada tahun 2010, karena memerlukan dokumen perencanaan dalam mengembangkan kawasan minapolitan, jadi kita membuat roadmapnya dulu, setelah itu tahun 2012 kan selesai nah kita sosialisasikan deh ke masing-masing OPD. Biar nanti masterplan menjadi rujukan mereka dalam buat program gitu.”
(Wawancara dengan Bapak Ayom, tanggal 8 Juni 2015)

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan pendapat dari Bapak Yana selaku perwakilan dari Bappeda sebagai berikut ini:

“roadmap itu dibuat pas awal karena kita belum ada masterplan, setelah ada masterplannya itu buat pedoman untuk membuat roadmap tahunan dan lima tahunannya. Masterplan itu udah pakem, engga bisa diubah atau dibuat ulang, tapi kita yang jalanin itu pada dasarnya hanya menggunakannya sebagai pedoman aja.” (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Dalam mengembangkan kawasan minapolitan, perencanaan secara menyeluruh dituangkan ke dalam *masterplan*, sedangkan untuk roadmap hanya untuk perencanaan kegiatan tahunan dan lima tahunan saja. Rancangan roadmap dibuat oleh masing-masing OPD yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi untuk dikoordinasikan dengan semua rancangan roadmap minapolitan OPD dan menjadi satu kesatuan roadmap minapolitan tahunan yang sah.

Menurut Bapak Yana, *masterplan* pengembangan kawasan minapolitan dalam penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 pasal 58 ayat 2 huruf b Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yaitu “Wilayah Pengembangan Kabupaten Sukabumi diarahkan pada agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan jasa yang mendukung fungsi PKW Pelabuhanratu dan simpul wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap ...”. Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan RTRW Provinsi Jawa Barat karena didalam RTRW Provinsi Jawa, Kabupaten Sukabumi diatur menjadi wilayah pengembang agribisnis dan perikanan tangkap. Dimana minapolitan masih merupakan bagian dari konsep agribisnis.

Terkait kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Sukabumi terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 pada pasal 90 huruf e Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 terdapat kawasan peruntukan perikanan minapolitan. Dan terkait dengan penetapan wilayah pengembangan kawasan minapolitan, dimana ditetapkan zona inti dan zona pendukung yang masing-masing terletak di Kecamatan Pelabuhanratu dan Kecamatan yang berada di wilayah pesisir lainnya juga telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak Yana, yaitu:

“Untuk itu sih kita kan semua disesuaikan lagi sama RTRWnya aja. Dan kenapa di Pelabuhanratu itu sih kan ya kalo disana emang udah ada pelabuhan ya dan disana juga yaa aktivitas nelayannya banyak. Yaudah tanpa banyak pertimbangan lain kita pilih sana aja sebagai zona inti.”
(Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Selanjutnya penetapan pengembangan kawasan minapolitan terkait dengan zonasi dalam RTRW dapat dilihat pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 pasal 95 ayat 2 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032, dimana sesuai dengan fokus pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Sukabumi yaitu pada perikanan tangkap kawasan inti ditetapkan di Kecamatan Pelabuhanratu dan kawasan penyangga yang ditetapkan pada Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, Tegalbuleud dan Bantargadung. Namun hingga saat ini kecamatan yang menjadi kawasan inti dan kawasan penyangga hanya terdiri dari sembilan kecamatan saja dan Kecamatan Bantargadung belum menjadi kawasan penyangga atau zona pendukung. Hal tersebut karena belum adanya sarana dan prasarana sebagai zona pendukung yang sesuai.

Pada dasarnya zonasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kondisi lapangan, dimana pengembangan kawasan minapolitan yang berada di Kabupaten Sukabumi memiliki zona inti di Kecamatan Pelabuhanratu dan zona pendukung di kecamatan pesisir. Pengembangan juga dilakukan dari hulu ke hilir dan disesuaikan dengan model pengembangan

kawasan minapolitan ideal berdasarkan pedoman pengembangan kawasan minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan terdiri dari zona inti dan zona pendukung dengan fokus pengembangan yang mengarah kepada industrialisasi.

“Minapolitan ditiap daerah itu fokusnya beda-beda tapi kalo untuk di Sukabumi itu udah kita arahin untuk industrialisasi.” (Wawancara dengan Bu Titik, tanggal 19 Mei 2015)

“Hmmm kalo pengembangannya fokus kita dari kementerian itu ya industrialisasi minapolitannya.” (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

Terkait dengan model pengembangannya seperti yang dijelaskan sebelumnya sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukabumi dibagi menjadi dua zona yaitu zona inti dan zona pendukung, berikut penjelasannya:

1. Zona Inti

Zona inti adalah berupa pelabuhan perikanan, pelabuhan pangkalan bagi usaha perikanan tangkap dan sentra nelayan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu staff dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

“kalo zona inti tuh cirinya ada pelabuhan perikanannya sama sentra nelayan terus disana itu dilengkapi sama fasilitas-fasilitas pokok, fasilitas fungsional sama pununjang. Disana aktifitasnya juga rame banyak nelayannya, tempat pendaratan gitu-gitu. Jadi tuh disana bisa dibilang sebagai inti dari kegiatan nelayan.” (Wawancara dengan Bu Titik, tanggal 19 Mei 2015)



Gambar 5.1 Zona Inti Minapolitan Kabupaten Sukabumi

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013

Memiliki pelabuhan perikanan merupakan salah satu ciri dari zona inti. Pelabuhan perikanan yang terletak di zona inti Kabupaten Sukabumi adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu (PPNP) yang diupayakan untuk menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Hal tersebut salah satunya karena arah dari pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi adalah industrialisasi yang membutuhkan PPS dalam menunjang kegiatan industrialisasi. Peran PPS sebagai penunjang atas pengembangan minapolitan, karena PPS merupakan pelabuhan kelas A yang dapat melayani kegiatan perikanan hingga laut lepas dengan fasilitas yang lengkap dan yang paling utama disini adalah kemampuan untuk melakukan ekspor sehingga hasil laut yang telah didaratkan dapat langsung di ekspor tanpa harus didistribusikan terlebih dahulu ke Jakarta. Pembangunan PPS tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat.

2. Zona pendukung

Zona pendukung adalah zona yang berada diluar dari zona inti yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha perikanan berbasis dan berintegritas dengan usaha perikanan tangkap berdasarkan RTRW. Menurut Bu Titik zonasi dalam pengembangan kawasan minapolitan yang utama untuk dilakukan pembangunan adalah zonasi inti dan

zonasi pendukung, karena disana harus dibangun infrastruktur seperti TPI, pendaratan ikan, dan lain-lain.

Zona pendukung atau zona pengembangan merupakan wilayah yang lebih difungsikan untuk pengembangan usaha berbasis usaha perikanan tangkap. Pengembangan tersebut ditujukan untuk mendukung usaha seperti adanya industri perikanan maupun kegiatan dari pemasarannya. Di zona pendukung menurut Bu Titik dicirikan dengan adanya usaha-usaha pengolahan dari kelompok masyarakat dan sarana pemasaran. Di zona tersebut juga terdapat TPI dan PPI seperti halnya yang terdapat di zona inti. Berikut merupakan gambar dari salah satu kegiatan yang berlangsung di zona pendukung



Gambar 5.2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Zona Pendukung Minapolitan

Sumber: Dokumen Peneliti, 2015

“Kalo zona pendukung sih ya fungsinya untuk dukung zona inti aja. Kalo ditanya perbedaannya itu apa yang ada di zona pendukung sebenarnya ada juga di zona inti, tetapi yang ada di zona inti belum tentu ada di zona pendukung, seperti contohnya pelabuhan perikanan. Kalo di zona pendukung ada pangkalan pendaratan ikan aja yang biasanya difungsikan juga untuk pelelangan, pendaratan ikan kan engga selalu harus di pelabuhanratu. Terus kalo di zona pendukung itu ada semacam usaha-usaha pengolahannya juga. Kalo di Sukabumi sini ya di Ciselok zona pendukungnya. Tapi bukan berarti di kecamatan lain tidak ada usaha-usaha pengolahan ikan, ada juga PPI/TPI di kecamatan Ciracap, Ciemas, Surade sama

Simpenan. Zona pendukung juga untuk pencatatan, perhitungan berapa pendapatan nelayan, volume produksi nelayan, nilai dari produksi ikan yang ditangkap” (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Sukabumi yang terdapat dalam *masterplan* ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut terlihat dalam *masterplan* terdapat rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara tol Jakarta – Bogor – Ciawi dan Pelabuhanratu, namun dalam RTRW Kabupaten tidak terdapat rencana pembangunan jalan tol tersebut. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat juga hanya terdapat rencana pembangunan jalan poros barat di jalur Pelabuhanratu – Cikidang – Cibadak – Bogor – Depok – Jakarta. Hal ini mungkin saja yang menyebabkan salah satunya pembangunan jalan tol tersebut belum selesai bahkan belum dimulai pembangunannya. Padahal pembangunan jalan tol tersebut penting, mengingat aksesibilitas merupakan permasalahan bagi pengembangan kawasan minapolitan terkait dengan pemasaran.

Terkait dengan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 43 Tahun 2014 pasal 11 ayat 3 tentang *masterplan* minapolitan kabupaten Sukabumi, terdapat pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagai kawasan inti minapolitan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan kelas PPNP menjadi PPS pada dasarnya telah direncanakan lama seperti yang dikatakan oleh mantan Kabid Perikanan Tangkap Diskanlut Kabupaten Sukabumi Abdul Kodir yaitu saat ini pemerintah sudah berencana meningkatkan status pelabuhan perikanan Pelabuhanratu, dari PPN menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), setara dengan Pelabuhan Muara Baru Jakarta (trobos.com, 2008). Namun adanya sengketa lahan antara Pertamina dengan warga sekitar Pelabuhanratu menjadi salah satu kendala sehingga peningkatan tersebut belum selesai hingga saat ini. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA), sengketa tersebut telah dimenangkan oleh Pertamina sebagai pemilik yang sah, Pertamina juga sepakat

untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat setempat namun kesepakatan tersebut menurut Bapak Yana baru dapat diselesaikan baru-baru ini. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa adanya relokasi tempat tinggal masyarakat tersebut ke lokasi lain.

Peningkatan kelas PPNP menjadi PPS yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi No 63 Tahun 2014 Tentang *Masterplan* Minapolitan Kabupaten Sukabumi juga terdapat dalam RTRW Kabupaten Sukabumi walaupun tidak dijelaskan secara jelas, tetapi pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 pada pasal 8 ayat 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 yaitu “Pusat Kegiatan Nasional-provinsi Pelabuhanratu menjadi kawasan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pelabuhanratu memang sedang dikembangkan peningkatan statusnya menjadi PPS. Sedangkan kesesuaiannya dengan RTRW Provinsi Jawa Barat terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 pasal 58 ayat 3 (b) nomor 2 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yaitu “peningkatan kapasitas pelabuhan laut perikanan samudera di Pelabuhanratu”. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan status PPNP menjadi PPS memang telah direncanakan lama baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Sehingga apabila dilihat perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi sudah diatur dalam RTRW Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi dan terkait dengan peningkatan status PPNP menjadi PPS juga sudah ditetapkan pada RTRW Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi walaupun pada kenyataannya dilapangan pemerintah masih harus melakukan pembebasan lahan yang telah ditempati oleh masyarakat setempat selama bertahun-tahun (sebelum terbitnya perda RTRW Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi) dan adanya sengketa antara Pertamina dengan masyarakat setempat juga menjadi kendala sehingga sampai saat ini peningkatan status tersebut masih belum selesai.

Selanjutnya terkait dengan perencanaannya dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sama hal nya dengan yang terdapat dalam RTRW Provinsi Jawa Barat pengembangan kawasan minapolitan disampaikan secara

implisit. Dimana dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, pantai selatan yang merupakan kawasan Kabupaten Sukabumi dijadikan daerah untuk mengembangkan bisnis kelautan Jawa Barat yang diarahkan pada pertumbuhan dan pengawasan perikanan komersial. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan, meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan dan berkembangnya usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir. Sasaran tersebut sesuai dengan tujuan yang dari pengembangan kawasan minapolitan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Terkait kesesuaiannya dengan pembangunan daerah, perencanaan pengembangan kawasan minapolitan yang tertuang dalam *masterplan* juga disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010-2015. Dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2010-2015 terdapat pada kebijakan peningkatan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan misi dari RPJMD Kabupaten Sukabumi 2010-2015 untuk urusan kelautan dan perikanan dan urusan pertanian. Hal tersebut masing-masing dilakukan melalui program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan program peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Kedua program tersebut pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik melalui pengembangan kawasan minapolitan, misalnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan nelayan yang dilakukan dengan meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat nelayan. Peningkatan jumlah produksi dan nilai produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari sebelum diadakannya pengembangan kawasan minapolitan. Meningkatkan jumlah produksi perikanan bagi para nelayan ini juga merupakan salah satu tujuan minapolitan-ada kesesuaian antara sasaran program dan tujuan minapolitan-, dimana dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan diharapkan nelayan dapat lebih sejahtera. Dengan komoditas unggulan berupa

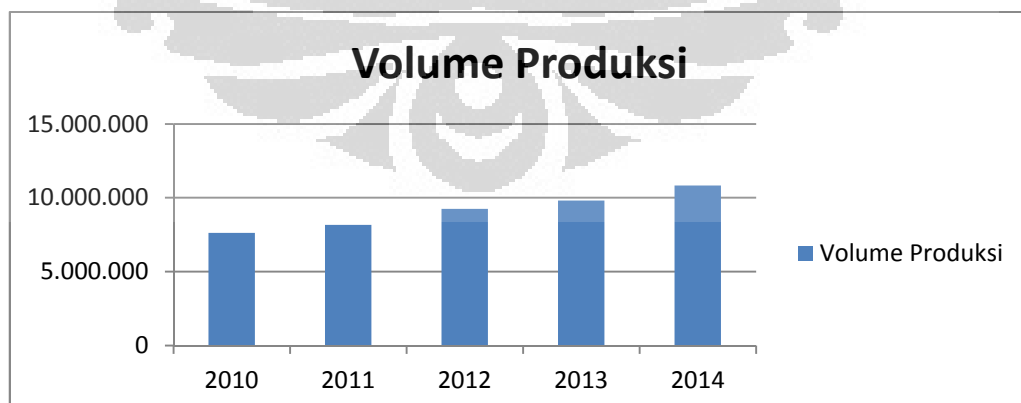
ikan tuna, cakalang, tongkol dan layur, jumlah produksi dan nilai produksi semakin meningkat setelah Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengembangkan kawasan minapolitan, terlebih komoditas unggulan tersebut merupakan komoditas ekspor andalan. Berikut merupakan jumlah dan nilai produksi ikan Kabupaten Sukabumi:

Tabel 5.1 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

No	Jenis Ikan	Volume Produksi	Nilai Produksi
1	Cakalang	282,281	3,914,757,500
2	Tuna	6,934,726	2,250,883,609,000
3	Tongkol	457,597	4,618,466,500
4	Layur	278,846	4,352,714,000
Jumlah		7,953,450	2,263,769,547,000

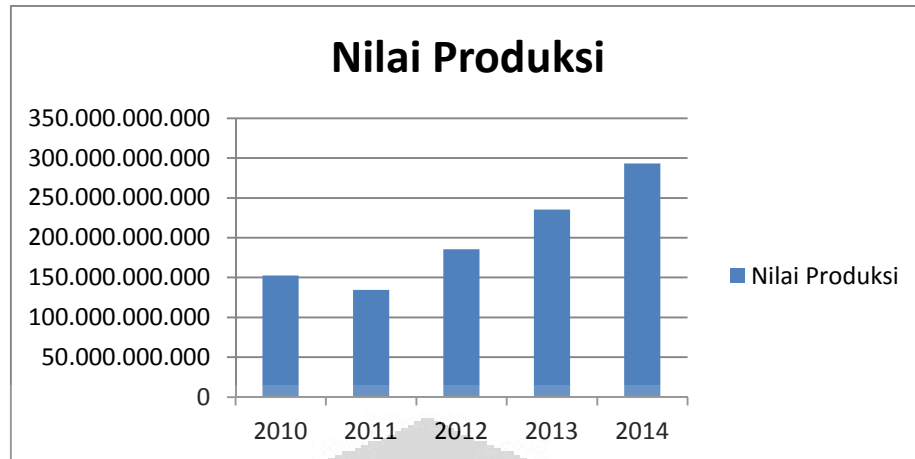
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2015.

Volume dan nilai produksi perikanan laut di Kabupaten Sukabumi di dominasi oleh empat jenis ikan seperti yang tertera pada tabel di atas. Kabupaten Sukabumi juga memproduksi jenis ikan lain, seperti kakap, bawal, dan lain-lain. Volume dan nilai produksi juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya, hal ini tidak terlepas dari bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengembangkan kawasan minapolitan. Berikut merupakan grafik kenaikan nilai dan volume produksi dari tahun 2010-2014



Gambar 5.3 Grafik Volume Produksi Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2014

Sumber: Olahan Peneliti, 2015



Gambar 5.4 Grafik Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2014

Sumber: Olahan Peneliti, 2015

Kedua grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan baik dari segi jumlah produksi maupun nilai produksi perikanan di setiap tahunnya setelah ditetapkan Kabupaten Sukabumi sebagai pengembang kawasan minapolitan. Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi pemerintah mendukung melalui pemberian bantuan berupa alat tangkap, kapal dan lain-lain.

“Jadi kalau bantuan sih biasanya kita bantu dengan alat tangkap, kapal gitu. Kita juga bantu engga sembarangan bantu, kita bantu kepada kelompok nelayan yang emang rajin. Misalnya kita liat administrasinya, programnya, keuangannya, kekompakkannya, pembukuannya nanti kita nilai, jadi mereka punya nilai. Kita juga harus tau kebutuhan mereka supaya kita bisa menyesuaikannya.” (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

“Pernah sih neng sekali waktu itu dapet kapal, tapi sekarang-sekarang udah ga pernah lagi.” (Wawancara dengan Bapak Said, tanggal 8 Juni 2015)

Bantuan yang pemerintah berikan kepada masyarakat nelayan memang tidak diberikan secara cuma-cuma. Harus ada kedisiplinan dari nelayan itu sendiri dalam menjalani profesinya. Hal tersebut penting karena untuk melihat bentuk keseriusan dan komitmen dari masyarakat dalam membantu mengembangkan kawasan minapolitan. Kedisiplinan tersebut misalnya dalam pembukuan yang

dilakukan terkait dengan jumlah ikan yang ditangkap, keseriusan dalam menangkap ikan yang seringkali membutuhkan waktu lama dan mengorbankan waktu bersama keluarga, dan lain-lain. Bantuan diberikan kepada kelompok nelayan dan tidak perseorangan, biasanya bantuan diberikan kepada perwakilan kelompok yaitu ketua dari kelompok tersebut. Bantuan kapal tidak hanya diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten saja, namun juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berikut merupakan daftar penerima bantuan kapal pada tahun 2014:

Tabel 5.2 Daftar Penerima Bantuan Kapal Tahun 2014

No	Nama Kelompok	Alamat	Ketua	Keterangan
1	KUB Perkasa	Palabuharatu	Ade Suryana	Kapal Inkamina < 30 GT
2	KUB Sumako	Surade	Warsono	Kapal Inkamina < 30 GT
3	KUB Kurawa	Palabuharatu	Dede Ola	Kapal Inkamina < 30 GT
4	KUB Super	Cisolok	Supendi	Kapal Inkamina < 30 GT
5	Manik Jaya	Palabuharatu	Iman	Kapal 10 GT

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, 2015

Data dari penerima bantuan kapal pada tahun 2014 di atas memang tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 bantuan diberikan kepada enam kelompok nelayan, tahun 2012 bantuan diberikan kepada 21 kelompok nelayan dan pada tahun 2013 bantuan diberikan kepada tujuh kelompok nelayan (Terlampir 1). Setiap tahunnya pemerintah daerah selalu memberikan kapal namun tidak dapat memberikan bantuan kapal terlalu banyak, hal tersebut karena biaya kapal yang mahal terlebih bantuan yang diberikan tidak selalu kapal tetapi juga bantuan lain seperti alat kapal yang juga memerlukan biaya tidak murah. *“Tiap tahun kami rutin kok kasih bantuan, tapi ya gitu terbatas. Tahun lalu kita kasih kapal 30 GT, itu harganya bisa 1 miliar lebih.”* (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal).

Selanjutnya terkait dengan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat nelayan, dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan, fasilitas sarana dan prasarana, pengembangan pasar dan lain-lain. Pembinaan dan pelatihan tersebut

terlihat pada pengembangan kawasan minapolitan yang mengarah kepada industrialisasi di Kabupaten Sukabumi yang melibatkan masyarakat dalam hal kemandirian usaha. Masyarakat diberdayakan untuk mengolah ikan sehingga menambah nilai pada produk yang didagangkan. Pengolahan ikan menjadi produk makanan, ada yang skala kecil dan besar. Didukung oleh pemerintah daerah dan swasta, masyarakat dibantu untuk dapat mandiri dan lebih kreatif sehingga tidak selalu memperdagangkan ikan hasil tangkapan saja. Bantuan pemerintah dalam mendukung kegiatan usaha pengolahan ikan untuk masyarakat nelayan seperti bantuan peralatan pengolahan ikan pindang 1 paket, bimbingan teknis pengolahan ikan pindang, peningkatan mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan lain-lain (Terlampir 2).



Gambar 5.5 Pengolahan Ikan Menjadi Ikan Pindang, Bakso Ikan Dan Abon Ikan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Dokumentasi Peneliti, 2015

**Tabel 5.3 Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Sukabumi
Tahun 2014**

No	Jenis Olahan	Jumlah Pengolah (UPI)	Lokasi Pengolahan	Produksi (Ton)
1	Bakso Ikan	75	Palabuhanratu, Cisolok, Ciemas, Simpenan, Ciracap, Surade	1.080
2	Pindang Ikan	1300	Bantargadung, Palabuhanratu, Ciemas, Surade, Simpenan	3.900
3	Ikan Asin	75	Palabuhanratu, Cisolok, Ciemas, Simpenan, Ciracap, Surade	950,0
4	Abon Ikan	3	Cisolok, Palabuhanratu	11
5	Dendeng Nila	2	Sukaraja, Cisaat	1
6	berbagai Olahan Belut	1	Sukaraja	6
7	berbagai Olahan Nila	1	Sukaraja	1
8	Layur Beku	5	Palabuhanratu	0
9	Sidat asap	1	Palabuhanratu	0
10	Baby Fish	2	Palabuhanratu	2
11	Fish Jelly	2	Nyalindung, Sukaraja	225
12	Olahan Rumput laut	4	Simpenan, Ciracap	1
13	Kerupuk Kulit Ikan	4	Cisolok, Palabuhanratu	0,5
14	Minyak Hati Ikan	1	Palabuhanratu	0,5
15	Terasi udang	10	Palabuhanratu, Cisolok, Ciemas.	1

Jumlah	1486		6.179
--------	------	--	-------

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2015 (data sementara)

Walaupun demikian, masih ada pula masyarakat yang tidak turut serta dalam melakukan pengolahan makanan karena menganggap bahwa menjual ikan lebih cepat jika dibandingkan harus mengolahnya terlebih dahulu. Menjual produk olahan ikan juga memerlukan biaya tambahan seperti keperluan untuk memberli alat-alat pengolahan dan biaya operasional lainnya, sedangkan untuk menjual ikan tanpa olahan dapat langsung mendapatkan uang tanpa harus menunggu lama dan mengolahnya terlebih dahulu. Hal tersebutlah yang membuat beberapa masyarakat tidak tertarik untuk menjual produk ikan olahan. *“ngapain pake diolah segala, emangnya ga makan biaya lagi. Selama masih bisa dijual mah ya di jual aja. Yang penting bisa dapet duit.”* (Wawancara dengan Said, 06 Mei 2015)

Memfasilitasi para nelayan dilakukan dengan meingkatkan sarana dan prasarana pendukung seperti mendirikan pasar, TPI/PPI dan lain-lain yang didirikan di zona inti dan pendukung sesuai dengan RTRW Kab.Sukabumi. Apabila melihat skala pemasarannya menurut informan dari Bappeda, Palabuhanratu merupakan wilayah pemasaran yang paling maju dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal tersebut karena Palabuhanratu merupakan zona inti yang memiliki kegiatan perikanan paling sibuk diantara kecamatan lainnya.

“Pemasarannya dari TPI ada yang langsung kita kirim ke Jakarta untuk selanjutnya dieskpor, karena kita sebenarnya belum bisa untuk melakukan kegiatan ekspor tersebut. Karena disini belum ada sarana prasarana pendukung untuk ekspor. Kalo selain ekspor wajibnya langsung ke pelelangan, jadi ada yang mendarat di daerah lain. Pokoknya nanti intinya ikan yang telah didaratkan, akan di data di TPI setempat karena nanti disana juga ada penanggungjawabnya. Jadi semuanya didata ikan yang mendarat dan dilelang.” (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh masyarakat nelayan, yaitu

“Yah kalo untuk dijual mah harus langsung ke pelelangan. Tapi juga ada yang saya konsumsi sendiri. Kita kan ke laut barengan sama temen-teman juga jadi ya hasilnya dibagi-bagi.” (Wawancara dengan Said, tanggal 06 Mei 2015)

Dukungan pemerintah dalam hal pemasaran perikanan ditunjukkan dengan memberikan bantuan-bantuan seperti membuat pasar di daerah TPI. Mendirikan pasar tersebut guna untuk mempermudah kegiatan jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Pembangunan pasar tersebut menurut BAPPEDA sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mengembangkan kawasan minapolitan dari sisi pemasarannya. Berikut ini merupakan salah satu pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Ciwaru



Gambar 5.6 Pasar Ikan Ciwaru di kawasan TPI Ciwaru

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2014

Peningkatan kesejahteraan nelayan yang menjadi tujuan utama dari pembangunan kawasan minapolitan juga dapat dilihat salah satunya melalui indikator pendapatan perkapita dari para nelayan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi pendapatan para nelayan meningkat setiap tahunnya, terhitung dari tahun 2010 saat penetapan hingga tahun 2014 (data ter-update).

Tabel 5.4 Pendapatan Nelayan Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

		Nilai	Pendapatan Nelayan/Tahun	Pendapatan Nelayan/Bulan
Nelayan	9842	293,250,360,819	29,795,809.88	2,482,984.16
RTP	1504	293,250,360,819	194,980,293.10	16,248,357,76

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2015

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Bapak Tedi yang mengatakan bahwa minapolitan telah memberikan dampak positif salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan yang kini menjadi kurang lebih 1,8 juta perbulan. Namun, apabila melihat kondisi di lapangan, tempat tinggal para nelayan masih ada yang terbuat dari anyaman bambu dan terlihat tidak layak, hal tersebut tentu kontras dengan pendapat dari Bapak Tedi tersebut. Bahkan menurut informan nelayan itu tidak ada yang sejahtera. *“Yah belum atuh neng, nelayan mana ada sih yang sejahtera. Pendapatan aja kecil, terus buat sekolah mana mampu kita, dari pada buat sekolah mendingan buat makan”* (Wawancara dengan Said, tanggal 06 Mei 2015).

**Gambar 5.7 Rumah Nelayan di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015

Pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi tidak hanya fokus pada kegiatan perikanan dan kelautannya saja tetapi juga pada kegiatan lain yang mendukung kawasan minapolitan secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan seperti distribusi listrik bagi masyarakat, perbaikan rumah, pembangunan jalan dan operasi trayek angkutan umum, mitigasi bencana alam, pendidikan wajib sembilan tahun bagi masyarakat nelayan dan keluarga,

pembangunan pariwisata, dan lain-lain yang kegiatannya memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2015 juga tertera adanya pengembangan kawasan ke arah agrobisnis dan agropolitan dan juga adanya pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Dimana pembangunan tersebut mendukung adanya pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Sukabumi yang mengarah pada industrialisasi. Agropolitan dan agrobisnis bisa dikatakan merupakan konsep induk dari adanya kawasan minapolitan, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Bapak Ernan yaitu

“Istilah yang umumnya agropolitan. Tapi ketika Kementerian Kelautan Perikanan ingin menyelenggarakan program yang sama, supaya tidak dianggap tumpang tindih dengan kementerian Pertanian dan Kementerian PU, mereka buat nomenkelatur sendiri minapolitan. Jadi ya eh minapolitan kan masih pertanian sebenarnya, dalam arti luaskan perikanan masih termasuk pertanian sehingga untuk agropolitan yang basisnya perikanan dan kelautan maka digunakanlah istilah minapolitan. Itu asal mulanya, jadi sebenarnya konsepnya harusnya sama.” (Wawancara dengan Bapak Ernan, tanggal 20 Mei 2015)

Pembangunan agropolitan dan agrobisnis di Kabupaten Sukabumi juga mencakup didalamnya pembangunan minapolitan. Sedangkan untuk pembangunan PPN menjadi PPS merupakan perencanaan yang dibuat untuk mendukung adanya pengembangan kawasan minapolitan yang memiliki fokus kepada industrialisasi. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi. Kesesuaian tersebut juga terlihat pada *masterplan* kawasan minapolitan Kabupaten Sukabumi yang memang dalam pembuatannya didasari oleh RPJMD Provinsi dan Kabupaten.

Masterplan merupakan pedoman bagi daerah untuk mengembangkan kawasan minapolitan yang berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan daerah

untuk mengembangkan kawasan minapolitan. Dokumen perencanaan tersebut berisikan tentang identifikasi kondisi daerah mengenai potensi perikanan, kelautan, gambaran mengenai daerah seperti kondisi geografis, demografis, dan terkait dengan strategi pengembangan kawasan yang meliputi sektor sumber daya alam, infrastruktur, daya tarik komoditas dan kapasitas. Dengan menyesuaikannya kepada dokumen perencanaan lain yaitu RJMD dan RTRW Provinsi dan Kabupaten diharapkan pedoman pengembangan kawasan minapolitan ini dapat sesuai dengan pembangunan daerah dan fungsi ruang wilayah. Terdapat kesesuaian antar dokumen perencanaan, yaitu antara *masterplan*, RPJMD Provinsi dan Kabupaten, dan RTRW Provinsi dan Kabupaten. Permasalahan seperti belum terealisasinya peningkatan status PPNP menjadi PPS lebih karena tersendatnya pembebasan lahan yang dipicu adanya sengketa lahan antara Pertamina dengan masyarakat.

5.1.2 Bentuk dan Tata Laksana Perencanaan

Masterplan dibuat dengan melibatkan banyak pihak didalamnya, seperti pemerintahan, swasta dan masyarakat. *Masterplan* itu sendiri merupakan bentuk kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan pihak swasta ataupun akademisi. Untuk Kabupaten Sukabumi *masterplan* merupakan hasil kerjasama dengan PT Belaputera Interplan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Yana, yaitu “*hmmm kalo untuk masterplan itu sebenarnya dengan pihak ketiga. Mereka itu ahli dalam perencanaan jadi ya kita kerjasama gitu. Kita itu kerjasama sama hmmm sama ini nih PT Belaputera Interplan gitu neng*”. (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015). Kerjasama ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi yang diberikan oleh pihak selain dari pemerintah.

Jika dilihat, berdasarkan dominasi dalam proses perencanaan yang dikembangkan oleh Djunaedi, kerjasama yang terjalin dalam membuat *masterplan* adalah *rational comprehensive planning*. Hal tersebut karena pemerintah memberikan kewenangan bagi perencana ahli dalam membuat *masterplan* dan dominasi peran yang ada dalam prosesnya adalah perencana ahli. Selain itu dalam *masterplan* tidak hanya disajikan perencanaan fisik saja namun juga terkait

perencanaan wilayah lainnya, maka penting untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya.

Terkait dengan koordinasi yang terjalin secara horizontal maupun vertikal, koordinasi yang terjalin dengan kementerian merupakan salah satu bentuk koordinasi vertikal antara pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Pusat. Dalam perencanaannya koordinasi yang terjalin adalah terkait dengan pemenuhan syarat dalam penetapan kawasan pengembang minapolitan dan lokasi-lokasi yang menjadi zona inti dan zona pendukung.

“Kalo untuk koordinasi sih sebenarnya berjalan baik ya. Pas kita baru-baru mau ngembangin kawasan minapolitan tuh kita banyak jalin koordinasi sama mereka, kayak terkait persyaratan dokumen, penetapan kawasan mana nih yang mau dijadiin zonaaa intii gitu hmm terus sama zona pendukung, gitu. HmMMM sama kalo kayak gitukan kalo sama Kementerian Kelautan kaloo sama yang lain gitu hmm yaa banyaak ya. Hmm kayak misalnya sama emmm kementerian PU gitu.. hmMM itu tuh terkait sama rencana kita bangun jalan biar lebih baik gitu, teruss yaa hmm macem-macem lagi deh neng, hmm yaaa intinya pokoknya tuh ya koordinasinya lancar apa yang kita rencanakan kalo emang berdasar ya disetujui gitu.” (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Melihat pernyataan tersebut, pemerintah pusat memiliki peran dalam pembuatan *masterplan* minapolitan Kabupaten Sukabumi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi terkait perencanaan pengembangan kawasan minapolitan bersama beberapa pihak lain seperti perwakilan dari Pemerintah Provinsi. Menurut Bapak Ayom selaku Kepala Bidang P2HP Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, pada awal penetapan sebagai daerah pengembang kawasan minapolitan dilakukan diskusi dengan beberapa pihak perwakilan dari kabupaten, provinsi dan pusat di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas *masterplan* tersebut.

“Untuk perencanaannya tuh kita pas awal ditetapin itu kan disuruh ke Ditjen Perikanan Tangkap nah pas disana itu ada Bupati, perwakilan

dewan, sekda, kepala dinas perikanan kabupaten dan provinsi itu melakukan koordinasi terkait perencanaan pengembangan kawasan minapolitan, nah yang selanjutnya dalam diskusi itu juga dibahas mengenai masterplannya, gitu. Tapi bukan kita yang buat, masterplannya tetap dibuat oleh tim konsultan tapi yaitu masih berdasarkan hasil dari diskusi yang awal kita lakukan bersama kementerian.” (Wawancara dengan Bapak Ayom, tanggal 8 Juni 2015)

Koordinasi yang terjalin dalam pengembangan kawasan minapolitan tidak hanya terjadi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, tetapi juga hampir dengan semua instansi pemerintahan. Koordinasi tersebut terkait dengan perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya dalam rangka mengembangkan kawasan mianpolitan. Instansi pemerintahan tersebut seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kemernterian Perhubungan, dan lain-lain. Terkait dengan penetapan PPNP menjadi PPS juga merupakan salah satu pembangunan yang melibatkan antara pusat dan daerah, karena PPS merupakan pelabuhan internasional dan bukan lagi taraf nasional, sehingga menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Pusat juga, terlebih kini setelah penetapan Undang-undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PPS menjadi kewenangan bagi Pemerintah Pusat.

“Iya pas awal memang harus koordninasi dengan kementerian kelautan semua bahas tentang rencana pengembangannya. koordinasinya ya kalo pas pertama-tama itu kan mereka daerah yang ditetapkan pertama kali yah, jadi kayak penetapan lokasi pengembang, terus pembangunan sapras nya, alokasi anggaran yang penting.” (Wawancara dengan Bu Titik, tanggal 19 Mei 2015)

Koodinasi vertikal dalam perencanaan tidak hanya terjalin dengan pemerintah pusat namun juga dengan pemerintah provinsi. Sama halnya koordinasi yang terjadi dengan pemerintah pusat, juga terjalin baik. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan pembuatan *masterplan* seperti yang telah dijabarkan di atas, melalui Dinas Periknaan dan Kelautan Provinisi Jawa Barat, diskusi untuk membahas perecanaan dalam *masterplan* supaya

pengembangan kawasan minapolitan dapat sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Selain membahas terkait dengan perencanaan dalam *masterplan*, koordinasi yang antara pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terkait dengan perencanaan dalam kegiatan tahunan seperti pembangunan-pembangunan lainnya misalnya terkait dengan program bantuan kapal, alat tangkap, dan lain-lain.

Menurut Bapak Iwan Sefriana selaku staf dari bidang perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, koordinasi terjalin baik dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan. Dalam pengembangannya menurut beliau juga tidak hanya terjalin dengan Dinas Perikanan dan Kelautan saja, tetapi juga dengan dinas lain yang langsung bekerjasama dengan Bappeda setempat.

“Kalo perencanaan kita langsung bekerjasama dengan pihak Beppeda langsung atau ya ke dinasnya. Biasanya sih kalo koordinasi gitu ya terkait itu aja sih pembangunan-pembangunannya atau engga ya terkait dengan apa aja yang program bantuan misalnya kayak pemberian kapal gitu aja.”
(Wawancara dengan Bapak Iwan, tanggal 4 Juni 2015)

Semua koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten dalam perencanaan tahunan terjalin ada yang melalui perantara Dinas Perikanan dan kelautan provinsi dengan dinas terkait, misalnya terkait dengan perencanaan pembangunan perumahan untuk para nelayan. Misalnya terkait dengan pembangunan perumahan untuk nelayan, koordinasi tersebut terjalin antara Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi. Awal koordinasi terjalin dengan Bappeda membahas perihal penetapan wilayah untuk pembangunan perumahan untuk para nelayan. Diskusi yang terjadi membahas desa di kawasan minapolitan yang paling membutuhkan pembangunan perumahan untuk para nelayan, dan pihak dari provinsi meminta rekomendasi dari Bappeda desa-desa mana saja yang menjadi prioritas untuk pembangunan perumahan nelayan.

Koordinasi tersebut juga tidak hanya melibatkan pihak dari pemerintah saja, namun juga pihak ketiga yaitu konsultan yang bekerjasama dengan pihak pemerintah provinsi. Namun, konsultan tersebut hanya sebagai pihak ketiga dan bukan sebagai pemeran utama dari pembangunan perumahan nelayan tersebut. Selanjutnya, koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat terkait dengan perencanaan misalnya adalah mengenai pemberian bantuan kepada nelayan. Pengembangan kawasan minapolitan tidak hanya mengandalkan anggaran dari Kabupaten saja, tetapi juga dari APBD Provinsi Jawa Barat. Seperti dalam merencanakan bantuan pemberian kapal kepada nelayan Kabupaten Sukabumi melalui program Bantuan Gubernur (BanGub).

Selanjutnya terkait koordinasi yang terjalin dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi, koordinasi dalam membuat *masterplan* melibatkan tidak hanya dinas perikanan dan kelautan saja tetapi juga dengan OPD yang merupakan bentuk koordinasi horizontal karena terjalin di satu *line* yaitu di Kabupaten Sukabumi. *Masterplan* yang merupakan pedoman bagi daerah untuk mengembangkan kawasan minapolitan ini melibatkan tidak hanya pemerintah aja tetapi juga masyarakat yang diwakilkan oleh ketua dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) di setiap kecamatan.

“kita kan juga libatin masyarakat, tapi engga semua masyarakat. Misalnya ya ketua KUB nya aja, gitu. Jadi kan di setiap kecamatan ada KUB, nah palingan kita minta satu ada dua perwakilan untuk datang bahas mengenai masterplan, rencana tahunan, gitu.” (Wawancara dengan Bapak Ayom, 8 Juni 2015)

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ketua KUB yang berada di Kecamatan Surade, yaitu *“Pas awal penetapan itu iya kita di libatkan, tapi hanya perwakilan aja. Kalo yang setiap tahunnya itu udah engga lagi, ga tau deh kenapa.” (Wawancara dengan Bapak Said, tanggal 8 Juni 2015)*

Namun sayangnya partisipasi masyarakat tersebut dinilai kurang karena hanya segelintir masyarakat saja yang diajak untuk berdiskusi. Perwakilan ketua KUB di setiap kecamatan persisir belum dapat merangkum semua aspirasi dari

masyarakat nelayan, terlebih banyak masyarakat nelayan yang statusnya buruh yang tidak memiliki akses untuk menyampaikan aspirasinya. Padahal apabila dilihat kondisi mereka jauh memprihatinkan dibandingkan dengan nelayan non buruh. Hal ini merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam proses perencanaan.

Koordinasi dalam membuat *masterplan* juga terjalin dengan pihak konsultan, konsultan ditunjuk sebagai pembuat *masterplan* pengembangan kawasan minapolitan. Dengan merujuk pada hasil diskusi yang terjalin dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan OPD kabupaten serta masyarakat. Tim konsultan merupakan tim ahli perencanaan yang tidak hanya merujuk pada hasil diskusi tetapi juga melakukan identifikasi potensi daerah dan kondisi daerah.

“Kita menggunakan konsultan tim perencana gitu karena memang harus dalam membuat masterplan minapolitan harus dari ahli perencanaan yang buat, tapi kita engga lepas tangan begitu aja, kita juga kan ada RPJMD, RTRW yang ga boleh diusik. Terus juga hasil diskusi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga kan menjadi hmm ibaratnya acuan juga, jadi ya hal-hal tersebut gitu kita koordinasikan dengan mereka sebagai tim konsultannya.” (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Perencanaan yang terjalin dengan hampir semua OPD Kabupaten dan Provinsi serta juga terjalin dengan hampir semua kementerian/lembaga. Program yang lahir dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan ini melibatkan hampir seluruh bidang karena memerlukan dukungan dari berbagai sektor untuk keberhasilan capaian pengembangan kawasan minapolitan yang diinginkan. Pengembangan kawasan minapolitan merupakan pembangunan yang memerlukan kerjasama diantara semua pihak dan melibatkan hampir semua OPD karena pengembangan ini melibatkan semua sektor seperti Dinas perhubungan terkait dengan transportasi untuk distribusi, Dinas PU terkait dengan jalur distribusi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pemasaran hasil tangkap di kawasan minapolitan, dan lain-lain. Selain itu juga pengembangan kawasan minapolitan memiliki *multiplier effect* sehingga hal ini tentu perlu melibatkan

banyak OPD dan tidak hanya Dinas Perikanan dan Kelautan saja. Dari kabupaten sendiri pengembangan kawasan minapolitan bekerjasama dengan hampir semua OPD yang berada di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak Tedi, yaitu

“Adalah. Kita kan kalo apa-apanya ya ga mungkin bisa sendiri, bisa melakukan semua-semuanya sendiri. Ya pasti ada kerjasama, hampir semua OPD disini terlibat dalam pengembangannya. Ada lebih kurang 32 OPD terlibat, misalnya PU, Pariwisata, kemudiaaaan.... pertanian, pokoknya hampir semua OPD terlibat. Termasuk nanti ada dari pihak swasta yah. Misalnya investor.” (Wawancara Dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

5.2 Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

5.2.1 Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

Pembangunan kawasan minapolitan melibatkan hampir semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), masyarakat dan swasta. Keterlibatan tersebut terlihat dalam partisipasinya untuk pembangunan terkait dengan kawasan minapolitan. Dalam melihat keterlibatan tersebut, peneliti akan melihatnya dari sektor lain yang juga menjadi bagian dari minapolitan. Hal tersebut karena kawasan minapolitan dikembangkan dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai sektor, seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sektor-sektor tersebut sebagai sektor penunjang bagi terselenggaranya pengembangan kawasan minapolitan. Berikut penjelasan dari beberapa sektor yang menunjang pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Sektor Bina Usaha

Bina usaha merupakan sektor yang menurut peneliti menjadi andalan bagi pengembangan kawasan minapolitan. Hal tersebut karena arah dari pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi yaitu industrialisasi. Kegiatan-kegiatan industri baik kecil maupun besar lantas

pasti ada di Kabupaten Sukabumi. Untuk mendukung kegiatan industri di Kabupaten Sukabumi, pemerintah dibantu dengan swasta dan masyarakat meningkatkannya melalui kegiatan usaha baik yang berbahan baku hasil tangkapan maupun tidak.

Pemerintah memberdayakan masyarakat setempat untuk mengembangkan diri dan berani berwirausaha dengan memanfaatkan hasil tangkapan dan kawasan minapolitan. Masyarakat dibekali pengetahuan dan dilatih untuk mengembangkan diri menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan hasil perikanan. Masyarakat dilatih untuk mengolah hasil tangkapan sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selain dari bentuk pelatihan yang diberikan, pemerintah melalui lembaga perbankan juga memberikan bantuan berupa kemudahan untuk mengakses pinjaman modal. Peran dari pemerintah sebenarnya hanya sebatas pada pemberi informasi kepada masyarakat atau dapat disebut pula “jembatan” antara pihak calon peminjam modal dan pemberi modal.

“Ya kalo untuk modal, sebenarnya kami susah juga ya. Karena kan sebenarnya pemerintah sudah ga boleh memberikan bantuan berupa uang, jadi kami hanya bisa bantu lewat kemudahan peminjaman modal ke bank aja. kita ngelakuin misalnya kayak sosialisasi gitu ke masyarakat. Ya ibaratnya kita hanya sebagai jembatan aja antara masyarakat dan bank gitu.” (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

Tabel 5.5 Bantuan Pinjaman Modal Oleh Perbankan

Tahun	Perbankan / Lembaga Ekonomi	Besaran Bantuan
2013	Kredit Nelayan/Pengusaha perikanan melalui Bank BRI, BTPN Syariah, BJB.	1.700.000.000
2014	Kredit Usaha Perikanan Tangkap, P2HP, dan Perikanan Budidaya	14.000.000.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2015

Data di atas merupakan realisasi pinjaman modal yang terjadi pada tahun 2013-2014. Besaran bantuan terlihat sangat jauh berbeda dan terlihat

adanya peningkatan yang tinggi. Hal tersebut memungkinkan adanya akses pinjaman yang lebih mudah dari tahun sebelumnya atau atau sudah lebih beraninya masyarakat untuk melakukan peminjaman kepada Bank.

Selain dari memberikan pembekalan pelatihan berupa pengolahan hasil tangkapan, masyarakat juga dilatih untuk terampil dalam membuat kerajinan lain seperti cenderamata. Hal tersebut terkait dengan Kabupaten Sukabumi yang terkenal dengan kawasan wisata perairannya. Sama halnya dengan kegiatan usaha pengolahan hasil tangkapan, kegiatan usaha ini juga dapat dipinjamkan modal dari Bank.



Gambar 5.8 Pemanfaatan Bantuan Motor Dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Serah Terima Bantuan Motor Kepada Kelompok Usaha dan Usaha Souvenir

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2013 dan Dokumentasi Peneliti, 2015

2. Sektor Pariwisata

Pariwisata Kabupaten Sukabumi memang sudah cukup terkenal di Indonesia, seperti Pelabuhanratu, Ujung Genteng, Sawarna dan lain.

Khusus untuk pariwisata di Pelabuhanratu, pengembangan kawasan minapolitan bisa saling menguntungkan satu sama lain.

Sektor kelautan dan perikanan yang menjadi dasar dari pengembangan kawasan minapolitan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkannya menjadi kawasan wisata. Daerah Kabupaten Sukabumi yang terkenal dengan wisata pantainya, dapat memanfaatkan dan menjadikan kawasan minapolitan sebagai daya tarik wisata tersendiri. Berikut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan wisata

Tabel 5.6 Pengembangan Kawasan Wisata Dalam Kegiatan Minapolitan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Sukabumi

No	Wisata Yang Dikembangkan	APBD 2013	APBD 2014
1	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Karanghawu	500.000.000	200.000.000
2	Pengembangan Kawasan Wisata Cipanas-Cisolok	700.000.000	
3	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Citepus	600.000.000	350.000.000
4	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Minajaya	1.000.000.000	250.000.000
Jumlah		2.800.000.000	800.000.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2015

Dengan mengembangkan kawasan wisata juga dapat menambah pendapatan bagi masyarakat pesisir khususnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat juga banyak yang diberdayakan untuk mengembangkan usaha baik hasil olahan ataupun tidak, dengan adanya wisata yang dikembangkan diharapkan pemasaran hasil dari usaha produk-produk tersebut dapat lebih menguntungkan karena adanya daya tarik wisata yang mendatangkan banyak wisatawan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Tedi bahwa wisata juga bisa menambahkan pendapatan bagi masyarakat.

“.... dari pariwisata gitu kan menunjang sarana gitu kan supaya lebih cantik sehingga menambah daya tarik untuk wisatawan gitu kan biar nanti bisa juga menambah masukan buat masyarakat pesisir yang masih dalam cakupan kawasan zona inti maupun zona pendukung. Kita kan kalau minapolitan kabupaten sukabumi itu sesuai dengan peraturan menterianya itu lebih ke arah industrialisasi khususnya untuk perikanan tangkap. Kalau pun ada didalamnya itu hanya efek aja, misalnya pariwisata, bisnis gitu. Nah dari sana kan masyarakat sekitarnya juga bisa manfaatin, untuk dagang oleh-oleh, bikin cenderamata gitu. Jadi yah itu juga salah satu efeknya yah dariii eeemm minapolitan. Jadi yah intinya kalau disini tuh lebih ke industrialisasinya aja, kalau untuk pariwisata gitu hanya pendukung.” (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

Melalui kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan pariwisata dan swasta melalui investasi dengan mendirikan sarana penginapan untuk menunjang pariwisata, kegiatan antara pariwisata dengan pengembangan kawasan minapolitan bisa menjadi saling menguntungkan. Dimana dengan adanya pengembangan kawasan minapolitan, pariwisata dapat terjadi peningkatan karena adanya revitalisasi pantai yang dilakukan dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan pantai dan dan pengembangan lainnya yang mendukung lingkungan pantai menjadi lebih indah dan cantik, sehingga dapat menarik wisatawan. Dan dengan adanya wisatawan yang mendatangi objek wisata disekitaran kawasan minapolitan, industri kecil yang dikelola oleh masyarakat dapat lebih meningkat.

3. Sektor Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal penting untuk meningkatkan kapabilitas dari seseorang. Melalui pendidikan seseorang juga dapat dikatakan lebih sejahtera dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan. Terkait dengan pembangunan daerah, Penting bagi untuk tidak hanya

mengandalkan sumber daya alamnya tetapi juga mengandalkan sumber daya manusianya.

“Nah tapi bagi saya sumber daya manusia itu yang paling pokok. Tapi emm persoalannya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu engga bisa dilakukan secara cepat. Melalui proses pendidikan, kesehatan, itu kan dicapai hmm dicapai tidak dalam waktu yang singkat, sehingga untuk daerah-daerah yang hmm SDMnya lemah banyak yang akhirnya mengandalkan bahkan hanya sumber daya alamnya saja. Tapi semua daerah tidak terkecuali apakah yang sumber daya alamnya kaya berlimpah maupun yang tidak semuanya menurut saya harus menguatkan sumber daya manusianya”.(Wawancara dengan Bapak Ernan, tanggal 20 Mei 2015).

Kabupaten Sukabumi yang sempat menjadi salah satu daerah tertinggal di Indonesia ini memang belum dapat dikatakan berhasil terkait dengan pendidikan para nelayan dan keluarga nelayan. Kondisi pendidikan nelayan tersebut juga bisa menjadi kendala bagi pembangunan, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Ernan bahwa pemerintah daerah walaupun kaya akan potensi sumber daya alamnya, tetap harus didukung oleh SDMnya. Terlebih nelayan dalam melaut harus memiliki kemampuan dalam membaca kondisi arah angin dan yang juga tidak kalah penting adalah pengetahuan akan perniagaan. Hal tersebut karena tidak jarang masyarakat nelayan masih ditipu oleh pedagang-pedagang perantara atau sering disebut tengkulak nakal.

Kondisi pendidikan nelayan kebanyakan masih hanya lulusan SD saja. Hal tersebut seperti yang dikatakan salah satu informan, yaitu *“Pokoknya mah SD kelas berapaaa gitu, saya keluar terus jadi nelayan wee lah. SD aja ga lulus. Ya ga ada pendidikan. kebanyakan mah kita SD, yaah paling tinggi SMP itu juga udah mati-matian biayainnya.”* (Wawancara dengan Didi, tanggal 06 Mei 2015). Selain itu dapat pula terlihat dalam grafik dibawah ini.



Gambar 5.9 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukabumi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2015

Padahal apabila melihat tujuan utama dari pengembangan kawasan minapolitan adalah untuk kesejahteraan masyarakat nelayan, yang salah satunya kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Namun, sangat disayangkan karena pendidikan para nelayan dan keluarganya masih belum sepenuhnya tersentuh. Menurut Bapak Yana salah satu untuk mengembangkan minapolitan adalah dengan pendidikan para nelayan minimal SMP atau sembilan tahun melalui dan tidak diperkenankannya anak-anak sekolah untuk bekerja sebagai nelayan disaat waktu sekolah berlangsung.

Tabel 5.7 Pengembangan Pendidikan Masyarakat Dalam Kegiatan Minapolitan

No	Lembaga/Instansi	Program	Kegiatan	Angaran
1	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Sekolah Lapang Kawasan Agribisnis Peternakan dan Minapolitan. Sekolah Lapang Minapolitan Pengolah Hasil Perikanan di Palabuhanratu, Simpenan, Cikakak, Cisolak, Surade	APBD Kab. 300.907.400
2	Badan Lingkungan Hidup (Blh) Kabupaten Sukabumi		Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) Kecamatan Palabuhanratu	APBN 100.000.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2014

Pendidikan yang diberikan tersebut sebagai penunjang profesinya sebagai nelayan. Selain itu juga, pendidikan yang diberikan terkait dengan kegiatan ramah lingkungan karena pekerjaan para nelayan yang memanfaatkan sumber daya alam, sehingga dirasakan perlu memberikan pengetahuan kepada para nelayan terkait dengan lingkungan.

Pihak yang terlibat dalam hal ini selain dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, juga ikut terlibat didalamnya adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kab. Sukabumi, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukabumi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Ya pendidikan buat nelayan atau buat siapapun itu semua penting ya, kalo sekarang kan sekolah itu udah gratis jadi ya sudah seharusnya mereka bisa gitu untuk sekolah. Tapi kalo untuk yang terkait sama minapolitan itu, kayak yang kamu liat ini itu salah satu bentuk dari kerjasamanya kita dengan OPD lain. Dan ini kalo yang BLH itu anggarannya dari pusat, itu juga mencerminkan adanya campur tangan pemerintah pusat.” (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)



Gambar 5.10 Kegiatan Pendidikan Bagi Anak-Anak Dan Anak-Anak Yang Bekerja

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2014 dan Dokumentasi Pribadi, 2015

4. Sektor Lingkungan

Melakukan pembangunan dengan mengandalkan potensi alam memang memiliki risiko untuk terjadi kerusakan alam atau lingkungan bila pembangunan yang dilakukan tidak berdasarkan pembangunan secara berkelanjutan. Terlebih untuk pengembangan kawasan minapolitan industrialisasi perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi yang memerlukan pembangunan-pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan minapolitan. Pembangunan-pembangunan tersebut tidak jarang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Ernan.

“banyak yang sumber daya alamnya saja yang diandalkan tapi akhirnya malah menimbulkan kerusakan lingkungan. Emm sumber daya alam berlimpah tapi akhirnya karena SDMnya lemah katakanlah dimanfaatkan oleh kepentingan bangsa lain, daerah lain, kelompok tertentu karena ketidaktahuan karena lemahnya SDM itu.”
(Wawancara dengan Bapak Ernan, tanggal 20 Mei 2015).

Kerusakan lingkungan tersebut pada akhirnya dapat menyusahkan masyarakat. Kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan dalam rangka kawasan minapolitan, antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Kegiatan Peduli Lingkungan Oleh Badan Lingkungan
Hidup (BLH) Kabupaten Sukabumi**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengembangan Pesisir dan Laut Terpadu Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Ciemas, Surade	PM (Anggaran tidak terhitung karena bersumber dari berbagai pembiayaan)
2	Penerapan Instrumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL Kecamatan Ciracap, Cibitung, dan Ciemas	100.000.000
3	Pendataan Kerusakan Sumber Daya Alam (Menuju Indonesia Hijau) Kec. Palabuhanratu, Simpenan, Cikakak, dan Cisolok	30.000.000
4	Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh Kecamatan Palabuhanratu	175.000.000
5	Teknologi Tepat Guna Lingkungan Kecamatan Cisolok, Ciakak, Simpenan, dan Palabuhanratu	125.000.000
6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kec. Palabuhanratu	85.000.000
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade	195.000.000
8	Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan Kecamatan Palabuhanratu dan Cibitung	100.000.000
9	Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kecamatan Cisolok, Ciakak, Simpenan, dan Palabuhanratu	100.000.000
10	Penyusunan Kajian dan Profil Lingkungan Hidup Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap,	25.000.000

	Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade	
11	Identifikasi dan Penetapan Kawasan Lindung Kabupaten Sukabumi di Luar Kawasan Hutan Kecamatan Cibitung dan Ciracap	30.000.000
12	Pengendalian Pencemaran B3, Limbah B3 dan Sampah Kecamatan Palabuhanratu akibat industri	75.000.000
13	Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Kecamatan Cisolok	30.000.000
14	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade	25.000.000
15	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) Kecamatan Palabuhanratu	100.000.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2014

Penegembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi yang fokus pada industrialisasi menyebabkan pengeluaran limbah yang banyak. Limbah tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Menjadi sumber penyakit hingga menimbulkan dampak bencana alam dapat terjadi, maka perlu ada penanganan yang serius tidak hanya dari Pemerintah Kabupaten tapi juga hingga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan banyak dikerjakan di kawasan sekitar pantai yang memiliki konstruksi tanah tidak sekuat dengan yang ada di dataran tinggi. Namun sayangnya, pengendalian limbah tersebut baru dilaksanakan di Kecamatan Palabuhanratu saja sebagai zona inti. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.

5. Sektor Perumahan

Sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan perbaikan rumah layak huni kepada masyarakat. Rumah masyarakat yang masih dibangun dari bilik bambu membuat fungsi rumah sebagai tempat berlindung menjadi tidak lagi aman karena rentan terhadap terpaan angin dan guyuran hujan. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah melakukan perbaikan kepada rumah dari masyarakat nelayan, berikut merupakan data perbaikan rumah layak huni

Tabel 5.9 Kegiatan Rehab Rumah Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No	Rehab Rumah Nelayan Tidak Layak Huni (253 unit)	Anggaran
1.	Kecamatan Ciemas Desa Ciemas 10 unit, Ciwaru 53 unit, Mandrajaya 19 unit, Mekarsakti 11 unit	1.897.500.000
2.	Kecamatan Cisolok Desa Cikahuripan 51 unit, Cisolok 109 unit	
3.	Pembangunan sarana umum di Desa Cikahuripan berupa jalan beton penghubung antar rumah	337.000.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2014

Rehab rumah nelayan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan disana.



Gambar 5.11 Rehab Rumah Masyarakat Nelayan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, 2014

Bantuan lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna menyejahterkan nelayan dalam rangka mencapai tujuan utama dari pengembangan kawasan minapolitan adalah pemasangan jaringan listrik. Penyambungan listrik gratis tersebut dilakukan untuk lebih menunjang kegiatan dari kehidupan sehari-hari para nelayan. Pemasangan listrik diberikan kepada kecamatan Tegalbuled, Cisolok, Ciemas, Surade dan palabuhanratu pada tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 1.852.620.000,- melalui Dinas Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral yang bersumber dari APBD Kabupaten. Berikut merupakan gambar dari pemasangan listrik di Kabupaten Sukabumi



Gambar 5.12 Pemasangan Sambungan Listrik Desa Nelayan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2014

5.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sukabumi

Masih terdapatnya masalah seperti kemiskinan para nelayan di Kabupaten Sukabumi karena belum optimalnya minapolitan di Sukabumi, setidaknya dapat dilihat dari kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengembangkan kawasan minapolitan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

5.2.2.1 Pemerintah

Pengembangan minapolitan yang mengarah pada industrialisasi, dimana kegiatan ekspor merupakan kegiatan utama dari minapolitan Kabupaten Sukabumi. Namun Kabupaten Sukabumi belum dapat melakukan kegiatan ekspor, hal tersebut karena belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekspor. Padahal, Kabupaten Sukabumi memiliki komoditas unggulan ekspor yaitu ikan tuna dan layur. Sangat disayangkan karena belum sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekspor belum memadai, hal ini karena tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan ekspor. Terlebih PPNP yang ada sudah seharusnya ditetapkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) untuk dapat menunjang kegiatan industrialisasi perikanan yang ada khususnya kegiatan ekspor. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Yana, yaitu sebagai berikut:

“Kita aja engga bisa ekspor sendiri. Masih distribusi ke Jakarta misalnya. Terus di Jakarta baru di ekspor. Padahal kan ya, gini sih di kan sebenarnya juga seharusnya sudah menjadi PPS bukan lagi PPN tapi ya kitanya juga sarananya belum lengkap. Nah sedangkan PPS menjadi hmmm ibaratnya tuh syarat gitu untuk minapolitan industrialisasi. Jadi ya kita masih berusaha lah buat juga menunjang sarana dan prasarananya” (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Ayom, yaitu:

“belum bisa ekspor dan masih harus didistribusikan ke Jakarta dulu. Di PPNP belum ada sarananya soalnya. Sayang sih sebenarnya juga tapi lagipula lahan yang mau dijadikan PPS itu juga baru selesai masalah

sengketa lahannya sekarang ini. Yah jadi mau apalagi kan.” (Wawancara dengan Bapak Ayom, tanggal 8 Juni 2015)

Hasil tangkap perikanan yang selama ini terjadi di Kabupaten Sukabumi untuk ekspor sayangnya masih harus di distribusikan dahulu ke Jakarta, hal tersebut karena ketidakmampuan dari pemerintah daerah untuk melakukan ekspor. Belum terealisasinya PPS yang merupakan penunjang minapolitan industrialisasi merupakan salah satu dari kendala tersebut.

“Karena kita belum punya sarana dan prasarananya kan karena kita masih PPN. Kalo itukan harus ada kapal besar, pabrik-pabrik untuk penampungan ya, packingnya. Jadi kita belum bisa untuk ekspor. Padahal ya kalo ditanya cita-cita kita ya ingin untuk ekspor sendiri, karena produk yang ada disana yang sebenarnya punya kita malah jadi produknya jakarta dan pendapatan mereka akan lebih banyak ketimbang kita, karena mereka yang ekspor. Makanya kita tuh berjuang mati-matian untuk kita PPNP ini menjadi PPS, kalau udah PPS nanti kita bisa untuk ekspor sendiri. Sebenarnya itu belum terwujud, karena kan kalo untuk menjadi pelabuhan samudera itu sarana dan prasarananya sudah harus komplit. (Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

Belum terealisasinya pembangunan PPS yang merupakan salah satu penunjang pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi adalah karena adanya sengketa lahan dengan Pertamina sebagai pemilik sah lahan. Menurut Bapak Yana, lahan yang masih dihuni oleh sekitar 300 lebih kepala keluarga tersebut kini telah bebas, karena pemerintah telah membayar lahan tersebut dari Pertamina dan untuk para keluarga yang masih tinggal di lahan tersebut akan di relokasi ke tempat lain.

“....Sekarang pembayarannya sudah dilakukan, tinggal relokasi nelayan-nelayan yang menempati lahan tersebut dan tidak memiliki tempat tinggal. Kita akan relokasi ke ada disini tanah pemerintah daerah dekat PLTU, rencananya kita akan pindahkan kesana. Tapi kita data dulu kawasannya, rumahnya akan dibangun dengan dana CSR, tapi tanahnya tetap harus

dibayar sesuai dengan harga pasar. dan nelayan silakan membeli tanah milik pemerintah, harganya sesuai pasar, bonusnya mereka bisa langsung tinggal dan memiliki rumah.....". (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Masalah sengketa lahan yang sudah lama terjadi dengan Pertamina dan baru terselesaikan sekarang merupakan hal yang sangat disayangkan. Pembangunan PPS yang seharusnya sudah selesai dan dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan minapolitan menjadi terganggu. Hal tersebut berdampak tidak hanya bagi pemerintah daerah karena adanya pendapatan yang hilang akibat ketidakmampuan ekspor, tapi juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat nelayan.

Ketidakmampuan daerah dalam mengeksport hasil tangkapannya juga belum didukung oleh akses yang memadai. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi memiliki komoditas utama yaitu ikan tuna, cakalang, tongkol dan layur. Dimana ikan tuna dan cakalang merupakan komoditas ekspor, namun karena ketidakmampuan untuk melakukan ekspor sendiri maka produk tersebut harus dikirim ke Jakarta terlebih dahulu untuk selanjutnya di ekspor disana. Infrastruktur yang kurang memadai merupakan salah satu hal yang menyebabkan belum mampunya Kabupaten Sukabumi untuk mengseksport ikan hasil tangkapnya. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera namun hingga saat ini belum mencirikan dan belum memiliki standar seperti PPS sangatlah disayangkan. Bukan hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah setempat saja, namun hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat juga. Lebih lanjut, kegiatan ekspor yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sukabumi juga tidak diimbangi dengan aksesibilitas yang mudah. Jauhnya jarak tempuh antara pelabuhanratu dengan Jakarta akan mengurangi nilai jual ikan karena ikan tidak lagi dalam kondisi yang segar. Hal tersebut lantas diakui oleh Bapak Tedi, yaitu *"kita kirim ke Jakarta untuk di ekspor, jaraknya kan jauh ya pastilah ikannya udah engga sesegar sebelumnya. Ya makannya perlu mobil yang emang*

bagus biar ikan juga bisa tahan lama dan kondisinya fresh.”(Wawancara dengan Bapak Tedi, tanggal 11 Mei 2015)

Berbeda dengan Bapak Tedi, perwakilan akademisi dari Institut Pertanian Bogor Bapak Ernan berpendapat

“....Tapi secara umum Sukabumi itu masih tertinggal yah, nah kalo pelabuhanratu dia berkembang hmm tapi dengan hmmm kalo menurut saya berkembangnya tidak optimal. Karena aksesibilitas yang semakin buruk antara kota pelabuhanratu dengan pusat-pusat ekonomi lainnya terutama dengan Jakarta. Memburuknya sistem transportasi dari Ciawi sampe ke Pelabuhanratu menurut saya termasuk masih menahan potensi pertumbuhan Sukabumi terutama diantaranya pelabuhanratu itu sendiri. Padahal hmm sektor unggulannya kan hmm wisata hmm dan perikanan yang dua-duanya membutuhkan aksesibilitas kan gitu. Ketika waktu tempuh itu semakin meningkat yah artinya kan biaya untuk menjangkau daerah tersebut itu kan juga meningkat. Dan akibat tingginya biaya transportasi dan buruknya aksesibilitas potensi pertumbuhannya tertekan. Jadi sepertinya sebenarnya masih jauh dibawah potensi sebenarnya. Orang yang mau ke pelabuhanratu sekarang mikir-mikir panjang. Jadi saya lihat kunjungan wisatanya tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti yang ke pelabuhanratu padahal kalo katakanlah ke pelabuhanratu itu selancar pergi ke Bandung aja, saya yakin banyak sekali yang akan kesana. Nah termasuk perikanannya, ikan kan kalo yang bernilai tinggi itu kan ikan segar, jadi kalo udah dikeringkan udah lain. Ikan asin misalnya kan murah kalo ikan segar gitu kan mahal. Tapi kalo dengan waktu tempuh yang seperti itu penurunan nilai dari harga ikannya kan pasti terjadi dan penyusutan nilainya itu tinggi sekali itu...”
(Wawancara dengan Bapak Ernan, tanggal 20 Mei 2015)

Aksesibilitas yang baik dapat mempermudah distribusi hasil tangkapan ke lokasi pemasaran. Terlebih melihat kondisi geografis dari Kabupaten Sukabumi yang sangat luas dan cukup jauh di jangkau. Namun sayangnya kemudahan akses antar daerah masih belum terwujud walau dalam *masterplan* sudah direncanakan.

Kondisi jalur distribusi antar daerah memang belum dapat terwujud, namun untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan secara lebih baik jalur distribusi antar kecamatan dan desa telah membaik dari sebelumnya. Hal tersebut seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini



Gambar 5.13 Kondisi Jalanan Rusak, Partisipasi Masyarakat Dalam Memperbaiki Jalan Rusak dan Kondisi Jalan Rusak yang Telah Diperbaiki

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, 2014

Misalnya pengembangan jaringan distribusi pemasaran, pembangunan sarana umum di Desa Cikahuripan berupa jalan beton, dan lain-lain. Kemudahan akses antar pada akhirnya akan berdampak pada sektor lain, seperti pariwisata. Pembangunan akses untuk mempermudah jalur distribusi hasil tangkapan di kawasan minapolitan ke daerah lain memerlukan kerjasama yang baik dengan kementerian atau lembaga lain. Menurut salah satu informan yaitu Bu Titik belum ada payung hukum yang membagi tugas dan wewenang antar kementerian/lembaga dalam mengembangkan kawasan minapolitan. Selama ini bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian/Lembaga lain hanya bersifat *voluntary*.

Kendala lain menurut Bappeda adalah terkait dengan kurang intervensinya pemerintah pusat terhadap pengembangan minapolitan di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah pusat dianggap kurang melibatkan diri langsung ke masyarakat, sehingga tidak tahu permasalahan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan secara langsung. Hal tersebut terkait dengan pemberian bantuan kapal dan tidak adanya bantuan modal kepada nelayan, dimana kondisinya adalah modal masih susah untuk diakses oleh nelayan.

“Nah, yang kayak-kayak gini tuh pemerintah pusat harus ngeh harus tau harus paham. Jadi begitu sekarang ngasih kapal harus ngasih modal minimal untuk 2 sampai 3 trip perjalanan ke laut. Sampai mereka punya modal sendiri nantinya. Jadi tidak bisa saya sebagai nelayan dikasih sama pemerintah ini kapalnya ini alatnya kemudian sudah sana berangkat.”
(Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Kendala yang juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi kini terkait dengan berlangsungnya pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi adalah setelah penetapan Peraturan Perundang-undangan No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut kewenangan terkait dengan perikanan dan kelautan menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Hal ini menjadi kendala karena perencanaan dan pengembangan yang dilakukan selama ini berada di tangan Pemerintah Kabupaten. Masalah terkait berpindahnya kewenangan terkait dengan perikanan dan kelautan juga dirasakan oleh pihak pemerintahan daerah kabupaten. Menurut Bapak Iwan sebagai perwakilan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, yaitu

“terkait dengan Undang-Undang no 23 tahun 2014 sebenarnya kita masih nerapin yang lama sih ya. Jadi....mmm masih dalam masa transisi gitu jadi belum sepenuhnya diserahkan ke provinsi. Tapi kalo untuk sekarang yang udah direalisasikan itu terkait dengan perizinan kapal, jadi itu sudah ke kita semua pengurusan perizinan kapalnya. Sedangkan untuk pengembangan dan lain-lain masih belum. Dan hmmmm untuk kedepannya sih masih disesuaikan yah. Kalo untuk minapolitan itu kan juga pasti masih saling koordinasilah.” (Wawancara dengan Bapak Iwan, tanggal 4 Juni 2015)

Sedangkan menurut Bapak Yana selaku perwakilan dari Bappeda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut

“Awalnya sebelum terbit Undang-undang no 23 tahun 2014 kita yang mau mengintervensi itu. Kita mau bangun unit-unit pelayanan teknis daerah, sebagai pembeli jadi memfasilitasi nelayan. Uptd yang membeli ke nelayan dan kemudian uptd yang jual ke eksportir tapi ketika undang-

undang 23 ini diterapkan kita ada kewenangan yang ilang. Kewenangan perikanan, kewenangan perikanan kita di provinsi. Saya ga tau nih tahun 2016 kedepan, apakah dinas perikanan kelautan nanti cuma ada di provinsi aja atau gimana. Tergantung heh kebijakan pemerintah provinsi apakah nanti uptdnya mau di prvinsi atau semua orangnya ditarik ke provinsi. Ini yang menjadi kekhawatiran kita kedepan, yang namanya minapolitan adalagi engga yang menjadi kebanggan daerah? Keliatannya sih engga ada, kalo itu sudah ditarik ketingkat provinsi.tapi mudah-mudahan tingkat provinsi masih mendelegasikan sebagian kewenangannya ke kabupaten.” (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Belum ada kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan Provinsi karena sampai sekarang kewenangan masih berjalan seperti sebelum undang-undang no 23 tahun 2014 ditetapkan. Dari pihak pemerintah provinsi sendiri tetap memerlukan koordinasi dengan pihak Kabupaten karena merasa dalam pengembangan kawasan minapolitan jika dijalankan sendiri oleh Provinsi akan kewalahan. Dan sebaliknya dari pemerintah Kabupaten juga berharap adanya penyerahan wewenanga terkait pengembangan kawasan minapolitan karena dianggap sebagai salah satu upaya pembangunan daerah yang dapat berhasil di Kabupaten Sukabumi. Namun sebenarnya apabila melihat pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan pada undang-undang tersebut, terkait dengan perikanan tangkap pemerintah kabupaten memiliki kewenangan pemberdayaan pelayanan kecil dalam daerah kabupaten/kota dan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Pengembangan kawasan minapolitan diluar dari dua kegiatan tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Terkait dengan pemasaran misalnya, kini menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

5.2.2.2 Masyarakat

Kendala selanjutnya adalah datang dari masyarakat. Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi, pemerintah membantu nelayan dengan memberikan bantuan berupa kapal besar yang dapat digunakan untuk melaut

dengan jarak 40 mil dan dapat mengangkut jumlah orang banyak sehingga diharapkan jumlah ikan yang didapat bisa meningkat. Menurut Bapak Yana, budaya nelayan Kabupaten Sukabumi berbeda dengan nelayan daerah lain yang memiliki ketahanan dan kedisiplinan dalam melaut dan menangkap ikan.

“...Tapi nelayan yang ada dikita lagi-lagi berbeda dengan nelayan yang ada di misalnya orang makassar, orang madura, orang cilacap, beda mereka itu lebih tahan untuk tinggal di tengah laut 6 bulan, lah kita baru seminggu udah balik. Kangen keluarga katanya.” (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Kurang disiplin dan tangguhnyanya para nelayan ini menurut Bapak Yana dapat dilihat dari lebih banyaknya nelayan luar yang melaut di Pelabuhanratu dibandingkan dengan nelayan sendiri. Terkait dengan budaya atau kebiasaan memang sulit diubah terlebih melalui pihak luar, harus dari kemauan diri sendirilah kebiasaan tersebut dapat diubah menjadi lebih baik. Selain itu, kendala lain yang terkait dengan masyarakat adalah akses peminjaman modal ke lembaga perbankan yang dinilai sulit oleh masyarakat. Bantuan modal yang diberikan masih dirasakan sulit untuk memperolehnya bagi para nelayan. Hal tersebut karena persyaratan yaitu adanya jaminan bila ingin melakukan peminjaman. Jaminan ini yang menjadi kendala bagi nelayan karena adanya ketidakpercayaan peminjam. Menurut salah satu informan hal tersebut wajar saja terjadi, pihak perbankan pasti tidak akan dengan mudah meminjamkan modal terlebih dengan melihat kondisi nelayan yang miskin.

Kesulitan tersebut pada akhirnya akan membuat para nelayan sulit untuk melaut. Hal tersebut karena pada dasarnya nelayan tidak hanya memerlukan bantuan seperti alat tangkap dan kapal, tetapi juga bantuan modal operasional. Biaya operasional tersebut mencakup biaya bekal makan, biaya bahan bakar untuk perjalanan melaut dan lain-lain. Pemerintah memang telah membantu masyarakat nelayan untuk melaut dengan memberikan bantuan kapal dan alat tangkap, namun bantuan tersebut dianggap belum cukup oleh masyarakat nelayan. *“Kita kan kalo melaut juga butuh uang, nah uangnya mau dari mana coba. Dan kalo udah*

ngelaut gitu uangnya kan ga dikit.” (Wawancara dengan Didi, tanggal 06 Mei 2015)

Bantuan kapal yang diberikan oleh pemerintah pada akhirnya tidak sepenuhnya di manfaatkan oleh masyarakat nelayan dalam jangka panjang. Banyak diantara nelayan malah menjual kapal bantuan kepada juragan kapal dengan harga yang murah dan hal tersebut dilakukan oleh nelayan karena ketidakmampuan para nelayan untuk memenuhi biaya operasional dalam melaut. *“Kalo bantuan kapal mah pernah tapi kita engga kuat beli solarnya yaudah kita jual. Lagian ngasi tapi ga dimodalin. Kan kita juga butuh modalnya.” (Wawancara Didi, tanggal 06 Mei 2015).*

Bantuan kapal yang diberikan kepada kelompok yang diwakili oleh ketua kelompoknya kadang dijual lagi oleh para nelayan dengan alasan tidak adanya modal untuk melaut. Padahal pemerintah memberikan bantuan kapal dengan alasan supaya para nelayan tidak perlu menyewa atau menjadi buruh nelayan lagi dan dapat melaut sendiri dengan kapalnya sendiri. Namun, permasalahan lain yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah adalah terkait bantuan modal.

“budaya nelayan di sukabumi juga berbeda dengan yang ada di daerah lain. Hmm jadi kalo sudah ada kelompok nelayan yang diberi bantuan, hari ini mungkin mereka memiliki kapal, tapi yang jadi kendala ketika mereka memiliki kapal, mereka tidak memiliki modal untuk melaut. Solarnya gimana, terus ditengah laut seminggu misalnya itu bekalnya gimana, terus sekarang eemmm membiayai tenaga kerja yang ikut dikapalnya mereka seperti apa. Jadi, belum tentu dikasih kapal itu menyelesaikan masalah. Jadi akhirnya kapal yang sudah dibantu oleh pemerintah diserahkan ke kelompok-kelompok nelayan itu karena dengan alasan modal dijual. (P: hah dijual pak?!) iya dijual. Dijual ke siapa? Ke juragan kapal. Terus mereka kehidupannya gimana? Mereka ya bekerja kepada juragan, ada juga yang nyewa kapal. Kapal yang tadinya dibantu pemerintah menjadi miliknya juragan, dan mereka jualnya dengan harga murah” (Wawancara dengan Bapak Yana, tanggal 06 Mei 2015)

Sikap nelayan yang menjual kembali kapal yang diberikan kepada mereka dari pemerintah merupakan bentuk dari belum secara menyeluruh pemerintah menyelesaikan masalah. Para nelayan tidak hanya membutuhkan kapal sebagai sarana utama dalam melaut, tetapi juga memerlukan biaya operasional yang dapat mendukung kegiatan melaut mereka. Namun, seperti yang sudah dijelaskan bahwa terkait dengan biaya operasional pada dasarnya pemerintah sudah memberikan solusi melalui peminjaman modal ke lembaga perbankan, namun akses yang masih sulit untuk meminjam modal tersebut menjadi permasalahan baru yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mungkin dapat saja memberikan modal kepada masyarakat, namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala mengapa pemerintah tidak dapat memberikan modal berupa uang secara cuma-cuma. Dibutuhkan kemandirian dari para nelayan untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional mereka sendiri salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan kegiatan bina usaha.

BAB 6

PENUTUP

Pada bab ini akan diberikan simpulan dan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan

6.1 Simpulan

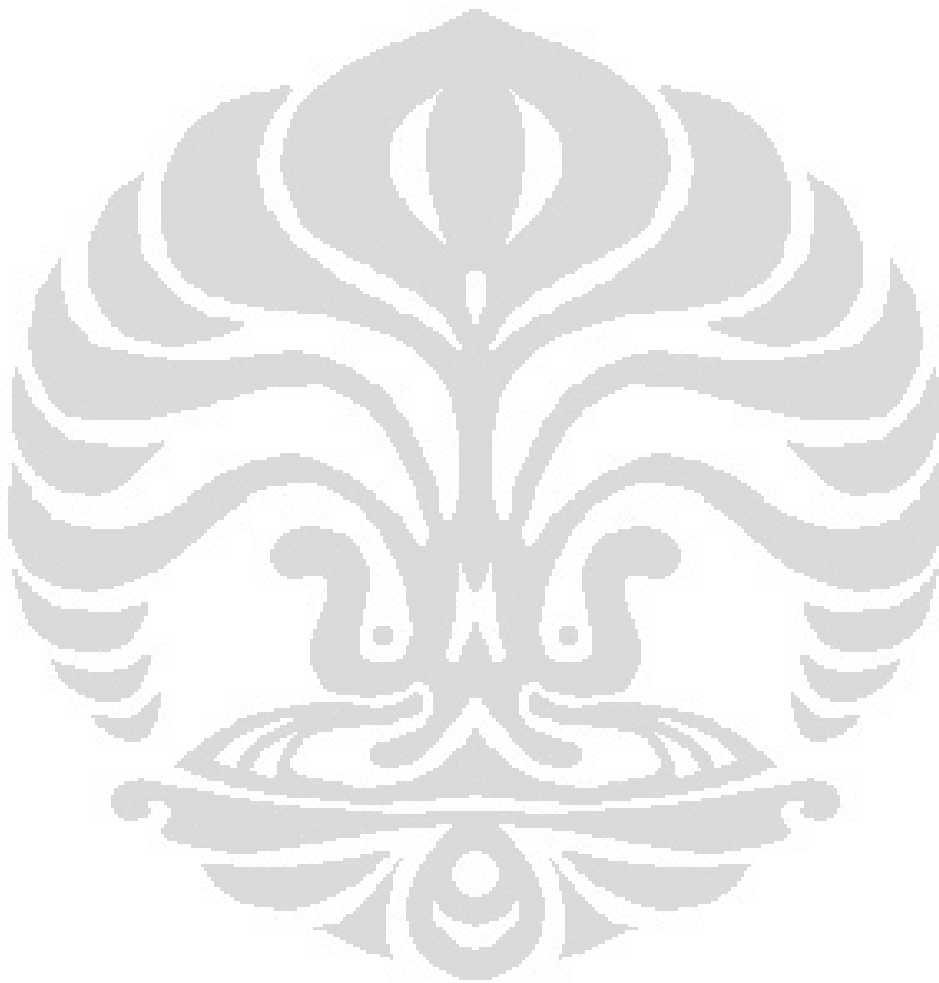
Masterplan kawasan minapolitan Kabupaten Sukabumi adalah dokumen perencanaan pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan bentuk dari *rational comprehensive planning*. Dimana dalam merumuskannya dilakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat nelayan dan pihak swasta. Namun, terkait dengan partisipasi masyarakat nelayan terdapat permasalahan khususnya dengan nelayan buruh yaitu aspirasi mereka yang belum terakomodir, sehingga masih banyak masyarakat nelayan yang miskin dan belum sejahtera.

Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sukabumi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten, sehingga pengembangan kawasan minapolitan sudah selaras dengan pembangunan yang dilakukan provinsi dan kabupaten. Perencanaan ini juga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, namun terdapat ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi. Selain terdapat permasalahan misalnya terkait dengan pembangunan jalan tol Jakarta – Bogor – Ciawi dan Pelabuhanratu (JAGORATU) yang belum terealisasi hingga kini.

6.2 Saran

1. Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan khususnya nelayan buruh dengan melakukan kegiatan diskusi rutin untuk menampung aspirasi masyarakat nelayan tersebut. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melibatkan setiap kecamatan yang terletak di wilayah pesisir untuk rutin mengadakannya dan selanjutnya dapat melaporkan hasil diskusi tersebut ke Pemerintah Kabupaten.

2. Diperlukan perbaikan terkait dengan *masterplan* kawasan minapolitan dengan RTRW Kabupaten Sukabumi, karena terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Jakarta – Bogor – Ciawi dan Pelabuhanratu (JAGORATU).



Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Asheim, Bjorn. Cooke, Philip. Martin, Ron. 2008. *Cluster and Regional Development: Critical Reflections and Explorations*. Routledge Taylor & Francis Group: New York
- Balkely, E.J 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. SAGE Publication Inc : California
- Beer, Andrew. Maude, Alaric, dan Pritchard, Bill. 2003. *Developing Australia's Regions: Theory and Practice*. University of New South Wales Press Book: Australia
- Bryson, John M. 2004. *Strategic Planning For Public And Non-Profit Organizations: A Guide to Strengthening And Sustaining Organizational Achievement*. Jossey-Bass A Wiley Imprint: San Francisco
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Capello, Roberta and Nijkamp, Peter. 2009. *Handbook of Regional Growth and Development Theories*. Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham
- Dimitriou, Harry T dan Thompson, Robin. *Strategic Planning for Regional Development In The UK*. 2007. Routledge Taylor & Francis Group: New York
- Djaneuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Djunaedi, Achmad. 2012. *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Friedmann, John and Allonso, William. 1964. *Regional Development and Planning*. The M.I.T Press: Cambridge
- Glasson, John and Marshall, Tim. 2007. *Regional Planning*. Routledge Taylor & Francis Group: New York
- Hall, Peter and Jones, Mark Tewdwr. 2011. *Urban and Regional Planning*. Routledge Taylor & Francis Group: New York
- Hoessein, Bhenyamin. 2011. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI: Depok
- Irawan dan Suparmoko. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Liberti: Yogyakarta
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Kaho, Josef Riwu. 2003. *Pospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Refomasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga: Jakarta
- Neuman, W. Laurence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon
- Neuman, W. Laurence. 2007. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon: Boston
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhimin. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES: Jakarta
- Pike, Andy, Pose Andreas Rodriguez and Tomaney John. 2006. *Local and Regional Development*. Routledge Taylor & Francis Group: New York
- Pomeroy, Robert S and Andrew, Neil L. 2011. *Small-scale Fisheries Management. Frameworks and Approaches for Developing World*. CAB International: London
- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage Of Nations*. The Free Press: New York
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif. Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Purnomo, Agus Heri, dkk. 2011. *Minapolitan: Konsep, Pengembangan dan Aplikasi Dalam Pengembangan Wilayah*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan: Jakarta
- Rustiadi, Ernan. Saefulhakim, Sunsun. Panuju, Dyah R. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suhardjo, Sussongko. 2006. *Pembangunan Daerah Mendorong PEMDA Berjiwa Bisnis*. Pata Rei: Jakarta
- Wilson, Douglas Clyde, Valle Ikerne Del, Jessen Renee and Motos Lorenzo. 2006. *The Knowledge Base For Fisheries Management*. Elsevier: Netherlands
- Young, Greg. 2008. *Reshaping Planning With Culture*. Ashgate Publishing Limited: England

Zulham, Armen dan Purnomo, Agus Heri. 2010. *Minapolitan Dari Konsep Menuju Implementasi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan: Jakarta

Sumber Skripsi/Tesis/Disertasi:

Mulia, Imas Cempaka. 2014. Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Banjar Jawa Barat Melalui Program Agribisnis. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Negara (Depok:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)

Novianti, Dina. 2011. Kebijakan Pungutan Negara Untuk Mendukung Pembangunan Minapolitan Indonesia. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi dalam Ilmu Administrasi (Depok:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)

Yulianda, Kartika. 2012. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Akselerasi Kawasan Minapolitan Berbasis Budidaya Ikan Lele Di Kbpupaten Bogor. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal (Depok:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)

Sumber Publikasi Elektronik

AntaraBogor.2012.Minapolitan Masih Menjadi Asa Nelayan Sukabumi.
<http://antarabogor.com/print/600/minapolitan-masih-menjadi-asa-nelayan-sukabumi> (10/04/2015)

AntaraNews. 2011. Dibutuhkan Komitmen Daerah Untuk Kembangkan Minapolitan. <http://www.antarane.ws.com/berita/253047/dibutuhkan-komitmen-daerah-untuk-kembangkan-minapolitan> (10/04/2015)

Dinas Kabupaten Bogor. 2014. Selayang Pandang Minapolitan Kabupaten Bogor.
<http://disnakan.bogorkab.go.id/index.php/multisite/post/56/selayang-pandang-minapolitan-kabupaten-bogor#.VOKIAWOBA38>(30/01/2015)

Indosiar. Tanpa Tahun. Nelayan Pelabuha Ratu Tidak Melaut.
http://www.indosiar.com/fokus/nelayan-pelabuhan-ratu-tidak-melaut_74157.html (10/04/2015)

Integrasi Tri Tama Cendekia. Tanpa tahun. Rencana Induk.
<http://ittc.co.id/rencana-induk.php> (12/12/2014)

Kementerian Keuangan. Realisasi APBN TA 2014 per 31 Oktober 2014.
www.kemenkeu.go.id/katalogdata (14/03/2015)

Kementerian Pekerjaan Umum. Meretas Kota Minapolitan Pertama di Indonesia.
http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi2%20pdf2b.pdf(03/07/2015)

Republika. Tanpa tahun. 60 Persen Nelayan Sukabumi Miskin.
<http://www.republika.co.id/berita/regional/jawa-barat/11/06/27/Ing9by-60-persen-nelayan-sukabumi-miskin> (10/04/2015)

Sunoto. Tanpa tahun. Arah kebijakan pengembangan konsep minapolitan di Indonesia.
http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi2%20pdf2c.pdf (10/11/2014)

Trobos. 2008. Pemprov Jawa Barat bertekad menjadikan Sukabumi sebagai pusat penangkapan ikan kawasan Jawa Barat bagian selatan.
http://www.trobos.com/2014/detail_berita.php?sid=894&sir=9 (04/07/2015)

United State Agency Internastioanl Development. 2013. Sustainable Fisheries and Responsible Aquaculture: A Guide For USAID Staff and Partners.
<http://www.crc.uri.edu/download/FishAquaGuide14Jun13Final.pdf> (15/02/2015)

Sumber Lembaran Negara:

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 32 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 35 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Lembaran Daerah:

Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi No 63 Tahun 2014 Tentang Masterplan Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi.

Dokumen realisasi kegiatan OPD Tahun 2013-2014 Kabupaten Sukabumi

Dokumentasi Kegiatan Minapolitan Kabupaten Sukabumi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi

Dokumentasi Kegiatan Minapolitan Kabupaten Sukabumi di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

Dokumentasi Kegiatan Minapolitan Kabupaten Sukabumi di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Preview Final Minapolitan: Pengembangan Kawasan Minapolitan. 2013

Kementerian Pekerjaan Umum. Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan. 2012

Wawancara Mendalam

Wawancara Bapak Chefy Yana (Bappeda Kab. Sukabumi) [06/05/2015]

Wawancara Bapak Tedi Koswara (Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sukabumi) [11/05/2015]

Wawancara Bapak Ayom Prabowo (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi) [08/06/2015]

Wawancara Mba Titik Nurhandayani (Kelembagaan Usaha Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan) [19/05/2015]

Wawancara Bapak Didi (Nelayan Kabupaten Sukabumi) [06/05/2015]

Wawancara Ketua KUB Bapak Said (Nelayan Kabupaten Sukabumi) [06/05/2015]

Wawancara Bapak Ernan Rustiadi (Dekan FAPERTA IPB) [20/05/2015]

Wawancara dengan Bapak Iwan Sefriana (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat) [04/06/2015]

Lampiran 1

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Aliya Savitri

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 8 Juni 1993

Alamat lengkap : Jl. Sadewa No. 30 rt/rw 02/01 Harjamukti, Cimanggis-Depok 16454

Telepon, HP : -/085717439069

E-mail : aliyasavitri5@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah : Dwi Sujatmo

Ibu : Suhartini

Riwayat Pendidikan Formal

1999-2005 : SDIT AT-Taufiq Depok

2005-2008 : MTsN 22 Jakarta Timur

2008-2011 : SMAN 99 Jakarta Timur

2011-2015 : S1 Reguler Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Depok

Pedoman Wawancara

A. Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
2. Peran Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
3. Pihak yang terlibat dalam Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
4. Model pengembangan kawasan minapolitan
5. Peran dalam pengembangan kawasan minapolitan
6. Pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan
7. Kendala dalam pengembangan kawasan minapolitan

B. Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

1. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
2. Peran Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
3. Pihak yang terlibat dalam Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
4. Model pengembangan kawasan minapolitan
5. Peran dalam pengembangan kawasan minapolitan
6. Pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan
7. Kendala dalam pengembangan kawasan minapolitan

C. Badan Perencanaan dan Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Sukabumi

1. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
2. Peran Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
3. Pihak yang terlibat dalam Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
4. Model pengembangan kawasan minapolitan
5. Peran dalam pengembangan kawasan minapolitan
6. Pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan
7. Kendala dalam pengembangan kawasan minapolitan

D. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

1. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
2. Peran Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
3. Pihak yang terlibat dalam Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan
4. Model pengembangan kawasan minapolitan
5. Peran dalam pengembangan kawasan minapolitan
6. Pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan
7. Kendala dalam pengembangan kawasan minapolitan

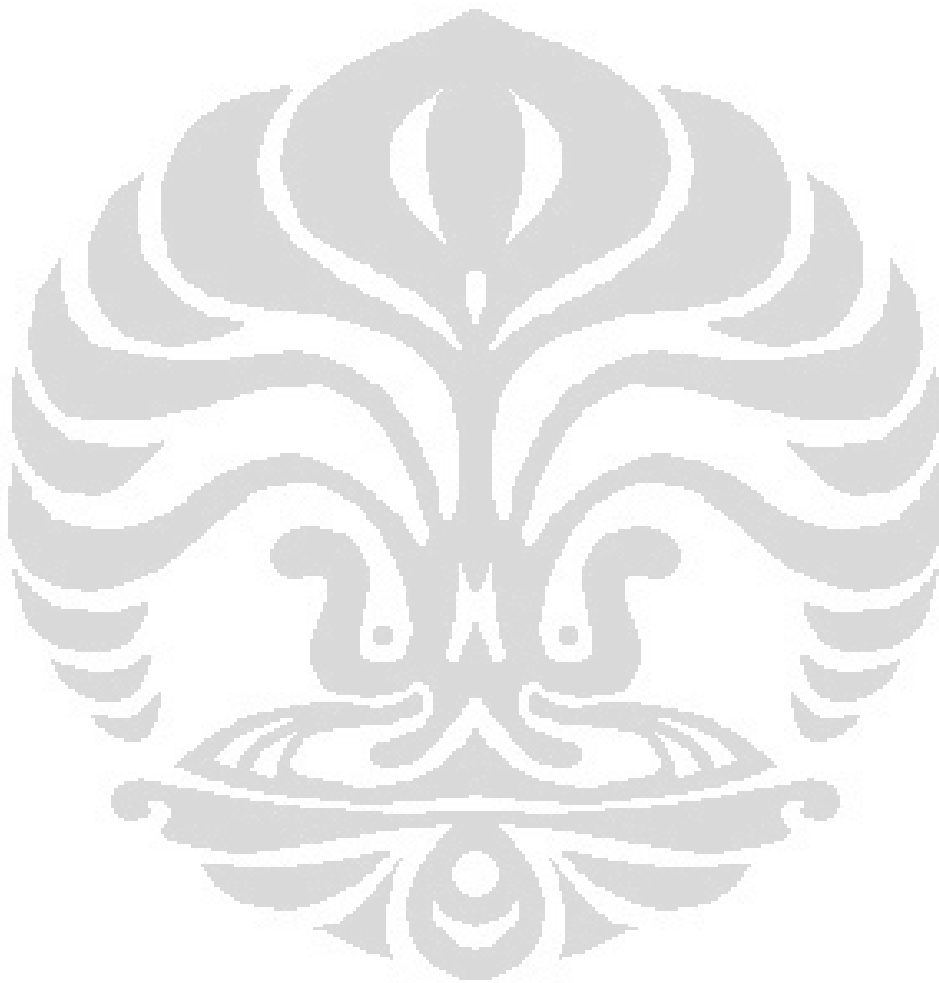
E. Akademisi

1. Konsep agropolitan dan minapolitan

2. Pembangunan wilayah berdasarkan potensi alam
3. Pihak yang berperan
4. Kendala yang dihadapi

F. Masyarakat

1. Keterlibatan dalam perencanaan dan pengembangan
2. Kendala yang dihadapi
3. Dampak yang dirasakan



Lampiran 3

Daftar Penerima Bantuan Kapal Tahun 2011

No	Nama Kelompok	Ketua	Alamat	Keterangan
1	KUB Diva	Ade Ongky	Palabuhanratu	Kapal Inkamina < 30 GT
2	KUB Gumelar Bina Nusantara	Ijat Sudrajat	Palabuhanratu	Kapal Inkamina < 30 GT
3	KN “Marlina Jaya”	Tandim	Palabuhanratu	Kapal 12 GT
4	KN “Legi”	Sugirman	Cisolok	Kapal 12 GT
5	KN “Perkasa”	Yoga Mulyana	Palabuhanratu	Kapal 12 GT
6	KN “Rani”	Dedi Rahmat	Palabuhanratu	Kapal 12 GT

Daftar Penerima Bantuan Kapal Tahun 2012

No	Nama Kelompok	Ketua	Alamat	Keterangan
1	KUB “AMK Nusa Dua”	Budri	Palabuhanratu	Kapal Inkamina < 30 GT
2	KUB “Jaya Mulya”	Ondin	Palabuhanratu	Kapal Inkamina < 30 GT
3	KN “Karunia Alam”	Anang Suryadi	Palabuhanratu	Kapal 12 GT
4	Bagbagan Bahari	Agus Erik	Palabuhanratu	Kapal 2 GT
5	Angka Niat	Anden Sugiarwan	Simpenan	Kapal 2 GT
6	Ciwaru Utama	Dodo Wiharja	Ciemas	Kapal 2 GT
7	Sagara Laut	Ujang Sudar	Cisolok	Kapal 2 GT
8	Gelar Gumilang	Jamaludin	Palabuhanratu	Kapal 2 GT
9	Bina Bakti Utama	H. Awan Gunawan	Simpenan	Kapal 2 GT
10	Setya Bungsu	Tata Sudarta	Simpenan	Kapal 2 GT
11	Jaya Utama	Rahmat	Palabuhanratu	Kapal 2 GT
12	Mitra Ligo	Gogon	Cisolok	Kapal 2 GT
13	Bahrudin	Reji Bahrudin	Cisolok	Kapal 2 GT
14	Muara Rizki	Ce Mamat Hidayat	Simpenan	Kapal 2 GT
15	Citepus Raya	Kiamaludin	Palabuhanratu	Kapal 2 GT
16	Sahabat	M. Redi Santoso	Simpenan	Kapal 2 GT

17	Santosa	Ahmad Yadzi Rumi	Simpenan	Kapal 2 GT
18	Kelpompok Laksana	Mad Supi	Cisolok	Kapal 2 GT
19	Bahagia	Oman Sulaeman	Cisolok	Kapal 2 GT
20	Layur	Didin	Cisolok	Kapal 2 GT
21	Yeli	Oim Arifin	Cisolok	Kapal 2 GT

Daftar Penerima Bantuan Kapal Tahun 2013

No	Nama Kelompok	Ketua	Alamat	Keterangan
1	KUB “Purug”	Heri	Palabuhanratu	Kapal Inkamina < 30 GT
2	KUB “Sinar Sari”	Jonathan	Palabuhanratu	Kapal Inkamina < 30 GT
3	KUB “Arya”	Dandi Mulyadi	Palabuhanratu	Kapal 10 GT
4	KUB “Baraya”	Dayi	Ciemas	Kapal 3 GT
5	KUB “Pisces”	Asep Suwanda	Palabuhanratu	Kapal 3 GT
6	KUB “Dinar Mas”	Ujang Junaedi	Palabuhanratu	Kapal 3 GT
7	KUB “Adil Pura	Pahrudin	Ciracap	Kapal 3 GT

Daftar Penerima Bantuan Kapal Tahun 2014

No	Nama Kelompok	Alamat	Ketua	Keterangan
1	KUB Perkasa	Palabuharatu	Ade Suryana	Kapal Inkamina < 30 GT
2	KUB Sumako	Surade	Warsono	Kapal Inkamina < 30 GT
3	KUB Kurawa	Palabuharatu	Dede Ola	Kapal Inkamina < 30 GT
4	KUB Super	Cisolok	Supendi	Kapal Inkamina < 30 GT
5	Manik Jaya	Palabuhanratu	Iman	Kapal 10 GT

REALISASI KEGIATAN MINAPOLITAN TAHUN ANGGARAN 2013
UPTD KABUPATEN SUKABUMI

NO	KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN (RP)			LAIN-LAIN
		APBN	APBD I	APBD II	
1	2	4	5	6	7
I	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BRKP 1' Pelatihan dan Pengembangan Pembesaran Sidat, 1 unit 10 orang 2 Pengembangan Infrastruktur kampung nelayan di desa Cimaja Kecamatan Cisolok KP3K 1. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh P2HP 1 Bantuan Truk Pengangkut Es 1 unit 2. Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Pindang 1 Paket 3. Bintek Pengolahan Ikan Pindang di Sentra Pindang, 30 orang 4. Pelatihan Usaha Pengolahan dan Pemasaran untuk wanita nelayan, 3 orang 5. Pelatihan Pabrik Es, 1 orang 6. Pelatihan Diversifikasi Usaha, 1 orang 7 PUMP, 8 Kelompok Dirjen Perikanan Tangkap 1. Uji coba umpan buatan pancing Tuna 2. Pengembangan Diversifikasi Usaha, 3 orang 3. Bintek Syahbandar Perikanan, 1 orang 4. PUMP, 17 Kelompok 5. Mesin diesel inboard 24 PH sebanyak 3 unit 6. Mesin motor tempel 15 PK sebanyak 2 unit 7. Mesin motor gantar 5,5 PK sebanyak 1 unit 8. Mesin converter BBG sebanyak 8 unit	PM PM 1,093,000,000 PM PM PM PM PM PM 400,000,000 PM PM PM 1,700,000,000 PM PM PM PM			

	Dirjen Budidaya 1. PUMP, 14 Kelompok BPSDMKP 1. Honor Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak sebanyak 7 orang 2. Pengadaan HP Gateway untuk Penyuluh Tenaga Kontrak sebanyak 7 buah	910,000,000 PM PM			
JUMLAH I (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)		4,103,000,000	-	-	
II	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	1. Sarana MCK Plus-plus di Desa Cikahuripan	PM			
III	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	1. Keramba jaring apung sebanyak 6 unit di Cibangban Cisolok dan Sangrawayang kec. Simpenan	PM	-	-	
	2. Kapal ikan 3 GT sebanyak 3 unit di cibangban-cisolok, sangrawayan-simpenan, ujunggenteng-ciracap	PM			
IV	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT				
	Rehab Rumah Nelayan Tidak Layak Huni (253 unit)				
	1. Kecamatan Ciemas Desa Ciemas 10 unit, Ciwaru 53 unit, Mandrajaya 19 unit, Mekarsakti 11 unit	1,897,500,000	-	-	
	2. Kecamatan Cisolok Desa Cikahuripan 51 unit, Cisolok 109 unit				
	3. Pembangunan sarana umum di Desa Cikahuripan berupa jalan beton penghubung antar rumah	337,000,000			
JUMLAH IV (KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT)		2,234,500,000	-	-	
V	KEMENTERIAN SOSIAL				
	1. Bantuan beras bagi nelayan yang tidak melaut (paceklik/cuaca buruk) 66.192 kg	529,536,000	-	-	
JUMLAH V (KEMENTERIAN SOSIAL)		529,536,000	-	-	

VI	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (ESDM) 1. Penyediaan listrik hemat energi dan murah bagi nelayan 219 sambungan	PM	-	-	
VII	BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1. Sertifikasi hak atas tanah nelayan 250 bidang tanah	PM	-	-	
VIII	PERBANKAN / LEMBAGA EKONOMI 1. Kredit Nelayan/Pengusaha perikanan melalui Bank BRI, BTPN Syariah, Bjb.		-	-	1,700,000,000
JUMLAH VI (PERBANKAN/LEMBAGA EKONOMI)			-	-	1,700,000,000
VIII	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT				
	1. Dempond budidaya rumput laut 5 unit, 25 orang di Desa Sangrawayang (Kec. Simpenan) dan Mandarajaya (Kec. Ciemas)	PM			
	2. Dempond budidaya ikan lele, 20 orang di Kecamatan Cikakak	PM			
	3. Dempond ikan hias 20 orang di Cianggrek Kecamatan Simpenan	PM			
	4. Pengembangan budidaya Lobster 10 orang di Cibangban Kecamatan Cisolok	PM			
	5. Gerakan Bersih Pantai dan Laut 400 orang di Ujunggenteng	PM			
	6. Bintek Pengelohan Sampah Pantai 30 orang di ujunggenteng	PM			
	7. Penyadaran Mitigasi Bencana 1 paket, 1.500 orang	PM			
	8. Pembinaan dan Penyuluhan Pokmaswas di Ujunggenteng dan Ciwaru	PM			
	9. Sosialisasi Hutan Mangrove, 14 orang di Cibitung	PM			
	10. Pengadaan Benih Mangrove 20.000 batang di Cibitung	PM			
	11. Kapal Inkamina, 2 unit	3,000,000,000			

	12. Sosialisasi SeHat, 60 orang	PM			
	13. Bintek Petugas Cek Fisik Kapal Kewenangan Provinsi (10-30 GT) 6 orang	PM			
	14. Bantuan Sarana Pengolahan Abon Ikan 1 paket	PM			
	15. Bantuan Cool Box, 1 paket	PM			
	16. Sosialisasi SKP, 2 orang	PM			
	17. Sosialisasi Pengembangan Sistem Rantai Dingin, 2 orang	PM			
	18. Pembinaan dan Pengembangan UMKM, 4 orang	PM			
	19. Pendampingan UKM, 2 orang	PM			
	20. Pelatihan Value Added, 1 orang	PM			
	21. Pelatihan Rumah Kemasan	PM			
	22. Bantuan Kapal 2 GT (Congkreng) 12 unit	PM			
	23. Pelatihan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dan Kepelabuhanan, 2 orang	PM			
	24. Pelatihan SHTI, 5 orang	PM			
	25. Bintek Operator Kartu Nelayan, 1 orang	PM			
	26. Kapal Fiber 2 GT sebanyak 18 unit	PM			
	27. Fish finder sebanyak 3 unit	PM			
	28. Cool box 600 liter untuk di kapal (nelayan) sebanyak 10 unit	PM			
	29. GPS sebanyak 3 unit untuk nelayan	PM			
	30. Printer kartu nelayan sebanyak 1 unit		PM		
	31. Fasilitasi Tim Teknis Program PUMP	PM			
JUMLAH VIII (DISKANLUT PROVINSI JABAR)		3,000,000,000	-	-	-
IX	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUKABUMI				
A	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			9,676,363,450	
	1 Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumber daya Kelautan dan Perikanan secara terpadu dan berkelanjutan			581,742,000	
	2 Pemutakiran Data Statistik Kelautandan Perikanan Pemutakiran Data Statistik Kelautan dan Perikanan			81,000,000	
	3 Peningkatan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			247,150,000	
	4 Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi			350,620,000	

5	Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Kepelabuhanan	279,586,000
6	Pengembangan Budidaya Air Tawar	243,430,000
7	Pengembangan Mina Padi	153,055,000
8	Optimalisasi Balai Benih Ikan	100,000,000
9	Pengembangan Jaringan Distribusi Pemasaran	452,850,000
10	DAK Non Bidang Kelautan dan Perikanan	7,186,930,450
B Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan		1,000,200,000
1	Peningkatan Usaha Perikanan	178,200,000
2	Peningkatan Usaha SDM Kelautan dan Perikanan (Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan)	404,000,000
3	Peralatan TPI Minajaya	418,000,000
C Kegiatan APBN TP TA. 2013 BIDANG P2HP		1,275,240,000
1	Kegiatan Pengembangan Supras Pemasaran Hasil Perikanan - Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda tiga 2 unit	
2	Kegiatan Pengadaan Sarana Sistem Rantai Dingin - Cool Box 200 liter - Ice Crusher - Trays - Timbangan Digital	
3	Kegiatan Pengembangan Sentra Pengolahan a Pengadaan percontohan briket batu bara di Bantargadung - Kertas pembungkus pindang - Kompor/tungku batu bara - Briket batu bara - Pisau - Timbangan digital - Badeng	
4	Pembangunan rumah kemasan	
5	Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk hasil perikanan non konsumsi	
6	Pengadaan sarana dan peralatan bangunan pusat promosi dan pemasaran produk hasil perikanan non konsumsi	

D Kegiatan APBD TA. 2013 BIDANG P2HP				
1	Peningkatan mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			247,150,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye GEMAR IKAN untuk anak TK dan SD 300 orang - Pengadaan Peralatan Pengolahan - Fasilitasi operasional pabrik es - Fasilitasi sentra pengolahan ikan pindang bantargadung - Fasilitasi kegiatan APBN TA. 2013 - Pengadaan peralatan uji mutu formalin dan borak - Uji formalin dan borak - Pengadaan peralatan penjernih air untuk pabrik es 			
2	Pengembangan Jaringan Distribusi Pemasaran			452,850,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Cut and fill tanah di lembursitu - Talud tanah di lembursitu - Fasilitasi lomba masak serba ikan - Fasilitasi pameran-pameran - Pendataan ikan masuk dan ikan keluar kabupaten - Temu bisnis untuk 50 orang 			
E KEGIATAN DAK BIDANG P2HP				
<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan rumah singgah di sentra pengolahan ikan pindang bantargadung - Fiber untuk pengasinan - Pembangunan kios - Pemasangan instalasi listrik dan air di lembursitu 				
F PUMP Bidang Perikanan Tangkap TA. 2013		1,700,000,000		
JUMLAH IX (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUKABUMI)		2,975,240,000	11,376,563,450	
X	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU			
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap				
A. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan		35,000,000		
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dok. Teknis Produktivitas perjenis alat penangkap ikan terkait jenis ikan hasil tangkapan 				

- Jumlah Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan buku kapal					
B. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	10,200,000,000				
- Jumlah lokasi pengembangan, peningkatan, operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT Pusat, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial					
- Layanan Perkantoran					
- Kendaraan Bermotor					
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					
C. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib dan Berkualitas	15,680,000				
- Jumlah lokasi pembinaan pelayanan usaha penangkapan dan kewenangan daerah					
D. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	78,350,000				
- Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mandiri					
- Pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan					
E. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	412,500,000				
- Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang akurat di seluruh provinsi dari UPT pelabuhan perikanan (Provinsi)					
- Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumberdaya ikannya (WPP)					
- Jumlah ZEEI yang terkelola sumberdaya ikannya					
F. Peningkatan Dukungan Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	3,274,568,000				
- Layanan Perkantoran					

JUMLAH X (PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU)		14,016,098,000	0		
XI	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)				
	1 PNPM	35,000,000			
	2 PNPM	57,500,000			
	3 PNPM	50,000,000			
	4 PNPM	40,000,000			
	5 PNPM	150,000,000			
	6 PNPM	67,500,000			
	7 PNPM	57,500,000			
	8 PNPM	45,000,000			
	9 PNPM	35,000,000			
JUMLAH XI (BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)		537,500,000	-		
XII	BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KABUPATEN SUKABUMI				
	1 Pengembangan Pesisir dan Laut Terpadu Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Ciemas, Surade	PM			
	2 Penerapan Instrumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL Kecamatan Ciracap, Cibitung, dan Ciemas	100,000,000			
	3 Pendataan Kerusakan Sumber Daya Alam (Menuju Indonesia Hijau) Kec. Palabuhanratu, Simpenan, Cikakak, dan Cisolok	30,000,000			
	4 Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh Kecamatan Palabuhanratu	175,000,000	-		-
	5 Teknologi Tepat Guna Lingkungan Kecamatan Cisolok, Ciakak, Simpenan, dan Palabuhanratu	125,000,000	-		-
	6 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kec. Palabuhanratu	85,000,000	-		-
	7 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade	195,000,000	-		-
	8 Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan Kecamatan Palabuhanratu dan Cibitung	100,000,000	-		-
	9 Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kecamatan Cisolok, Ciakak, Simpenan,				

	dan Palabuhanratu	100,000,000	-		-
10	Penyusunan Kajian dan Profil Lingkungan Hidup Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade	25,000,000	-		-
11	Identifikasi dan Penetapan Kawasan Lindung Kabupaten Sukabumi di Luar Kawasan Hutan Kecamatan Cibitung dan Ciracap	30,000,000	-		-
12	Pengendalian Pencemaran B3, Limbah B3 dan Sampah Kecamatan Palabuhanratu	75,000,000	-		-
13	Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Kecamatan Cisolok	30,000,000	-		-
14	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade	25,000,000	-		-
15	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) Kecamatan Palabuhanratu	100,000,000	-		-
JUMLAH XII (BADAN LINGKUNGAN HIDUP)		1,065,000,000	-	-	
XIII	BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI				
	1 Lumbung Pangan Masyarakat Desa				
	- Kec. Ciracap	-		50,000,000	
JUMLAH XIII (BADAN KETAHANAN PANGAN)		-	-	50,000,000	
XIV	DINAS PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PESDM)				
	1 Pembangunan jaringan listrik pedesaan di 5 kecamatan	1,852,620,000	-		
	- Kec. Tegalbuleud				
	- Kec. Cisolok				
	- Kec. Ciemas				
	- Kec. Surade				
	- Kec. Palabuhanratu				
	2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Produksi Pertambangan, Air Tanah dan Energi di 8 kecamatan	107,400,000			
	- Kec. Simpenan				
	- Kec. Cisolok				
	- Kec. Palabuhanratu				

	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Ciracap - Kec. Ciemas - Kec. Tegalbuleud - Kec. Waluran - Kec. Surade 				
	3 Perencanaan sistem informasi energi dan sumberdaya mineral	94,904,000			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Palabuhanratu 				
	4 Pengelolaan air tanah dan geologi lingkungan	678,164,000			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Palabuhanratu 				
	5 Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan di 8 kecamatan	403,318,000			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Simpenan - Kec. Cisolok - Kec. Waluran - Kec. Ciracap - Kec. Ciemas - Kec. Tegalbuleud - Kec. Surade - Kec. Palabuhanratu 				
	6 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian energi baru dan terbarukan	93,880,000			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Ciemas - Kec. Palabuhanratu 				
	7 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian panas bumi	118,880,000			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Cisolok - Kec. Simpenan - Kec. Palabuhanratu 				
JUMLAH XIV (ESDM)		3,349,166,000	-	-	
XV	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. SUKABUMI				
	1 Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Cibangban			500,000,000	
	2 Pengembangan Kawasan Wisata Cipanas-Cisolok			700,000,000	
	3 Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Citepus			600,000,000	
	4 Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Minajaya			1,000,000,000	
JUMLAH XV (DISPARBUDPORA)			-	2,800,000,000	

XVI	DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI				
	1 Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Palaabuhanratu	754,800,000	-	-	-
	2 Program Fakir Miskin Pedesaan Kec. Simpenan	125,000,000	-	-	-
	3 Program Bedah Kampung 100 rumah di Kec. Simpenan	754,800,000	-	-	-
	4 Program Tanggap Rumah Sehat	20,000,000	-	-	-
	- Kecamatan Cisolok 3 rmh/desa	-	-	-	-
	- Kecamatan Simpenan 3 rmh/desa	-	-	-	-
	5 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat		25,000,000	-	-
	- Kecamatan Cisolok 10 KK	-	-	-	-
	- Kecamatan Cikakak 10 KK	-	-	-	-
	6 Bantuan Paket Sembako Kec. Palabuhanratu untuk 100 orang	-	-	15,000,000	-
	7 Bantuan Paket Kec. Simpenan untuk 50 orang	-	10,000,000	-	-
JUMLAH XVI (DINAS SOSIAL)		1,654,600,000	35,000,000	15,000,000	-
XVII	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
	1 Pemasangan lampu suar di TPI ciwaru	100,000,000	-	100,000,000	-
	2 Pengadaan tanda selar kapal	75,000,000	-	75,000,000	-
	3 Pembinaan dan pengawasan angkutan perairan di 7 kecamatan	-	-	145,000,000	-
	4 Pemasangan lampu suar di TPI Ujunggenteng	50,000,000	-	-	-
	5 Pemasangan lampu suar di TPI Minajaya	90,000,000	-	90,000,000	-
	6 FS. Potensi Perhubungan Laut	500,000,000	-	500,000,000	-
JUMLAH XVII (DISHUBKOMINFO))		175,000,000	-	910,000,000	-
XVIII	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KAB. SUKABUMI				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan		300,907,400		
	1 Sekolah Lapang Kawasan Agribisnis Peternakan dan Minapolitan				
	- Sekolah Lapang Minapolitan Pengolah Hasil Perikanan di Palabuhanratu, Simpenan, Cikakak, Cisolok, Surade				
JUMLAH XVIII (BP4K)		-	300,907,400		

XIX	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. SUKABUMI				
	1 Penanganan Penanggulangan Bencana Longsor			PM	
	- Desa Cicadas Kec. Cisolok			PM	
	- Desa Cikelat Kec. Cisolok			PM	
	- Desa Karangpapak Kec. Cisolok			PM	
	- Desa Pasirbaru Kec. Cisolok			PM	
	- Desa Kertajaya Kec. Simpenan			PM	
	- Desa Sirnaresmi Kec. Cisolok			PM	
	- Desa Cibuntu Kec. Simpenan			PM	
	- Desa Cisolok Kec. Cisolok			PM	
	2 Sosialisasi Siaga Darurat Bencana Tsunami		150,000,000	-	-
	- Kec. Cisolok dan Kec. Palabuhanratu	-	-	-	-
	3 Penanggulangan Korban Pasca Bencana dengan Budidaya Rumput Laut	2,000,000,000	-	-	-
	- Ciemas dan Simpenan untuk 130 orang				
JUMLAH XIX (BPBD)		2,000,000,000	150,000,000	-	-
XX	DINAS TATA RUANG, PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN				
	1. Pengadaan sarana air bersih di Desa Cisolok, Pasir Baru dan Ujunggenteng			PM	
	2				
ANG, PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN))					
XXI	DISKOPERINDAGKOP				
	1. Pembangunan pasar palabuhanratu dan pasar pendukung di pesisir			PM	
	2				
JUMLAH XXI (DISKOPERINDAGKOP)					
XXII	INVESTASI SWASTA			PM	
JUMLAH XXII (INVESTASI SWASTA)					

XXIII	CSR PLTU PALABUHANRATU				
	1. Uang untuk KUB 2. Mesin Genset Portabel, 100 unit				150,000,000 PM
JUMLAH XXIII (CSR PLTU PALABUHANRATU)					150,000,000
JUMLAH TOTAL		35,639,640,000	485,907,400	15,151,563,450	1,850,000,000

KETERANGAN :

1. Anggaran yang mendukung program masyarakat dari berbagai sumber dana dan OPD terkait tidak dapat dikompilasi secara keseluruhan karena nilainya tidak diketahui atau ditulis "PM"
2. Koordinasi di intern POKJA Minapolitan relatif sulit dilakukann karena petugas yang hadir dalam acara tersebut tidak tetap atau berubah-ubah
3. Peraturan Bupati Sukabumi tentang Masterplan Minapolitan sedang dalam proses penyelesaian.

RENCANA KEGIATAN MINAPOLITAN TAHUN ANGGARAN 2014
UPTD KABUPATEN SUKABUMI

NO	KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN (RP)			LAIN-LAIN
		APBN	APBD I	APBD II	
1	2	4	5	6	7
I	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BRKP 1' Pelatihan dan Pengembangan Pembesaran Sidat, 1 unit 10 orang 2 Pengembangan Infrastruktur kampung nelayan di desa Cimaja Kecamatan Cisolok KP3K 1. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh P2HP 1 Bantuan Truk Pengangkut Es 1 unit 2. Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Pindang 1 Paket 3. Bintek Pengolahan Ikan Pindang di Sentra Pindang, 30 orang 4. Pelatihan Usaha Pengolahan dan Pemasaran untuk wanita nelayan, 3 o 5. Pelatihan Pabrik Es, 1 orang 6. Pelatihan Diversifikasi Usaha, 1 orang 7 PUMP, 8 Kelompok Dirjen Perikanan Tangkap 1. Uji coba umpan buatan pancing Tuna 2. Pengembangan Diversifikasi Usaha, 3 orang 3. Bintek Syahbandar Perikanan, 1 orang 4. PUMP, 17 Kelompok 5. Mesin diesel inboard 24 PH sebanyak 3 unit 6. Mesin motor tempel 15 PK sebanyak 2 unit 7. Mesin motor gantar 5,5 PK sebanyak 1 unit 8. Mesin converter BBG sebanyak 8 unit Dirjen Budidaya				

	1 PUMP, 14 Kelompok				
JUMLAH I (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)		-	-	-	
II	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	1. Sarana air bersih di Desa Cikahuripan	PM			
JUMLAH II (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM)		PM			
III	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL				
	1. Keramba jaring apung sebanyak 6 unit di Cibangban Cisolok dan Sangrawayang kec. Simpenan		-	-	
	2. Kapal ikan 3 GT sebanyak 3 unit di cibangban-cisolok, sangrawayan-simpenan, ujunggenteng-ciracap				
JUMLAH III (KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL)			-	-	
IV	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT				
	Rehab Rumah Nelayan Tidak Layak Huni (263 unit)				
	1. Kecamatan Ciemas Desa Ciemas 11 unit, Ciwaru 59 unit, Mandrajaya 21 unit, Mekarsakti 12 unit,		-	-	
	2. Kecamatan Cisolok Desa Cikahuripan 51 unit, Cisolok 109 unit				
	3. Pembangunan sarana umum di Desa Cikahuripan berupa jalan beton penghubung antar rumah				
JUMLAH IV (KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT)			-	-	
IV	KEMENTERIAN SOSIAL				
	1. Bantuan beras bagi nelayan yang tidak melaut (paceklik/cuaca buruk) 66.192 kg		-	-	
JUMLAH IV (KEMENTERIAN SOSIAL)			-	-	

JUMLAH V (KEMENTERIAN SOSIAL)				-	-	
V	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (ESDM)					
	1. Penyediaan listrik hemat energi dan murah bagi nelayan 219 sambungan			-	-	
	2.					
JUMLAH V (KEMENTERIAN SOSIAL)				-	-	
VI	BADAN PERTANAHAN NASIONAL					
	1. Sertifikasi hak atas tanah nelayan 250 bidang tanah			-	-	
VII	PERBANKAN / LEMBAGA EKONOMI					
	1. Kredit Usaha Perikanan Tangkap			-	-	9,000,000,000
	2. Kredit Usaha P2HP					4,000,000,000
	3. Kredit Usaha Perikanan Budidaya					1,000,000,000
JUMLAH VII (PERBANKAN/LEMBAGA EKONOMI)				-	-	14,000,000,000
VIII	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT					
	1. Dempond budidaya rumput laut 5 unit, 25 orang di Desa Sangrawayang (Kec. Simpenan) dan Mandarajaya (Kec. Ciemas)					
	2. Dempond budidaya ikan lele, 20 orang di Kecamatan Cikakak					
	3. Dempond ikan hias 20 orang di Cianggrek Kecamatan Simpenan					
	4. Pengembangan budidaya Lobster 10 orang di Cibangban Kecamatan Cisolok					
	5. Gerakan Bersih Pantai dan Laut 400 orang di Ujunggenteng					
	6. Bintek Pengelohan Sampah Pantai 30 orang di ujunggenteng					
	7. Penyadaran Mitigasi Bencana 1 paket, 1.500 orang					

	8. Pembinaan dan Penyuluhan Pokmaswas di Ujunggenteng dan Ciwaru 9. Sosialisasi Hutan Mangrove, 14 orang di Cibitung 10. Pengadaan Benih Mangrove 20.000 batang di Cibitung 11. Kapal Inkamina, 2 unit 12. Sosialisasi SeHat, 60 orang 13. Bintek Petugas Cek Fisik Kapal Kewenangan Provinsi (10-30 GT) 6 orang 14. Bantuan Sarana Pengolahan Abon Ikan 1 paket 15. Bantuan Cool Box, 1 paket 16. Sosialisasi SKP, 2 orang 17. Sosialisasi Pengembangan Sistem Rantai Dingin, 2 orang 18. Pembinaan dan Pengembangan UMKM, 4 orang 19. Pendampingan UKM, 2 orang 20. Pelatihan Value Added, 1 orang 21. Pelatihan Rumah Kemasan 22. Bantuan Kapal 2 GT (Congkreng) 12 unit 23. Pelatihan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dan Kepelabuhanan, 2 orang 24. Pelatihan SHTI, 5 orang 25. Bintek Operator Kartu Nelayan, 1 orang 26. Kapal Fiber 2 GT sebanyak 18 unit 27. Fish finder sebanyak 3 unit 28. Cool box 600 liter untuk di kapal (nelayan) sebanyak 10 unit 29. GPS sebanyak 3 unit untuk nelayan 30. Printer kartu nelayan sebanyak 1 unit				
	JUMLAH VII (DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT)				
IX	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUKABUMI				
	A Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-		10,338,552,450	
	1 Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumber daya Kelautan dan				

Perikanan secara terpadu dan berkelanjutan			581,742,000
2 Pemutakiran Data Statistik Kelautandan Perikanan Pemutakiran Data Statistik Kelautan dan Perikanan			81,000,000
3 Peningkatan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			247,150,000
4 Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi			350,620,000
5 Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Kepelabuhanan			941,775,000
6 Pengembangan Budidaya Air Tawar			243,430,000
7 Pengembangan Mina Padi			153,055,000
8 Optimalisasi Balai Benih Ikan			100,000,000
9 Pengembangan Jaringan Distribusi Pemasaran			452,850,000
10 DAK Non Bidang Kelautan dan Perikanan			7,186,930,450
B Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	-		1,000,200,000
1 Peningkatan Usaha Perikanan			178,200,000
2 Peningkatan Usaha SDM Kelautan dan Perikanan (Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan)			404,000,000
3 Peralatan TPI Minajaya			418,000,000
C Kegiatan APBN TP TA. 2014 BIDANG P2HP	50,000,000		
1 Kegiatan Pengembangan Saprasi Pemasaran Hasil Perikanan	50,000,000		
- Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda tiga 2 unit			
2 Kegiatan Pengadaan Sarana Sistem Rantai Dingin			
- Cool Box 200 liter			
- Ice Crusher			
- Trays			
- Timbangan Digital			
3 Kegiatan Pengembangan Sentra Pengolahan			
a Pengadaan percontohan briket batu bara di Bantargadung			
- Kertas pembungkus pindang			
- Kompor/tungku batu bara			
- Briket batu bara			
- Pisau			
- Timbangan digital			
- Badeng			

4	Pembangunan rumah kemasan				
5	Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk hasil perikanan non konsumsi				
6	Pengadaan sarana dan peralatan bangunan pusat promosi dan pemasaran produk hasil perikanan non konsumsi				
D	Kegiatan APBD TA. 2013 BIDANG P2HP	-			
1	Peningkatan mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-		247,150,000	
	- Kampanye GEMAR IKAN untuk anak TK dan SD 300 orang				
	- Pengadaan Peralatan Pengolahan				
	- Fasilitasi operasional pabrik es				
	- Fasilitasi sentra pengolahan ikan pindang bantargadung				
	- Fasilitasi kegiatan APBN TA. 2013				
	- Pengadaan peralatan uji mutu formalin dan borak				
	- Uji formalin dan borak				
	- Pengadaan peralatan penjernih air untuk pabrik es				
2	Pengembangan Jaringan Distribusi Pemasaran	-		452,850,000	
	- Cut and fill tanah di lembursitu				
	- Talud tanah di lembursitu				
	- Fasilitasi lomba masak serba ikan				
	- Fasilitasi pameran-pameran				
	- Pendataan ikan masuk dan ikan keluar kabupaten				
	- Temu bisnis untuk 50 orang				
E	KEGIATAN DAK BIDANG P2HP	-			
	- Pembangunan rumah singgah di sentra pengolahan ikan pindang bantargadung				
	- Fiber untuk pengasinan				
	- Pembangunan kios				
	- Pemasangan instalasi listrik dan air di lembursitu				
F	PUMP Bidang Perikanan Tangkap TA. 2014	-			
	- Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (Kapal, Alat tangkap, Mesin Cool Box)				
	- Biaya Operasional				
Jumlah IV (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUKABUMI)			50.000.000	12.228.952.150	

JUMLAH IX (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SURABUWIT)		30,000,000		14,330,334,430	
X	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap A. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dok. Teknis Produktivitas perjenis alat penangkap ikan terkait jenis ikan hasil tangkapan - Jumlah Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan buku kapal B. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi pengembangan, peningkatan, operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT Pusat, termasuk di luar dan daerah perbatasan yang potensial - Layanan Perkantoran - Kendaraan Bermotor - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran C. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib dan Berkualitas <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi pembinaan pelayanan usaha penangkapan dan kewenangan daerah D. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mandiri - Pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan E. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang akurat di seluruh provinsi dari UPT pelabuhan perikanan (Provinsi) - Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumberdaya ikannya (WPP) - Jumlah ZEEI yang terkelola sumberdaya ikannya F. Peningkatan Dukungan Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas				

	Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap - Layanan Perkantoran				
JUMLAH X (PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU)					
XI	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)				
	1 PNPM			35,000,000	
	2 PNPM			57,500,000	
	3 PNPM			50,000,000	
	4 PNPM			40,000,000	
	5 PNPM			150,000,000	
	6 PNPM			67,500,000	
	7 PNPM			57,500,000	
	8 PNPM			45,000,000	
	9 PNPM			35,000,000	
JUMLAH XI (BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)			-	537,500,000	
XII	BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KABUPATEN SUKABUMI				
	1 Pengembangan Pesisir dan Laut Terpadu Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Ciemas, Surade			PM	
	2 Penerapan Instrumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL Kecamatan Ciracap, Cibitung, dan Ciemas			100,000,000	
	3 Pendataan Kerusakan Sumber Daya Alam (Menuju Indonesia Hijau) Kec. Palabuhanratu, Simpenan, Cikakak, dan Cisolok			30,000,000	
	4 Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh Kecamatan Palabuhanratu		-	175,000,000	-
	5 Teknologi Tepat Guna Lingkungan Kecamatan Cisolok, Ciakak, Simpenan, dan Palabuhanratu		-	125,000,000	-
	6 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kec. Palabuhanratu		-	85,000,000	-
	7 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade		-	195,000,000	-
	8 Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan Kecamatan Palabuhanratu				

	dan Cibitung		-	100,000,000	-
	9 Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kecamatan Cisolok, Ciakak, Simpenan, dan Palabuhanratu		-	100,000,000	-
	10 Penyusunan Kajian dan Profil Lingkungan Hidup Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade		-	25,000,000	-
	11 Identifikasi dan Penetapan Kawasan Lindung Kabupaten Sukabumi di Luar Kawasan Hutan Kecamatan Cibitung dan Ciracap		-	30,000,000	-
	12 Pengendalian Pencemaran B3, Limbah B3 dan Sampah Kecamatan Palabuhanratu		-	75,000,000	-
	13 Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Kecamatan Cisolok		-	30,000,000	-
	14 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Tegal Buleud, Ciracap, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade		-	25,000,000	-
	15 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) Kecamatan Palabuhanratu		-	100,000,000	-
JUMLAH XII (BADAN LINGKUNGAN HIDUP)			-	1,065,000,000	
XIII	BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI				
	1 Lumbung Pangan Masyarakat Desa - Kec. Ciracap			50,000,000	
JUMLAH XIII (BADAN KETAHANAN PANGAN)			-	50,000,000	
XIV	DINAS PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PESDM)				
	1 Pembangunan jaringan listrik pedesaan di 5 kecamatan - Kec. Tegalbuleud - Kec. Cisolok - Kec. Ciemas - Kec. Surade - Kec. Palabuhanratu		-	1,852,620,000	
	2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Produksi Pertambangan, Air Tanah dan Energi di 8 kecamatan			107,400,000	

	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Simpenan - Kec. Cisolok - Kec. Palabuhanratu - Kec. Ciracap - Kec. Ciemas - Kec. Tegalbuleud - Kec. Waluran - Kec. Surade 				
	3 Perencanaan sistem informasi energi dan sumberdaya mineral			94,904,000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Palabuhanratu 				
	4 Pengelolaan air tanah dan geologi lingkungan			678,164,000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Palabuhanratu 				
	5 Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan di 8 kecamatan				
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Simpenan - Kec. Cisolok - Kec. Waluran - Kec. Ciracap - Kec. Ciemas - Kec. Tegalbuleud - Kec. Surade - Kec. Palabuhanratu 				
	6 Pembinaan, pengawasan dan pengedalian energi baru dan terbarukan				
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Ciemas - Kec. Palabuhanratu 				
	7 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian panas bumi				
	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Cisolok - Kec. Simpenan - Kec. Palabuhanratu 				
JUMLAH XIV (ESDM)			-		
XV	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. SUKABUMI				
	1 Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Karanghawu			200,000,000	
	2 Pengembangan Kawasan Wisata Cipanas-Cisolok				

	3 Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Citepus			350,000,000	
	4 Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Minajaya			250,000,000	
JUMLAH XV (DISPARBUDPORA)			-	800,000,000	
XVI	DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI				
	1 Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Palaabuhanratu	-	-	-	-
	2 Program Fakir Miskin Pedesaan Kec. Simpenan	-	-	-	-
	3 Program Bedah Kampung 100 rumah di Kec. Simpenan	-	-	-	-
	4 Program Tanggap Rumah Sehat	-	-	-	-
	- Kecamatan Cisolok 3 rmh/desa	-	-	6,000,000	-
	- Kecamatan Simpenan 3 rmh/desa	-	-	6,000,000	-
	5 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat	25,000,000	-	-	-
	- Kecamatan Cisolok 10 KK	-	12,500,000	-	-
	- Kecamatan Cikakak 10 KK	-	12,500,000	-	-
	6 Bantuan Paket Sembako Kec. Palabuhanratu untuk 100 orang	15,000,000	-	-	-
	7 Bantuan Paket Kec. Simpenan untuk 50 orang	-	-	10,000,000	-
	5 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat	25,000,000	-	-	-
	- Kecamatan Cisolok 10 KK	-	12,500,000	-	-
	- Kecamatan Cikakak 10 KK	-	12,500,000	-	-
	6 Bantuan Paket Sembako Kec. Palabuhanratu untuk 100 orang	10,000,000	-	10,000,000	-
	7 Bantuan Paket Kec. Simpenan untuk 50 orang	5,000,000	-	5,000,000	-
JUMLAH XIV (DINAS SOSIAL)		55,000,000	50,000,000	25,000,000	-
XV	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
	1 Pemasangan lampu suar di TPI ciwaru	115,000,000	-	115,000,000	-
	2 Pengadaan tanda selar kapal	75,000,000	-	75,000,000	-
	3 Angkutan perairan dan daratan	100,000,000	-	100,000,000	-
	4 Pembinaan dan pengawasan angkutan perairan di 7 kecamatan	145,000,000	-	145,000,000	-
	5 AMDAL Palabuhanratu	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
JUMLAH XV (DISHUBKOMINFO)		2,435,000,000	2,100,000,000	435,000,000	-
XVI	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN				

	KAB. SUKABUMI Sekolah Lapang Minapolitan di Kecamatan Palabuhanratu, Simpenan, Cikakak, Cisolok dan Ciemas		PM		
JUMLAH XVI (BP4K)		-	4,200,000,000	-	-
XVII	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. SUKABUMI 1. Sosialisasi DAN MITIGASI PRB di pesisir pantai		PM		
JUMLAH XVII (BPBD)					
XVIII	INVESTASI SWASTA				
JUMLAH XVIII (INVESTASI SWASTA))					
IX	CSR PLTU PALABUHANRATU 1. Uang untuk KUB 2. Mesin Genset Portabel, 100 unit				150,000,000 PM
JUMLAH IX (CSR)		-	8,300,000,000	-	150,000,000
JUMLAH TOTAL		#VALUE!			